



PROFIL

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

PROVINSI SULAWESI TENGAH

**DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH
2023**



Negeri Seribu Megalith

GUBERNUR SULAWESI TENGAH



H. RUSDY MASTURA

WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Drs. MA'MUN AMIR

SEKRETARIS PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dra. NOVALINA., MM



SAMBUTAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Salam Sejahtera, Shalom Om Swastiastu, Namu Budaya Salam Kebajikan

Saya menyambut baik diterbitkannya Buku Profil Perkembangan Data Kependudukan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Buku ini berisi gambaran kondisi, perkembangan kependudukan berskala provinsi sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), mengamanatkan bahwa profil data kependudukan skala provinsi diterbitkan setiap tahun sekali.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses pemberian perlindungan dan pengakuan tersebut dilaksanakan dalam administrasi kependudukan.

Data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah adalah data kependudukan yang bersumber dari pelayanan administrasi kependudukan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang dilakukan setiap saat dengan mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Keakuratan data kependudukan bergantung pada partisipasi masyarakat yang secara sadar pelaporan peristiwa kependudukan dan pemutakhiran data kependudukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota. Data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) telah teruji ketunggalannya melalui perekaman sidik jari dan iris mata.

Data kependudukan yang disajikan dalam Buku Profil Perkembangan Data Kependudukan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini bersumber dari data kependudukan bersih (DKB) Tahun 2022 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang telah dikonsolidasikan, ditelaah dan dianalisis sehingga dapat dipergunakan untuk semua keperluan oleh seluruh Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah ataupun Lembaga lainnya baik dipusat maupun di daerah antara lain untuk pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan demokrasi, penegakkan hukum, pencegahan kriminal dan evaluasi hasil pembangunan dibidang kependudukan.

Penghargaan kami berikan kepada seluruh jajaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan 5 (Lima) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah. Bahwa perencanaan pembangunan daerah harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat di pertanggung jawabkan, baik yang menyangkut masalah kependudukan, masalah potensi sumber daya daerah maupun informasi tentang kewilayahan, Kesehatan masyarakat, Pendidikan dan lainnya, dan juga pihak yang telah turut membantu tersusunnya Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua dalam mengabdikan kepada masyarakat, bangsa dan negara tercinta.

Palu, Mei 2023
Gubernur Sulawesi Tengah



H. RUSDY MASTURA

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Ridho-Nya sehingga penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan dengan baik dan penuh semangat.

Data Kependudukan yang berbasis Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan data dasar yang dapat di sajikan diantaranya menjadi data agregat untuk mendukung berbagai keperluan diantaranya Profil Perkembangan Kependudukan. Profil Perkembangan Kependudukan ini disusun untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan oleh karena itu untuk mewujudkan amanat Undang-Undang tersebut, Pemerintah Provinsi melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah telah menyusun Buku Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2022 dalam rangka untuk memberikan informasi penyajian data dan perkembangan kependudukan di Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam penyusunan buku profil ini kami menyadari bahwa buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022, yang telah berhasil disusun masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak yang membaca buku profil ini sangat diharapkan demi penyempurnaan dimasa mendatang.

Akhirnya, Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berupaya dan berhasil dalam menyusun Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini dan semoga bermanfaat serta semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian. Amin.

Palu, Mei 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



ANDI HAJIDIN, SE., M.Si

Pembina Utama Muda

Nip. 19710208 199903 1 003

DAFTAR ISI

SAMBUTAN GUBERNUR.....	i
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR GRAFIK.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	4
1.3 Ruang Lingkup	5
1.4 Pengertian Umum/Daftar Istilah yang Digunakan	6

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Letak dan Kondisi Geografis	15
2.2 Kondisi Demografis Daerah	20
2.2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk	22
2.2.2 Tingkat Penyebaran Penduduk	22
2.3 Gambaran Ekonomi Daerah	22
2.3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	30
2.3.1.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2023	30
2.3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	41
2.3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan..	42
2.3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	43
1. Kebijakan Pendapatan Daerah	43
2. Kebijakan Belanja Daerah.....	45
3. Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	47

2.4 Potensi Pengembangan Wilayah	48
2.4.1 Pertanian	48
a. Tanaman Pangan	49
b. Hortikultura.....	50
2.4.2 Perkebunan	50
2.4.3 Peternakan.....	51
2.4.4 Perikanan.....	51
2.4.5 Industri.....	51
2.4.6 Pariwisata	52
2.4.7 Pertambangan.....	55

BAB III SUMBER DATA

3.1 Registrasi	60
3.2 Non Registrasi	60
3.3 Data Lintas Sektor	61

BAB IV PERKEMBANGAN PENDUDUK

4.1 Jumlah dan Persebaran Penduduk	62
4.1.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota	62
4.1.2 Kepadatan Penduduk	64
4.1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk	65
4.2 Penduduk menurut Karakteristik Demografi	67
4.2.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin	67
a. Rasio Jenis Kelamin.....	69
b. Piramida Penduduk	72
c. Rasio Ketergantungan	74
4.2.2 Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Status Kawin.....	77
a. Angka Perkawinan Kasar	79

b. Angka Perkawinan Umum.....	81
c. Angka Perkawinan menurut Kelompok Umur.....	82
d. Rata-Rata Umur Kawin Pertama	82
e. Angka Perceraian Kasar	84
f. Angka Perceraian Umum	86
4.3.3 Keluarga.....	87
a. Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga.....	87
b. Hubungan dengan Kepala Keluarga	89
c. Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan umur dan Status Kawin.....	90
d. Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Jenis Kelamin	91
e. Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Status Kawin.....	93
f. Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Pendidikan..	94
g. Karakteristik Kepala Keluarga berdasarkan Status Pekerjaan	96
4.3.4 Penduduk menurut Karakteristik Sosial	97
a. Jumlah Penduduk menurut Pendidikan	97
b. Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan	99
c. Jumlah Penduduk menurut Agama.....	100
d. Jumlah Penduduk menurut Kecatatan	101
4.3.5 Kelahiran	102
a. Jumlah Kelahiran	103
b. Angka Kelahiran Kasar	104
4.3 Kesehatan	105
1. Kelahiran	105
2. Kematian	106
a. Angka Kematian Bayi.....	107

b. Angka Kematian Neonatal.....	108
c. Angka Kematian Post-Neonatal	109
d. Angka Kematian Balita	110
e. Kematian Ibu	111
4.3.1 Pendidikan	114
1. Angka Melek Huruf (AMH)	114
2. Angka Partisipasi Kasar (APK).....	115
3. Angka Partisipasi Murni (APM)	116
4. Angka Penduduk Putus Sekolah	117
4.3.2 Ekonomi.....	123
4.3.3 Sosial	124
1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.....	124
2. Proporsi Penduduk Penyandang Cacat	131
3. Proporsi Penduduk Miskin Penerima Askeskin	132
4.4 Mobilitas Penduduk.....	134

BAB V KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

5.1 Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	136
5.2 Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	138
5.3 Kepemilikan Akta.....	139
5.3.1 Akta Kelahiran	139
5.3.2 Akta Perkawinan	141
5.3.3 Akta Perceraian	143
5.3.4 Akta Kematian	145

BAB IV PENUTUP.....

6.1 Kesimpulan	146
6.2 Saran	148

DAFTAR TABEL

No.	Halaman
2.1	Pola Ruang Provinsi Sulawesi Tengah 15
2.2	Luas dan Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah menurut Kabupaten/Kota 17
2.3	Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah menurut Kabupaten/Kota 18
2.4	Jumlah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 19
2.5	Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota 20
2.6	Perkembangan Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2022 21
2.7	Realisasi Target/Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021-2023 44
2.8	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021-2023 46
2.9	Proyeksi/Target Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Sulawesi Tengah 47
2.10	Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2020 dan 2021 50
2.11	Potensi dan Sebaran Pertambangan di Sulawesi Tengah 57

4.1	Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	62
4.2	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	64
4.3	Angka Pertambahan Penduduk Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	65
4.4	Jumlah dan Proporsi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur	67
4.5	Rasio Jenis Kelamin berdasarkan Kabupaten/Kota	69
4.6	Rasio Jenis Kelamin berdasarkan Kelompok Umur	70
4.7	Rasio Ketergantungan	74
4.8	Persentase Penduduk berdasarkan Usia Muda, Produktif dan dan Usia Tua	75
4.9	Jumlah Penduduk berdasarkan Status Perkawinan.....	77
4.10	Angka Perkawinan Kasar	79
4.11	Angka Perkawinan Umum	80
4.12	Proporsi Penduduk menurut Kelompok Umur dan Status Kawin....	83
4.13	Angka Perceraian Kasar.....	84
4.14	Angka Perceraian Umum	85
4.15	Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga	76
4.16	Hubungan dengan Kepala Keluarga.....	88
4.17	Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur dan Status Kawin.....	90
4.18	Kepala Keluarga menurut Jenis Kelamin	91

4.19 Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan	92
4.20 Kepala Keluarga berdasarkan Pendidikan	94
4.21 Kepala Keluarga berdasarkan Status Pekerjaan	95
4.22 Penduduk berdasarkan Jenis Pendidikan.....	97
4.23 Penduduk berdasarkan Jenis Pendidikan Kabupaten/Kota	98
4.24 Penduduk menurut Agama dan Jenis Kelamin	99
4.25 Penduduk menurut Kecacatan dan Jenis Kelamin	101
4.26 Jumlah Kelahiran dalam 1 Tahun	103
4.27 Jumlah Angka Kelahiran Kasar	104
4.28 Angka Kelahiran menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	105
4.29 Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2022	113
4.30 Data Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMA Sederajat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2022.....	114
4.31 Data Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMA Sederajat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2022.....	116
4.32 Jumlah Putus Sekolah Jenjang Sekolah Dasar (SD) menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah tiap Kab/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2022	118
4.33 Jumlah Putus Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Jenis Kelamin dan Tingkat tiap Kab/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2022	119

4.34 Jumlah Putus Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut Jenis Kelamin dan Tingkat tiap Kab/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2022	120
4.35 Jumlah Putus Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Menurut Jenis Kelamin dan Tingkat tiap Kab/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2022	121
4.36 Jumlah Data Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	123
4.37 Rekapitulasi Data Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2022.....	129
4.38 Rekap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Penyandang Disabilitas Kabupaten/Kota Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021	130
5.1 Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	137
5.2 Jumlah dan Persentase Kepemilikan KTP-el.....	138
5.3 Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran	140
5.4 Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Jumlah Anak 0-17 Tahun	141
5.5 Kepemilikan Akta Perkawinan	142
5.6 Kepemilikan Akta Perceraian	144
5.7 Kepemilikan Akta Kematian	145

DAFTAR GAMBAR

No.		Halaman
2.1	Peta Pola Ruang Provinsi Sulawesi Tengah	16
4.1	Piramida Penduduk Sulawesi Tengah	72

DAFTAR GRAFIK

No.	Halaman
4.1 Jumlah Kematian Bayi menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022	106
4.2 Jumlah Kematian Neonatal menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022	107
4.3 Jumlah Kematian Post-Neonatal menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022	108
4.4 Jumlah Kematian Balita menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022 ..	109
4.5 Jumlah Kematian Ibu Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	111
4.6 Jumlah Kematian Ibu berdasarkan Penyebab di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	112

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam Konstitusi Negara Indonesia mengamanatkan, bahwa Negara berkewajiban untuk memberikan pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum kepada penduduknya. Disamping itu, Negara juga berkewajiban memberikan kesejahteraan kepada penduduk, serta memfasilitasi hak penduduk untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi bagi pengembangan diri dan lingkungan sosialnya

Perencanaan pembangunan yang ideal didasarkan pada kondisi atau keadaan penduduk di setiap daerahnya masing-masing. Hal ini dilakukan guna memberikan manfaat dan dapat dinikmati oleh seluruh penduduk, bukan oleh Sebagian atau golongan tertentu. Guna pembangunan dapat berjalan efisien dan tepat sasaran serta berkesinambungan untuk kesejahteraan penduduk, maka perlu dilakukan penyusunan perencanaan pembangunan yang baik.

Salah satu hal yang memegang peranan penting dalam tercapainya pembangunan di suatu wilayah adalah penduduk di wilayah itu sendiri. Selain itu aspek kependudukan juga berkaitan dengan masalah pembangunan, karena tujuan dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, ketersediaan informasi mengenai kependudukan sangatlah diperlukan untuk tercapainya tujuan pembangunan.

Isu kependudukan adalah isu yang sangat strategis dan bersifat lintas sektor. Oleh karena itu, keterkaitan berbagai aspek kependudukan dalam perencanaan pembangunan, akan menjadi pekerjaan besar yang harus diwujudkan. Dalam hal ini, upaya mewujudkan keterkaitan perkembangan kependudukan, sebagai wujud dinamika penduduk dengan berbagai kebijakan pembangunan menjadi prioritas penting agar kedepan nanti pengelolaan perkembangan kependudukan dapat mewujudkan keseimbangan yang serasi

antara kuantitas dan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas penduduk dan penataan persebarannya yang didukung oleh upaya-upaya perlindungan dan pemberdayaan penduduk, peningkatan pemahaman serta pengetahuan tentang wawasan kependudukan bahkan sejak usia dini.

Pada saat ini diharapkan terjadi pergeseran paradigma yang mengedepankan pola pembangunan yang berwawasan kependudukan. Pembangunan yang demikian mengandung dua makna, pertama : pembangunan yang disesuaikan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada; kedua : pembangunan sumber daya manusia, yaitu pembangunan yang lebih menekankan kualitas sumberdaya manusia dibandingkan peningkatan infrastruktur semata. Kedepan perencanaan pembangunan maupun implementasinya tidak dapat lagi mengabaikan peran penduduk sebagai objek maupun subjek atau agen pembangunan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Data kependudukan memegang peranan penting dalam menentukan kebijakan, baik perencanaan dalam pembangunan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan, baik bagi Pemerintah maupun pihak lain yang membutuhkan data kependudukan termasuk dunia usaha. Oleh karena itu ketersediaan data perkembangan kependudukan sampai tingkat lapangan menjadi faktor kunci keberhasilan pelaksanaan program-program kependudukan. Untuk itu pengembangan sistem informasi kependudukan yang bisa diakses dan dimanfaatkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan untuk tujuan intervensi yang berbeda-beda merupakan kebutuhan utama untuk segera diaplikasikan, sehingga makin lengkap dan akurat data kependudukan yang tersedia, maka akan semakin mudah dan tepat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dilaksanakan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, data kependudukan yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dapat digunakan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintah dan pembangunan. Undang-undang ini menyatakan bahwa data kependudukan Kementerian Dalam Negeri merupakan satu-satunya data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan, yaitu pelayanan publik, alokasi anggaran, perencanaan pembangunan, pembangunan demokrasi, serta penegakkan hukum dan pencegahan kriminal.

Manfaat atau kegunaan mengetahui informasi data kependudukan tidak saja penting bagi Lembaga Pemerintah, juga penting untuk Lembaga-Lembaga Swasta. Berbagai perencanaan pembangunan yang dibuat oleh pemerintah sangat erat kaitannya dengan informasi data kependudukan seperti perencanaan di bidang Pendidikan (kebutuhan guru dan kebutuhan sarana dan prasarana sekolah). Misalnya jika pemerintah akan membuat perencanaan di bidang Pendidikan seperti jumlah guru dan ruang kelas yang dibutuhkan dalam satu tahun tertentu, maka dibutuhkan data penduduk menurut kelompok umur dalam usia sekolah. Perencanaan di bidang perpajakan juga membutuhkan data kependudukan atau proyeksi data kependudukan yang diperoleh melalui informasi data kependudukan. Misalnya jika akan dibuat perencanaan di bidang fasilitas kesehatan akan dibutuhkan data tentang kondisi mortalitas di daerah yang bersangkutan misalnya angka kematian di wilayah tersebut, angka kematian bayi, angka kematian anak, angka kematian kasar dan sebagainya. Perencanaan-perencanaan yang berhubungan dengan kemiliteran, kesejahteraan sosial, perumahan, pertanian dan perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang dan jasa, jalan, rumah sakit, pusat-pusat pertokoan, pusat-pusat rekreasi akan lebih tepat apabila kesemuanya didasarkan pada data kependudukan. Sangat bermanfaat bagi pengembangan indikator pembangunan misalnya trend penurunan fertilitas/angka kelahiran dapat menjadi bukti kemampuan pemerintah dan mitranya dalam program

mengendalikan kelahiran semakin lengkap dan akurat data kependudukan yang dimiliki, maka makin mudah dan tepat perencanaan pembangunan yang dapat dilakukan oleh suatu daerah.

Hal ini menjadi dasar pentingnya penyajian data perkembangan kependudukan yang diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan. Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan ini bersumber dari data registrasi yang dihasilkan dari Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) serta data dari lintas sektor terkait. Data-data tersebut dilakukan pembersihan serta dikonsolidasikan yang dilakukan setiap tanggal 30 Juni (semester I) dan 31 Desember (semester II). Pada semester II Tahun 2022.

Berkenaan dengan Penyajian Data dan Informasi Perkembangan Kependudukan terutama untuk perencanaan pembangunan manusia, baik itu pembangunan ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan dan lain-lain yang terkait dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka data dan informasi perlu menggunakan data yang valid dan dapat dipercaya baik dari sisi jumlah maupun kualitas data dan dikemas secara baik, sederhana, informatif dan tepat waktu dalam bentuk Buku Profil Perkembangan Kependudukan yang disajikan secara berkelanjutan.

1.2 TUJUAN

Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2022 bertujuan untuk :

1. Sebagai upaya penyajian data dan pemberian informasi Perkembangan Kependudukan Provinsi Sulawesi Tengah yang diharapkan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan perencanaan pembangunan berwawasan kependudukan serta untuk mengevaluasi hasil pembangunan dimasa mendatang;

2. Selain untuk memenuhi maksud dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 6 (enam) dimana Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan Pemerintahan Dalam Negeri;
3. Sebagai alat publikasi dan meningkatkan pelayanan publik guna membangun komitmen semua pihak untuk lebih meningkatkan peran dan partisipasi penduduk dalam pembangunan di Provinsi Sulawesi Tengah.

1.3 RUANG LINGKUP

Profil Perkembangan Kependudukan Tahun 2022 mencakup gambaran umum di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, data kuantitatif dan data pengembangan kualitas penduduk diantaranya :

1. Kuantitas penduduk meliputi :
 - a. Jumlah dan Persebaran Penduduk;
 - b. Penduduk menurut Karakteristik Demografi;
- 2 . Kualitas penduduk meliputi :
 - a. Kesehatan;
 - b. Pendidikan;
 - c. Ekonomi;
 - d. Sosial;
3. Mobilitas penduduk memuat :
 - a. Mobilitas Permanen;
 - b. Mobilitas non Permanen;
 - c. Urbanisasi;
- 4 . Kepemilikan Dokumen Kependudukan memuat :
 - a. Kepemilikan Kartu Keluarga;

- b. Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk;
- c. Kepemilikan Akta;
- d. Kepemilikan Surat Keterangan Orang Terlantar;

1.4 PENGERTIAN UMUM/DAFTAR ISTILAH YANG DIGUNAKAN

1. **Penduduk** adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
2. **Kependudukan** adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat;
3. **Perkembangan kependudukan** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
4. **Profil Perkembangan Kependudukan** adalah gambaran kondisi, perkembangan dan prospek kependudukan (Permendagri Nomor 65 Tahun 2010);
5. **Data Kependudukan** adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
6. **Administrasi Kependudukan** adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dengan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hal lainnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lainnya (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);

7. **Kualitas penduduk** adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak;
8. **Kuantitas Penduduk** adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati, pindah tempat tinggal;
9. **Data Kependudukan Bersih (DKB)** adalah data kependudukan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri setiap semester yang bersumber dari data kependudukan Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan atau dibersihkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
10. **Proporsi penduduk** adalah jumlah dan informasi penduduk menurut pengelompokan tertentu seperti umur dan jenis kelamin;
11. **Warga Negara Indonesia (WNI)** adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013);
12. **Dokumen Kependudukan** adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013);
13. **Pendaftaran Penduduk** adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013);

14. **Peristiwa Kependudukan** adalah kejadian yang dialami oleh penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan atau Surat Keterangan Kependudukan yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, status tempat tinggal terbatas menjadi tinggal tetap (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
15. **Peristiwa Penting** adalah adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013);
16. **Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK**, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013);
17. **Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el**, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana (UU No. 24 Tahun 2013);
18. **Petugas Registrasi** adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya (UU No. 24 Tahun 2013);
19. **Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)**, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi

Pelaksana sebagai satu kesatuan (Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013);

20. **Kematian atau mortalitas** adalah hilangnya semua tanda-tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup;
21. **Kepadatan penduduk** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tertentu;
22. **Rasio Jenis Kelamin** adalah perbandingan antara perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasa dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita;
23. **Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)** adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas (keduanya disebut dengan bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja);
24. **Perkembangan Kependudukan** adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan (Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009);
25. **Mobilitas Penduduk** adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain dengan melewati batas administrasi;
26. **Mobilitas Penduduk permanen (migrasi)** adalah perpindahan penduduk melewati batas administrasi suatu daerah dengan tujuan untuk menetap

- dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administrative (migrasi/internal) atau batas politik/negara (migrasi internasional);
27. **Penduduk usia kerja (produktif)** adalah penduduk yang berusia 15 tahun sampai dengan 64 tahun;
 28. **Angka Migrasi Masuk** adalah banyaknya migran yang masuk ke Provinsi Sulawesi Tengah di setiap seribu penduduk dalam satu tahun;
 29. **Angka Migrasi Keluar** adalah banyaknya migran yang keluar dari Provinsi Sulawesi Tengah di setiap seribu penduduk dalam satu tahun;
 30. **Angka Migrasi Netto** adalah selisih banyaknya migran yang masuk dan keluar di setiap seribu penduduk dalam satu tahun di Provinsi Sulawesi Tengah;
 31. **Penduduk yang termasuk Angkatan Kerja** adalah penduduk usia kerja (15 – 64 tahun) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha;
 32. **Bekerja** adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh penduduk dan disampaikan penduduk sebagai pekerjaannya pada saat melaporkan biodatanya kepada petugas registrasi penduduk di Kelurahan;
 33. **Angka Partisipasi Angkatan Kerja** adalah proporsi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja;
 34. **Sekolah** adalah kegiatan seseorang untuk bersekolah di sekolah formal, mulai dari Pendidikan dasar sampai dengan Pendidikan tertinggi, selama seminggu yang lalu sebelum pencacahan. Termasuk pula kegiatan dari mereka yang sedang libur sekolah;
 35. **Mengurus Rumah Tangga** adalah kegiatan seseorang yang mengurus rumah tangga tanpa mendapatkan upah, misalnya : ibu-ibu rumah

tangga; Sebaliknya pembantu rumah tangga; Sebaliknya pembantu rumah tangga yang mendapat upah walaupun pekerjaannya mengurus rumah tangga dianggap bekerja;

36. **Kegiatan lainnya** adalah mereka yang melakukan suatu pekerjaan di luar jenis pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SIAK;
37. **Pendidikan** adalah tingkat Pendidikan yang dicapai seseorang setelah mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi suatu tingkatan sekolah dengan mendapatkan tanda tamat (ijazah);
38. **Jenis Pekerjaan** adalah macam pekerjaan yang sedang dilakukan oleh penduduk, berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
39. **Status Pekerjaan** adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan berdasarkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
40. **Angka Pengangguran** adalah proporsi jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja;
41. **Angka Kematian Kasar** adalah banyaknya kematian yang terjadi pada suatu tahun tertentu setiap 1000 penduduk;
42. **Pertumbuhan Penduduk** adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk di suatu wilayah, dimana pertumbuhan penduduk tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah dan migrasi netto;
43. **Angka Pertumbuhan Penduduk** adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya;

44. **Rasio Jenis Kelamin** adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan;
45. **Piramida Penduduk** adalah gambar yang menunjukkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin yang disajikan secara grafik;
46. **Rasio Kepadatan Penduduk** adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah atau berapa banyaknya penduduk per kilometer persegi pada periode tertentu;
47. **Angka Perkawinan Kasar** adalah angka yang menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan semester pada suatu semester tertentu;
48. **Angka Perkawinan Umum** adalah angka yang menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas pada suatu tahun tertentu;
49. **Angka Perceraian Kasar** adalah angka yang menunjukkan jumlah perceraian per 1000 penduduk terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan semester untuk suatu periode tertentu;
50. **Angka Perceraian Umum** adalah angka yang menunjukkan jumlah penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas (penduduk yang terkena resiko perceraian) pada suatu periode tertentu.
51. **Persebaran Penduduk** adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992);

52. **Kelahiran atau Fertilitas** yakni dapat diartikan sebagai kemampuan seorang wanita atau sekelompok wanita untuk melahirkan dalam waktu satu generasi atau selama masa subur;

53. Lahir Hidup dan Lahir Mati

a. Lahir Hidup adalah suatu kelahiran bayi tanpa memperhitungkan lamanya didalam kandungan, dimana si bayi menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan, misalnya ada nafas, ada denyut jantung atau denyut tali pusar atau gerakan otot.

b. Lahir Mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 minggu tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan pada saat dilahirkan.

54. **Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/TFR*)** adalah rata-rata jumlah anak yang akan dilahirkan oleh seorang wanita dalam masa reproduksi;

55. **Angka Kematian Bayi / *IMR*** adalah banyaknya kematian bayi usia kurang dari satu tahun (9-11 bulan) pada suatu periode per 1.000 kelahiran hidup pada pertengahan periode yang sama;

56. **Angka Kematian Ibu/*MMR*** adalah banyaknya kematian ibu pada waktu hamil atau selama 24 hari sejak terminasi kehamilan per 1.000 kelahiran hidup, tanpa memandang lama dan tempat kelahiran yang disebabkan karena kehamilan atau komplikasi kehamilan dan kelahiran atau pengelolaannya;

57. **Penduduk Melek Huruf** adalah penduduk yang berusia 10 tahun keatas yang telah bebas dari tiga buta, yaitu buta aksara, buta Latin, dan buta angka, buta bahasa Indonesia dan buta pengalaman dasar;

58. **Angka Putus Sekolah** adalah persentase murid yang putus sekolah menurut jenjang pendidikan dari jumlah murid dijenjang yang sama;
59. **Angka Partisipasi Murni/APM** adalah presentase siswa dengan umur yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah di usia yang sama;
60. **Angka Partisipasi Kasar/APK** adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 LETAK DAN KONDISI GEOGRAFIS

Luas wilayah daratan Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 bahwa luas wilayah daratan dengan mencapai 65.526,72 Km² atau 6.552.672 Ha, secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.1.
Pola Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

NO	FUNGSI KAWASAN	LUAS		KETERANGAN
		(Ha)	%	
I	Kawasan Lindung	2.329.745	35,55	
	Kawasan Konservasi Suaka Alam dan Pelestarian Alam	656.270*	10,00	* Termasuk DPCLS seluas 5.510Ha. Dalam Proses Persetujuan DPRRI
	Kawasan Konservasi Suaka Alam dan Pelestarian Alam Air	340.120	5,19	
	Hutan Lindung	1.333.355*	21,00	*Termasuk DPCLS seluas 9.802 Ha. Dalam Proses Persetujuan DPR RI
II	Kawasan Budi daya Hutan	2.078.858	31,73	
	Hutan Produksi Tetap (HPT)	1.442.649	22,02	
	Hutan Produksi (HP)	412.746	6,30	
	Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK)	223.463	3,41	
III.	Areal Penggunaan Lain (APL)	2.083.765	32,00	
	APL	2.083.765	32,00	
IV.	Perairan (Danau dan Sungai)	60.304	0,92	
	Jumlah III & IV	2.144.069	32,72	
	Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah (I+II+III+IV)	6.552.672	100,00	

Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah (RTRW Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2013-2033

- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Provinsi Sulawesi Barat.

Menurut sumber data dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah (2021), luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yakni 61.841,29 Km², secara rinci diperlihatkan Tabel 2.2.

Tabel 2.2
Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Provinsi Sulawesi tengah menurut Kabupaten/Kota

NO.	KABUPATEN	IBUKOTA	KETINGGIAN TEMPAT (mdpL)	LUAS WILAYAH (Km ²)	PERSENTASE TERHADAP LUAS PROVINSI (%)
1.	BANGGAI KEPULAUAN	SALAKAN	104	2.488,79	4,02
2.	BANGGAI	LUWUK	125	9.672,70	15,64
3.	MOROWALI	BUNGKU	3	3.037,04	4,91
4.	POSO	POSO KOTA	18	7.112,25	11,5
5.	DONGGALA	BANAWA	35	4.275,08	6,91
6.	TOLITOLI	BAOLAN	8	4.079,77	6,6
7.	BUOL	BIAU	63	4.043,57	6,54
8.	PARIGI MOUTONG	PARIGI	29	5.089,91	8,23
9.	TOJO UNA-UNA	AMPANA	117	5.721,15	9,25
10.	SIGI	BORA	183	5.196,02	8,4
11.	BANGGAI LAUT	BANGGAI	24	725,67	1,17
12.	MOROWALI UTARA	KOLONODALE	50	10.004,28	16,18
13.	PALU	PALU	64	395,06	0,64
JUMLAH				61.841,29	100

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2022

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yakni 61.605,718 Km², secara rinci diperlihatkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Luas Wilayah dan Persentase Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah
Menurut Kabupaten/Kota

KODE	KABUPATEN/KOTA	IBUKOTA	KETINGGIAN TEMPAT (Mdpl)	LUAS WILAYAH (Km2)	PERSENTASE TERHADAP LUAS PROVINSI (%)
7201	KAB. BANGGAI	LUWUK	125	8.252,882	13.40
7202	KAB. POSO	POSO KOTA	18	7.545,930	12.25
7203	KAB. DONGGALA	BANAWA	35	5.126,586	8.32
7204	KAB. TOLI TOLI	BAOLAN	8	3.700,369	6.01
7205	KAB. BUOL	BIAU	63	3.723,578	6.04
7206	KAB. MOROWALI	BUNGKU	3	4.486,891	7.28
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	SALAKAN	104	2.385,073	3.87
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	PARIGI	29	5.805,610	9.42
7209	KAB. TOJO UNA UNA	AMPANA	117	5.572,856	9.04
7210	KAB. SIGI	BORA	183	5.225,435	8.48
7211	KAB. BANGGAI LAUT	BANGGAI	24	688,151	1.12
7212	KAB. MOROWALI UTARA	KOLONODALE	50	8.736,006	14.18
7271	KOTA PALU	PALU	64	356,351	0.58
T O T A L				61.605,718	100

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100.1.1-6117, Tahun 2022

Luas wilayah provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau lebih lanjut menjelaskan secara rinci bahwa Kabupaten Morowali Utara dan Banggai memiliki wilayah terluas, sementara Kota Palu dan Banggai Laut memiliki wilayah tersempit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017, Provinsi Sulawesi Tengah memiliki 12 (Dua Belas) Kabupaten dan 1 (Satu) Kota, yang meliputi 175 (Seratus Tujuh Puluh Lima) Kecamatan, 175 (Seratus Tujuh Puluh Lima) Kelurahan dan 1.842 (Seribu Delapan Ratus Empat Puluh Dua) Desa. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa
di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH		
		KECAMATAN	KELURAHAN	DESA
7201	KAB. BANGGAI	23	46	291
7202	KAB. POSO	19	28	142
7203	KAB. DONGGALA	16	9	158
7204	KAB. TOLI TOLI	10	6	103
7205	KAB. BUOL	11	7	108
7206	KAB. MOROWALI	9	7	126
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	12	3	141
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	23	5	278
7209	KAB. TOJO UNA UNA	12	12	134
7210	KAB. SIGI	15	0	176
7211	KAB. BANGGAI LAUT	7	3	63
7212	KAB. MOROWALI UTARA	10	3	122
7271	KOTA PALU	8	46	0
	TOTAL	175	175	1.842

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 100.1.1-6117, Tahun 2022

Hal ini berbeda dengan data jumlah wilayah yang ada pada BPS, yaitu jumlah Kecamatan 176 (Seratus Tujuh Puluh Enam) dan 2.020 (Dua Ribu Dua Puluh) untuk jumlah Kelurahan/Desa. Adapun perbedaan data tersebut pada Kabupaten Sigi untuk jumlah Kecamatan serta Kabupaten Tolitoli dan

Kabupaten Morowali untuk jumlah Kelurahan/Desa. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.5
Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan
di Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2022

NO.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH	
		KECAMATAN	DESA/KELURAHAN
1	2	3	4
1.	PALU	8	46
2.	SIGI	16	177
3.	DONGGALA	16	167
4.	PARIGI MOUTONG	23	283
5.	POSO	19	170
6.	TOJO UNA-UNA	12	146
7.	BANGGAI	23	337
8.	BANGGAI KEPULAUAN	12	144
9.	BANGGAI LAUT	7	66
10.	MOROWALI	9	133
11.	MOROWALI UTARA	10	126
12.	BUOL	11	115
13.	TOLITOLI	10	110
	JUMLAH SULTENG	176	2.020

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Angka Tahun 2022

2.2 KONDISI DEMOGRAFIS DAERAH

Penduduk merupakan faktor penting dalam proses pembangunan karena bukan hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan, namun juga menjadi sasaran pembangunan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk,

pembangunan harus diarahkan pada pengendalian jumlah penduduk, peningkatan kualitas, serta pengerahan mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang bersinergi dengan tujuan pembangunan.

Berdasarkan jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah sejak periode 2018-2022 cenderung meningkat, yakni dari 2.955.567 (Dua juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu lima ratus enam puluh) jiwa pada Tahun 2018 menjadi 3.099.717 (Tiga juta Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas) jiwa pada Tahun 2022. Sementara tingkat laju pertumbuhan penduduk dari 1,35 persen pada Tahun 2018 berhasil ditekan hingga menjadi 1,57 persen pada Tahun 2022. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk cenderung meningkat sejak periode 2018 sampai dengan 2022 yakni dari 48 jiwa/km² pada Tahun 2018 menjadi 50 jiwa/km² pada Tahun 2022.

Tabel 2.6
Perkembangan Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018-2022

NO	INDIKATOR	2018	2019	2020	2021	2022
1	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	2.955.567	2.977.347	3.011.077	3.051.754	3.099.717
	LAKI-LAKI (JIWA)	1.519.332	1.530.803	1.546.449	1.566.691	1.590.279
	PEREMPUAN (JIWA)	1.436.235	1.446.544	1.464.628	1.485.063	1.509.438
2	LAJU PERTUMBUHAN (%)	1,35	0,73	1,13	1,35	1,57
3	TINGKAT KEPADATAN PENDUDUK	48	48	48	49	50

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

2.2.1 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk pertahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Berdasarkan perhitungan data penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2018 hingga 2019 laju pertumbuhan penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Tercatat pada Tahun 2020 rata-rata laju pertumbuhan penduduk meningkat sebesar 1,13 persen dan pada Tahun 2022 laju pertumbuhan penduduk meningkat menjadi 1,57 persen

2.2.2 Tingkat Penyebaran Penduduk

Tingkat kepadatan untuk daerah-daerah yang wilayahnya luas dan sumberdaya alamnya potensial untuk dikembangkan sangat membutuhkan tenaga kerja dalam pengelolaannya. Dalam hal ini yang diperlukan adalah pemerataan jumlah penduduk, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian dalam proses pembangunan adalah beberapa masalah kependudukan antara lain persebaran dan kepadatan penduduk dalam suatu daerah.

Tingkat kepadatan penduduk Sulawesi Tengah cenderung meningkat sejak periode Tahun 2018-2022 yakni dari 48 jiwa/km² pada Tahun 2018 menjadi 50 jiwa/km² pada Tahun 2022. Kota Palu merupakan daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, sementara terendah di Kabupaten Morowali Utara.

2.3 GAMBARAN EKONOMI DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2023 yang

memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro daerah dan keuangan daerah. Dalam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi telah mempertimbangkan berbagai aspek baik dari sisi penawaran (sektor ekonomi) dan sisi permintaan antara lain konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi dan ekspor-impor.

Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Provinsi Sulawesi Tengah baik yang dipengaruhi faktor internal maupun faktor eksternal yang memberi pengaruh signifikan, antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Dalam upaya pencapaian target kinerja daerah tahun 2023, maka kerangka Kebijakan anggaran sangat ditentukan oleh kerangka keuangan daerah untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah tersebut diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan isu strategis daerah dan mendorong pencapaian target kinerja pembangunan daerah.

Ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah di proyeksikan akan tetap tumbuh relatif stabil dengan asumsi dari sisi penawaran (sektor ekonomi) sebagai berikut :

1. Kinerja sektor jasa transportasi, wisata dan perhotelan akan menunjukkan trend positif pada pertengahan dan akhir tahun 2022. Hal ini disebabkan akan terkendalanya wabah Pandemi Covid-19 dan variannya yang diindikasikan oleh keberhasilan pemerintah provinsi dan daerah dalam sosialisasi pelaksanaan vaksin covid-19, pengadaan APD, test *PCR*, *Swab* dan *Rapid Test Antigen*, peningkatan pelayanan kesehatan serta bangkitnya kembali transportasi penumpang dan barang lewat udara, laut dan darat terutama di beberapa daerah padat penduduk seperti Jawa Timur, Sulawesi Selatan, DKI Jakarta, Sulawesi Utara dan Kalimantan Timur. Daerah-daerah tersebut, selama ini merupakan daerah yang menyokong Sulawesi Tengah pada peluang sektor jasa

transportasi darat, laut dan udara; sektor Pariwisata dan Tingkat Hunian Hotel sehingga diharapkan akan ikut menggerakkan roda ekonomi di Sulawesi Tengah. Ada harapan pada sektor Jasa Makanan dan Restoran yang tetap stabil pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang pelayanan jasanya menggunakan jaringan *on-line*. Di akhir tahun 2022 dalam masa-masa penghujung era “new normal”, Sulawesi Tengah akan bangkit dengan melakukan pemulihan cepat dan rekonstruksi untuk sektor perdagangan, hotel dan restoran sebagai persiapan menyambut wisatawan mancanegara dan domestik dengan destinasi berupa edukasi wisata bencana, wisata alam, wisata budaya dan destinasi wisata lainnya di wilayah Sulawesi Tengah.

2. Pada masa **“new normal” pandemi covid-19** diupayakan untuk sektor ekonomi seperti subsektor pangan, tanaman pangan, hortikultura dan peternakan terus digenjot produktivitasnya melalui program Pengembangan Kawasan Food Estate, Pengembangan Sentra Pertanian, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Inovasi Hilirisasi Pertanian yang dilakukan sebagai upaya penyanggah masa pandemik dan sekaligus mendukung Program Swasembada Pangan Indonesia dan Sulawesi Tengah sebagai salah satu Lumbung Pangan Nasional serta Sentra Peternakan, Perikanan dan Kelautan yang dilakukan sebagai dukungan Sulawesi Tengah merealisasikan komitmen pemerintah mengejar swasembada daging sapi dan peningkatan ekspor hasil laut pada tahun 2026 serta mewujudkan Indonesia yang mandiri dalam pemenuhan pangan asal hewan dan meningkatkan kesejahteraan peternak rakyat dan nelayan tradisional. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, akan diperhatikan pembangunan dan pemantapan infrastruktur jalan dan irigasi, pelabuhan perikanan yang merupakan kewenangan dari pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, perlu juga diperhatikan jadwal tanam, benih berkualitas, pupuk, pestisida, lahan penggembalaan, armada penangkapan ikan serta sarana dan prasarananya.

3. Subsektor perikanan dan kelautan pada masa pasca “new normal” diperkirakan akan mengalami pertumbuhan positif yang akan ditandai dengan perkembangan budidaya udang dan ikan air tawar menggunakan metode supra intensif, pemanfaatan digitalisasi penangkapan ikan atau Smart Fishing untuk meningkatkan produktivitas perikanan tangkap khususnya perikanan tuna yang bernilai ekspor. Selain itu, Sulawesi Tengah telah menerapkan Sistem Logistik Ikan Nasional (SLIN) sebagai upaya menjadikan Sulawesi Tengah daerah penyanggah pangan ikan. Sistem Logistik Ikan Nasional yang berbasis di Pelabuhan Perikanan Pantai (P3) Ogotua, Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Donggala dan PPI Pagimana diharapkan dapat menciptakan stabilitas harga di tingkat nelayan maupun konsumen dan sekaligus dapat menekan laju inflasi, membuka peluang pengembangan industri olahan, peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, memperkuat ketahanan pangan serta mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi. Potensi pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Sulawesi Tengah sangat besar mengingat Sulawesi Tengah sebagai satu-satunya provinsi yang memiliki empat Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu WPP-RI 713 di Selat Makassar, WPP-RI 714 di Teluk Tolo, WPP-RI 715 di teluk Tomini serta WPP 716 di Laut Sulawesi.
4. Sektor konstruksi akan terus tumbuh terpacu karena Sulawesi Tengah memiliki konsep Kerja Sama Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU), Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah lainnya, *Non-Governmental Organization* (NGO) Asing dan Pihak Perusahaan dalam dan luar negeri untuk proyek-proyek seperti jembatan Palu V, jalan arteri utama, jalan Tambu-Kasimbar yang menghubungkan IKN dengan Indonesia Timur dan rehabilitasi Prasarana Bandara Mutiara Sis Al-Jufri Palu, Pelabuhan Pantoloan, Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) dan Tanggul Laut disepanjang pesisir Teluk Palu yang terdampak tsunami. Disamping itu, kelanjutan pembangunan akan terus dilanjutkan seperti

pembangunan Bandara di Banggai Laut, Bandara Maleo di Morowali, Bandara Kasiguncu di Poso, Bandara Syukuran Aminuddin Amir Luwuk, Bandara Sultan Bantilan Tolitoli dan beroperasinya kembali Bandara Tanjung Api di Ampana Kabupaten Tojo Una-Una yang sempat tutup pada awal wabah Covid-19 sehingga akan menghidupkan kembali jalur wisata lewat udara ke destinasi Kepulauan Togean selain travel jalur darat dari Kota Palu dan Kota Luwuk menuju Kabupaten Tojouna-una. Pada akhir tahun 2022, pembangunan Bandara di Kabupaten Banggai Laut diharapkan pada tahapan *on-progress* dan dapat segera memicu pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Sulawesi Tengah.

5. Sektor pertambangan paling besar ditopang oleh hasil nikel dan gas. Hasil komoditas pertambangan tersebut mampu diolah dengan baik oleh beberapa korporasi hilirisasi nikel dan gas produk olahan hasil gas antara lain *Liquefied Natural Gas (LNG)* dan gas amonia. Hasil yang telah berhasil diproduksi di Sulawesi Tengah antara lain *nickel Pig Iron, stainless steel, Hot Rolled Coiled (HRC), Cold rolled Coiled (CRC)*. Ke depan hilirisasi nikel akan berlanjut pada industri baterai lithium. Pada 7 Februari 2022, PT Huayue Nickel Cobalt telah melakukan ekspor perdana *mixed hydroxide* yang merupakan bahan baku baterai pada mobil listrik sebanyak 9.200 ton ke Tiongkok.
6. Sektor pertanian sebagai sektor dengan pangsa tertinggi ketiga terutama ditopang oleh sektor perkebunan yakni Kakao dan kelapa sawit. Peningkatan pada sektor didukung oleh kondisi curah hujan yang relatif tinggi sepanjang Tahun 2021 yang akan mendorong peningkatan produksi tandan kelapa sawit di Tahun 2022. Di samping itu tren kenaikan harga *Clude Palm Oil (CPO)* sejak pertengahan 2021 juga mendorong petani untuk mengoptimalkan perawatan kebun guna memaksimalkan produksi. Produksi Kakao juga diperkirakan meningkat meskipun relatif terbatas dikarenakan peremajaan yang dilakukan belum dapat menghasilkan produksi yang maksimal.

7. Ekspor Sulawesi Tengah pada Januari-Februari 2022 tercatat senilai 2,38 miliar atau meningkat sebesar 71,601% (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sebagian besar ekspor di Sulawesi Tengah merupakan produk besi baja dimana pada periode tersebut ekspor besi baja mencakup 79,8% dari total ekspor atau senilai USD1,90 miliar. Angka pertumbuhan ekspor ini masih didorong oleh ekspor komoditas produk hilirisasi nikel seperti *nickel pig iron* dan *stainless steel slab*. Pertumbuhan ekspor besi baja pada periode tersebut tumbuh tinggi sebesar 57,69% (yoy).
8. Impor Sulawesi Tengah pada Januari-Februari 2022 tercatat senilai USD1,36 miliar atau meningkat 142,75% (yoy) dibanding dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Impor tersebut didominasi oleh import golongan besi baja yang mencakup 33,16% total impor, diikuti oleh mesin dan pesawat mekanik 923,9%0 dan mesin peralatan listrik (11,9%). Peningkatan impor yang tinggi ini sejalan dengan masih berlangsungnya proyek smelter nikel di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara sehingga membutuhkan tambahan impor barang modal serta meningkatnya produksi nikel yang membutuhkan impor bahan baku produksi tambahan seperti Chrome ore mangan dan cobalt.

Sedangkan asumsi dari sisi permintaan sebagai berikut:

1. Konsumsi rumah tangga diperkirakan masih akan tumbuh pada triwulan-1 2022 tapi melambat jika dibandingkan pertumbuhan triwulan sebelumnya. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga terindikasi dari meningkatnya kredit konsumsi, tingginya tingkat optimisme konsumen, tingginya tingkat mobilitas masyarakat Sulawesi Tengah sejalan dengan meningkatnya tingkat vaksinasi dan berbagai kebijakan yang mendorong tingkat konsumsi rumah tangga. Kredit konsumsi di Sulawesi Tengah pada bulan Februari 2022 tercatat meningkat sebesar 5,09% (yoy), tumbuh positif tapi lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 5,71% (yoy). Tumbuhnya kredit konsumsi sejalan

dengan tingginya tingkat optimisme konsumen. Berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada triwulan-I 2022 tercatat sebesar 129,28 atau masih berada di level optimis (di atas 100). Peningkatan aktivitas rata-rata masyarakat Sulawesi Tengah pada triwulan-1 2022 sampai dengan 30 Maret juga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan baseline dan mobilitas pada triwulan-IV 2021. Mobilitas triwulan-1 2022 pada kategori pusat perbelanjaan tercatat sebesar 63,61% terhadap baseline meningkat dari triwulan sebelumnya yang mencatat 54,70%. Area taman dan workplace juga menunjukkan peningkatan aktivitas yang tercermin dari perubahan tingkat mobilitas dari 8,54% menjadi 59,45% dan -2,25% menjadi 16,08%. Peningkatan mobilitas tersebut sejalan dengan meningkatnya tingkat vaksinasi per tanggal 4 April, vaksinasi dosis I telah mencapai 85,81% dan dosis II mencapai 54,76% dari target vaksinasi ini meningkat cukup baik dari awal Desember 2021 yang tercatat kurang dari 50%.

2. Kebijakan anggaran LTV dan perpanjangan diskon PPnBM 0% di Tahun 2022 untuk kendaraan dengan harga dibawah Rp200 diperkirakan akan berperan dalam mendorong konsumsi rumah tangga lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan peningkatan penjualan kendaraan bermotor pada awal Tahun 2022 sebesar 68,907% (yoy) berdasarkan hasil Survei Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia.
3. Konsumsi Pemerintah juga diperkirakan masih akan tumbuh tetapi melambat dibanding pertumbuhan sebelumnya. Belanja pemerintah pada awal tahun diperkirakan belum optimal seiring dengan terbatasnya belanja pegawai dan barang yang direalisasikan serta belanja modal yang diperkirakan masih dalam tahap penyusunan tender. Berdasarkan data Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Tengah, realisasi Belanja Negara di Sulawesi Tengah sampai dengan akhir Februari 2022 mencapai Rp.2,65 triliun atau 12,12% dari Pagu anggaran.

4. Investasi diperkirakan meningkat terutama dalam sektor pertambangan, minyak dan gas bumi serta Industri Pengolahannya yang ditunjukkan dengan berlangsungnya operasi smelter feronikel di Morowali dan Morowali Utara yang telah beroperasi semenjak tahun 2017, beroperasinya PT Dongi-Sinoro LNG yang selain memproduksi gas alam cair (*Liquefied Natural Gas/LNG*) juga memproduksi amonia cair yaitu senyawa kimia yang digunakan dalam pembuatan pupuk, bahan peledak, asam dan produk petrokimia lainnya di Kabupaten Banggai serta industri pengolahan berbasis agro di Palu seperti pengolahan buah kakao, getah damar, arang tempurung kelapa serta membangkitkan kembali Pusat Inovasi Rotan Nasional (Pirnas) dalam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang pada tahun 2019 dilakukan pembenahan kembali paska bencana. Meningkatnya investasi juga dipengaruhi oleh masuknya listrik yang berasal dari PLTA Sulewana. Momentum peningkatan investasi tersebut harus terus dijaga dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui peningkatan efisiensi perizinan dan pelayanan investasi dengan sistem *on-line* serta penyelesaian *bottleneck* infrastruktur. Investasi pada triwulan 1 tahun 2022 diperkirakan masih akan tumbuh tinggi didorong oleh masih berlanjutnya investasi pembangunan smelter pengolahan nikel di Kabupaten Morowali dan Morowali Utara serta proyek pembangunan bernilai besar di Sulawesi Tengah. Berdasarkan informasi dari Shanghai Metals Market (SMM) pada triwulan-1 2022 akan dibangun 9 line RKEF tambahan di Sulawesi Tengah. Selain itu pembangunan 1 smelter HPAL dari PT QMB New Energi juga masih berlanjut dengan total investasi sebesar Rp.13 Triliun. Di sisi lain beberapa proyek pembangunan di Sulawesi Tengah juga sedang berlangsung seperti rekonstruksi bandara Palu dengan nilai proyek Rp.142 miliar, pembangunan Jembatan Palu IV dengan nilai proyek Rp.320 miliar, pembangunan Bandara Banggai Laut dengan nilai proyek Rp.600 miliar, pembangunan gedung AMC Rumah Sakit Anutapura dengan nilai Proyek

Rp.235 miliar, rehabilitasi dan rekonstruksi saluran Irigasi Gumbasa dengan nilai proyek Rp.653 miliar serta beberapa proyek properti swasta seperti perhotelan berbagai proyek pembangunan digambarkan pada realisasi pengadaan semen dan impor barang modal di Sulawesi Tengah. Realisasi semen di Sulawesi Tengah pada Bulan Januari-Februari 2012 sebanyak 426, 24000 ton atau tumbuh sebesar 24,7% (yoy). Angka tersebut mendekati realisasi pengadaan semen pada triwulan-IV 2021 yang mencapai 477,7 Ton dan tumbuh sebesar 48% sementara itu impor barang modal di Sulawesi Tengah pada periode Januari-Februari 2022 tercatat sejumlah USD484,03 atau meningkat 129,33 persen (yoy) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

2.3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Tengah ditujukan untuk mengimplementasikan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran visi misi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, arah kebijakan ekonomi daerah juga ditujukan untuk mewujudkan hasil dan manfaat dari program prioritas dan lintas bidang atau wilayah yang berasal dari sintesa isu permasalahan sebagai dasar perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana.

2.3.1.1 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 dan Perkiraan Tahun 2023

Tantangan dan prospek perekonomian daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 dan tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan terus menunjukkan tren positif asalkan wabah **Pandemi Covid-19 serta variannya (Omicron)** tidak meluas dan berakibat fatal seperti yang telah terjadi 2 (dua) tahun terakhir. Kebijakan pemerintah yang tepat sasaran dan efektif

akan sangat menentukan bagaimana pergerakan pertumbuhan ekonomi bergerak naik. Kebijakan-kebijakan itu terutama yang berkenaan dengan **jumlah vaksinasi yang mengalami peningkatan, penuntasan dan kepastian anggaran penanganan covid dan membangun tingkat kepercayaan masyarakat.** Tetapi kondisi ini, untuk Sulawesi Tengah diperkirakan akan membaik yang ditunjukkan oleh kinerja sektor pertambangan dan penggalian, pertanian, perikanan dan kelautan yang membaik sehingga volume ekspor Sulawesi Tengah juga akan terus meningkat. Selain itu investasi baik dalam sektor pertambangan, industri pengolahan maupun pertanian, perikanan dan kelautan juga akan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah akan ditopang oleh ekspor, investasi dan konsumsi rumah tangga.

2. Perkembangan jalan mantap nasional di Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah mencapai 96%, terutama akses jalan “kebun kopi” yang dilalui oleh transportasi darat seluruh Provinsi di Pulau Sulawesi yang semakin membaik akan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas baik antar wilayah di Sulawesi Tengah maupun akses masuk ke wilayah Sulawesi Tengah dari luar wilayah yang selanjutnya akan memicu peningkatan kunjungan wisatawan sehingga berpengaruh positif terhadap meningkatnya tingkat hunian hotel, industri kerajinan tangan dan jasa transportasi.
3. Produksi hasil-hasil pertanian akan terus mengalami peningkatan dengan dilaksanakannya upaya perbaikan varietas benih melalui sarana perbenihan mandiri yang tidak tergantung dari benih luar, pengadaan alat mesin pertanian (alsintan) serta distribusi pupuk bersubsidi yang diawasi dengan ketat hingga sampai pada tingkat petani. Selain itu, peningkatan sub sektor perkebunan melalui upaya pengusulan produksi, produktivitas dan mutu kakao di tahun 2023

melalui pengembangan kawasan kakao (extensifikasi) maupun upaya intensifikasi dengan *re-planting* dan peremajaan. Selain itu, untuk sub sektor peternakan dilaksanakannya SIKOMANDAN (Sapi dan Kerbau Komoditas Andalan Negeri) serta Program Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan sebagai upaya peningkatan hasil daging ternak dan swasembada pangan asal hewan.

4. Prospek perekonomian Provinsi Sulawesi Tengah di perkirakan akan membaik seiring dengan stabilnya perekonomian nasional dan dunia karena keberhasilan penanggulangan wabah *covid-19*. Pertumbuhan ekonomi akan bangkit dan diharapkan dapat segera dipulihkan dengan berbagai upaya dan kebijakan sehingga memberikan efek positif pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pendapatan individu yang ditandai dengan rendahnya nilai indeks gini. Menurunnya indeks gini diharapkan dapat mengurangi timbulnya konflik sosial dalam masyarakat dan memacu peningkatan pendapatan masyarakat yang selanjutnya menciptakan kemandirian ekonomi daerah. Selain itu, dampak corona virus diharapkan tidak terlalu mempengaruhi pertumbuhan PDRB per kapita dengan adanya pemerataan pertumbuhan ekonomi di semua sektor. Pemerataan pertumbuhan di semua sektor menunjukkan adanya perkembangan mata rantai perekonomian di masyarakat. Sehingga bila kondisi ini terwujud maka output perkapita masyarakat dapat benar-benar meningkat secara riil yang turut mempengaruhi naiknya daya beli masyarakat.
5. Kesepakatan kerjasama regional dan pasar bebas, seperti penerapan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), lanjutan kesepakatan AFTA 2015 dan perdagangan bebas dunia (WTO) 2020 yang akan menimbulkan konsekuensi terjadinya arus perdagangan untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil serta aliran modal yang lebih bebas.

Kondisi ini memberikan peluang masuknya investasi asing yang dapat menjadi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi melalui perkembangan teknologi, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*) dan akses yang lebih mudah kepada pasar dunia. Tantangan yang kemudian muncul adalah kondisi tersebut akan beresiko menimbulkan eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam di Sulawesi Tengah yang melimpah sehingga kemudian juga mengancam kelestarian ekosistem. Kondisi tersebut akan diperburuk apabila regulasi investasi yang ada belum mampu menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sebagai akibat aktivitas investasi tersebut. Dari sisi ketenagakerjaan, implementasi kerjasama regional dan dunia akan menambah jumlah lapangan kerja di dalam negeri sehingga kesempatan kerja yang ada terbuka lebar dengan berbagai kebutuhan keahlian yang beragam. Selain itu pencari kerja dapat dengan mudah mencari pekerjaan di luar negeri, sebaliknya pencari kerja dari luar negeri dapat dengan mudah masuk ke Indonesia. Kondisi tersebut menuntut pencari kerja di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan produktivitasnya. Hal ini dikarenakan daya saing tenaga kerja yang kita miliki dari sisi pendidikan dan produktivitasnya masih kalah dibandingkan tenaga kerja yang berasal dari Malaysia, Singapura, dan Thailand. Pengoptimalan sekolah-sekolah kejuruan serta Balai Latihan Kerja (BLK) masih harus dilakukan. Selain itu penguasaan bahasa asing oleh para pencari kerja menjadi syarat yang juga harus dipenuhi.

6. Kondisi wilayah geografis Sulawesi Tengah yang luas dan tidak meratanya penyebaran penduduk terutama pada daerah-daerah wilayah perdesaan, daerah perdalaman dan terpencil sekaligus sebagian dari penyebab terjadinya kesenjangan pembangunan dan belum memadainya aksesibilitas dan jangkauan pelayanan terhadap

sarana dan prasarana infrastruktur antar daerah seperti transportasi, irigasi, perumahan dan permukiman, telekomunikasi serta kelistrikan. Tantangan-tantangan tersebut diupayakan dapat diselesaikan melalui kerjasama antar wilayah dan kawasan seperti: kerjasama BIMP-EAGA (Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines *East ASEAN Growth Area*) untuk membantu pembangunan sosial-ekonomi dari daerah-daerah yang belum berkembang dan termarginalisasikan serta terpencil.

7. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu yang telah dipersiapkan semenjak terbitnya PP Nomor 31 Tahun 2014 telah dinyatakan memenuhi kriteria kesiapan beroperasi dan siap untuk menerima dan melayani investor serta menopang kebutuhan IKN Nusantara. KEK Palu telah diresmikan oleh Menko Bidang Perekonomian pada tanggal 27 September 2017 dan diperkirakan dapat menarik investasi senilai Rp. 92,4 Trilyun dengan memperkerjakan 97.500 tenaga kerja serta total investasi pembangunan sebesar Rp. 1,7 Trilyun. Oleh karena itu, pada tahun 2023 akan dipacu pembangunan beberapa infastruktur pendukung seperti pengembangan *fly-over* Palu-Pantoloan, jalan Palu *Outer Ring Road*, perluasan Jembatan Tawaeli dan Pembangunan DAM sumber air baku Sungai Wombo. Selama tahapan pembangunan akan merangsang tumbuhnya sektor industri dari investasi asing. KEK Palu diharapkan akan mendorong hilirisasi industri logam dan meningkatkan nilai tambah dari komoditi agro unggulan di Pulau Sulawesi seperti kakao, rumput lau dan rotan. Implikasinya adalah meningkatnya pertumbuhan industri dan jasa pendukung seperti *packaging* (pengemasan), *printing* (percetakan) dan *forwarding* (ekspedisi), serta jasa boga, transportasi, pemondokan, hiburan, perumahan, dan jasa-jasa perkotaan lainnya. Berkembangnya industri dan jasa pendukung tersebut akan menciptakan lapangan

kerja signifikan bagi masyarakat di sekitar KEK. Dengan demikian, penyerapan tenaga kerja akan menekan jumlah pengangguran dan kemiskinan.

8. Pembangunan smelter di Kawasan Industri Morowali Utara dan Morowali dengan kapasitas 300.000 ton dan PLTU kapasitas 300 Mega Watt dan pembangunan industri *stainless steel* dengan kapasitas 2 juta ton diperkirakan akan terus meningkatkan jumlah ekspor sektor pertambangan dan penggalan, industri pengolahan, jasa konstruksi dan transportasi di tahun 2023.
9. Konsumsi rumah tangga Sulawesi Tengah pada keseluruhan Tahun 2022 diperkirakan tetap tumbuh membaik didorong oleh adanya pelonggaran syarat penerbangan seiring dengan terus berkurangnya jumlah kasus aktif covid-19 dan meningkatnya tingkat vaksinasi. Pelonggaran syarat perjalanan termasuk keputusan pemerintah untuk memberikan cuti bersama tanggal 29 April 2022 dan tanggal 4 - 6 Mei 2022 serta memperbolehkan pelaksanaan mudik serta HBKN juga akan berperan dalam mendorong tingkat konsumsi masyarakat. Berdasarkan Indeks Mobilitas Masyarakat, mobilitas masyarakat terus mengalami peningkatan terutama di area retail/rekreasi, *grocery*/farmasi yang berada di atas *baseline*.

Konsumen Sulawesi Tengah juga masih optimis dengan kondisi perekonomian pada enam bulan mendatang berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia indeks ekspektasi konsumen pada bulan Maret 2022 tercatat senilai 143 atau masih berada di level optimis (di atas 100). Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga di Sulawesi Tengah melihat kondisi ekonomi ke depan akan lebih baik dibanding kondisi sekarang. Optimisme akan membaik tingkat konsumsi di masa mendatang juga tergambar dari sisi perdagangan eceran berdasarkan Survey Penjualan Eceran (SPE) Bank Indonesia pada bulan Maret 2022 sebagian besar penjual eceran yang menjadi

responden berekspektasi bahwa total penjualan akan meningkat di masa mendatang, baik pada 3 bulan yang akan datang (74,6% responden) maupun pada 6 bulan yang akan datang (53,5% responden).

10. Stimulus pengeluaran pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi terus dilakukan, yakni berbagai jenis bantuan sosial terus digulirkan antara lain PKH, kartu sembako, Prakerja, subsidi bunga KUR dan non KUR, Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) dan bantuan lainnya, masih akan terus disalurkan kepada masyarakat dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang bertujuan untuk menjaga tingkat konsumsi masyarakat. Oleh karena itu konsumsi pemerintah daerah pada Tahun 2022 juga diperkirakan akan mengalami normalisasi seiring dengan semakin terarahnya belanja pemerintah baik untuk operasional maupun bantuan sosial.
11. Investasi pada keseluruhan Tahun 2022 diperkirakan kembali tumbuh tinggi seiring dengan masih berlanjutnya investasi kawasan industri di Morowali dan Morowali Utara antara lain pembangunan smelter pirometalurgi pembangunan pabrik HPAL di kawasan IMIP serta peningkatan eksplorasi tambang emas di Palu. Berdasarkan data SMM, akan terdapat penambahan kapasitas terpasang dari lini produksi yaitu sebanyak 33 Line RKEF pada akhir Tahun 2022. Dengan tambahan kapasitas tersebut diperkirakan akan terdapat 81 line RKEF pada akhir tahun 2022, meningkat pesat dari 48 line RKEF pada akhir Tahun 2021. Selain penambahan line RKEF pembangunan smelter HPAL di kawasan IMIP juga masih berlanjut. Pembangunan ini akan meningkatkan investasi di Sulawesi Tengah lebih lanjut. PT. Dexin Steel juga telah menarik kredit investasi sebesar USD120 juta pada bulan Desember 2021 untuk pembangunan pabrik dan Jetty. diperkirakan investasi tersebut akan direalisasikan pada awal Tahun 2022. Lanjutan rencana investasi yang cukup besar yaitu

pembangunan pabrik komponen baterai lithium berbasis HPAL yang telah dimulai pada tahun 2020 dan diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2023. Hasil FGD dengan DPMPTSP dan salah satu korporasi menyatakan bahwa investasi salah satu perusahaan HPAL yaitu PT Huayue Nickel Cobalt dengan kapasitas 60 ribu ton nikel per tahun setelah selesai pada 2021. Sementara pada perusahaan lainnya yaitu PT. QMB New Energy Material akan menyelesaikan pabriknya pada Tahun 2022 dan *commissioning* pada tahun 2023. Total investasi perusahaan tersebut mencapai hingga Rp.32 Triliun.

10. Ekspor Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 diperkirakan masih tetap tumbuh tinggi, tapi tidak setinggi tahun sebelumnya, sejalan dengan prospek ekonomi global Tahun 2022 yang dikoreksi ke bawah. Merujuk pada laporan Outlook perekonomian IMF terbaru pada Januari 2022, IMF memprediksi bahwa ekonomi global akan tumbuh sebesar 4,4% (yoy) pada Tahun 2022 menurun dari proyeksi sebelumnya 4,9% (yoy). Hal tersebut antara lain disebabkan adanya penyebaran varian covid-19 baru yang memiliki tingkat penyebaran jauh lebih cepat sehingga beberapa negara kembali menerapkan kebijakan pembatasan aktifitas.
11. Dari sisi negara mitra dagang utama, yaitu Tiongkok pertumbuhan ekonomi juga diproyeksikan melambat menjadi 4,8% (yoy) pada Tahun 2022, turun dari prediksi sebelumnya yang mencapai 5,1% (yoy). Tekanan pada ekonomi Tiongkok berasal dari sektor real estate yang masih berkaitan dengan kasus gagal bayar Evergrade, dampak krisis energi pada pertengahan hingga akhir tahun 2021 serta pemulihan konsumsi rumah tangga yang lebih rendah dibandingkan perkiraan para analis. Penurunan perkiraan pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang lebih rendah tersebut sejalan dengan PMI Tiongkok pada bulan Maret 2022 yang mulai memasuki zona kontraksi senilai 49,5 atau berada dibawah 50. Hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap

permintaan ekspor Sulawesi Tengah khususnya ferronikel yang akan menjadi input bagi manufaktur di Tiongkok. Di sisi lain harga komoditas baik *Stainless steel* maupun LNG terus meningkat seiring dengan masih berlangsungnya konflik geopolitik antara Rusia-Ukraina. Konsep geopolitik antara Rusia-Ukraina turut menambah ketidakpastian dalam perkembangan ekonomi global. Ketegangan antara kedua negara tersebut telah mendorong harga minyak mentah, nikel, CPO, gandum dan beberapa komoditas lainnya ke tingkat yang semakin tinggi, seiring terbatasnya pasokan. Konflik yang telah berlangsung selama 2 bulan tersebut belum menunjukkan tanda-tanda penyelesaian meskipun upaya perdamaian terus dilakukan.

12. Di sisi lain, negara-negara maju diperkirakan juga akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibanding proyeksi sebelumnya yang dipicu oleh kekhawatiran tingginya penyebaran varian baru covid-19. Sementara itu negara mitra dagang seperti Jepang, Uni Eropa dan ASEAN diproyeksi akan tumbuh 3,3% (yoy), 3,9% (yoy), dan 5,6% (yoy), pada tahun 2022. Perkiraan pertumbuhan Uni Eropa dan ASEAN lebih rendah dari proyeksi sebelumnya sementara Jepang diperkirakan mengalami peningkatan sedikit dari proyeksi sebelumnya

13. **Import** Sulawesi Tengah pada keseluruhan tahun 2002 diperkirakan masih akan tetap tinggi, tapi melambat dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan impor khususnya bahan baku dan bahan penolong industri diperkirakan masih akan tinggi seiring dengan masa berlangsungnya pembangunan smelter, upaya peningkatan produksi turunan nikel dan pembangunan PLTU Palu III. Jenis barang yang akan mendominasi impor Sulawesi Tengah adalah barang modal mesin pesawat mekanik dan peralatan listrik selain impor barang modal industri berbasis nikel yang saat ini sedang berkembang pesat di wilayah Sulawesi Tengah juga membutuhkan barang impor

produksi antara lain *Chrome ore, ferronickel, high chlorine coal* dan *sulphur* yang akan meningkat seiring dengan peningkatan hilirisasi nikel.

14. **Industri pengolahan** diperkirakan akan tetap tumbuh tinggi pada Tahun 2022 meskipun sedikit melambat dibanding tahun 2021. Hal tersebut disebabkan oleh relatif terbatasnya peningkatan kapasitas produksi *stainless steel* dan baja karbon di tengah tren menurunnya produksi baja Tiongkok sebagai dampak kebijakan penurunan emisi gas karbon dan Lockdown di Shanghai seiring dengan terus meningkatnya kasus aktif covid-19 di Tiongkok. Di sisi lain sedang melakukan konversi 8-9 lini produksi NPI menjadi *nickel matte* yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah industri pengolahan. Selain dari industri pengolahan nikel dan besi baja terdapat tambahan produksi pengolahan biji emas PT Citra Mulia Mineral dengan kapasitas 4000 ton biji emas perhari yang diperkirakan dapat berproduksi penuh pada Q3 2022.

15. **Pertanian** serupa dengan industri pengolahan kinerja sektor pertanian pada Tahun 2022 diperkirakan tumbuh melambat dibanding tahun sebelumnya pertumbuhan diperkirakan didorong oleh produksi pertanian seperti kelapa sawit karena tingginya curah hujan dalam 1,5 tahun terakhir dan tingginya harga CPO jagung dan kelapa di tingkat Global yang akan memberikan insentif bagi petani untuk mengoptimalkan produksi. Kementan menargetkan produksi padi di Sulawesi Tengah pada Tahun 2022 sebesar 869, 5000 ton, meningkat dibanding produksi tahun 2021 yaitu 864, 6000 ton. Selain itu dari subsektor perikanan terdapat produksi perdana udang vaname sekitar 204 ton dari 3,6 hektar luasan panen pada tahun 2021 dan diperkirakan produksi pada Tahun 2022 akan semakin meningkat seiring penambahan areal budidaya dan adanya tambahan investasi. Efek La Nina di perairan Sulawesi Tengah yang diperkirakan berakhir

pada pertengahan 2022 berpotensi mendorong subsektor perikanan tangkap lebih lanjut.

16. **Pertambangan** juga diperkirakan akan tetap tumbuh relatif tinggi pada Tahun 2022. Masih terus meningkatnya produksi industri pengolahan khususnya nikel akan ikut mendorong kinerja sektor pertambangan selaku salah satu pemasok bahan baku sektor tersebut. Selain itu terdapat potensi produksi pertambangan *nickel limonit* untuk smelter HPAL. Konflik geopolitik Rusia-Ukraina mendorong meningkatnya harga nikel ke level tertinggi pada beberapa tahun terakhir. Fitch memperkirakan harga nikel akan menurun, tapi masih akan lebih tinggi dibandingkan sebelum terjadinya konflik geopolitik. Curah hujan yang secara umum diperkirakan lebih rendah dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu akan mendorong produksi pertambangan meningkat termasuk tambang galian C yang juga mengalami peningkatan permintaan sering setelah ditetapkannya titik nol IKN dan ground-breaking oleh Presiden awal 2022.
17. **Konstruksi** juga diperkirakan akan tumbuh melambat dibanding tahun 2021 konstruksi pada Tahun 2022 akan didorong oleh berlanjutnya kegiatan pembangunan pabrik dan smelter di sejumlah Kawasan Industri seperti PT Indonesia Morowali industrial Park, PT Stardust Estate investment, PT 69 kawasan industri, dan PT Transon Bumindo Resources. Beberapa properti dan bangunan perkantoran baik komersial esensial yang dibiayai oleh swasta dan pemerintah mengalami perlambatan pengerjaan sehingga molor ke awal tahun 2002 dapat menjadi pendorong sektor konstruksi di awal Tahun 2022. Terdapat beberapa proyek pembangunan di Sulawesi Tengah juga sedang berlangsung seperti rekonstruksi Bandara Palu dengan nilai proyek Rp.142 miliar, pembangunan Jembatan Palu 4 dengan nilai proyek Rp. 320 miliar, pembangunan Bandara Banggai Laut dengan nilai proyek Rp.600 miliar Pembangunan Gedung Rumah Sakit

Anutapura dengan nilai proyek Rp.235 miliar dan rehabilitasi dan rekonstruksi saluran irigasi Gumbasa dengan nilai proyek Rp. 653 miliar.

18. Sektor perdagangan juga diperkirakan tumbuh membaik didorong oleh kondisi perekonomian yang lebih baik sehingga penanganan Pandemi yang semakin baik, peningkatan jumlah vaksinasi serta pelonggaran syarat perjalanan. pemulihan mobilitas masyarakat yang tercermin pada Google mobility indeks yang menunjukkan bahwa mobilitas di taman, retail dan grosir akan meningkat.
19. Rencana implementasi beberapa insentif seperti pembebasan pajak PPnBM kendaraan bermotor direncanakan sampai dengan Juni 2020, LTV 0%, dan lain-lain akan mendorong kinerja perdagangan khususnya otomotif. Tingginya harga komoditas hasil pertanian seperti jagung, kelapa sawit, kelapa dalam, Kakao, durian juga diperkirakan mendorong sektor perdagangan semakin membaik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka arah Kebijakan pembangunan ekonomi daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 diharapkan mampu mendorong pencapaian target dan sasaran pembangunan daerah, yakni : (1) pertumbuhan ekonomi sebesar 10,36 %, (2) Tingkat kemiskinan menjadi 10,84 %; (3) Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 2,84 %; (4) Rasio Gini menjadi 0,22 %; serta (5) IPM meningkat menjadi 71,27 %.

2.3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintah yang diserahkan ke daerah sesuai kewenangan rencana pembangunan daerah berupa RPJPD, RPJMD dan RKPD memuat informasi mengenai tatalaksana pembangunan daerah yang berhubungan dengan kapasitas keuangan daerah serta rencana alokasi penggunaannya dalam bentuk belanja daerah merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintah yang nantinya akan menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan hal tersebut maka keuangan daerah sebaiknya dikelola secara transparan demi mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan akuntabel serta tanggap terhadap perubahan kebutuhan publik.

RKPD tahun 2023 adalah RKPD tahun ke 2 (Dua) dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Gubernur terpilih, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah diuraikan kedalam perencanaan tahunan (RKPD) dengan mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah yang dapat dikelola untuk pendanaan kebutuhan belanja pembangunan daerah sebagai implementasi dari pelaksanaan RKPD.

2.3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Kapasitas fiskal daerah merupakan gambaran riil kemampuan keuangan daerah dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, berdasarkan hal tersebut perumusan kebijakan pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah baik secara intensifikasi maupun ekstensifikasi mutlak dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi eksisting terutama dalam masa pandemi *Covid-19*, Sehubungan dengan hal tersebut maka kerangka pendanaan pembangunan daerah harus mempertimbangkan kebutuhan program prioritas yang sesuai dengan perkembangan dalam masa pandemi demi mewujudkan ketahanan ekonomi masyarakat sekaligus dapat mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan di daerah, menurunkan tingkat pengangguran, memperbaiki angka gini rasio dan upaya meningkatkan sumberdaya manusia.

2.3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

Dampak dari adanya Pandemi Covid-19 sangat berpengaruh pada perekonomian dan kondisi sosial masyarakat yang berpotensi menurunkan kegiatan perekonomian dan berimbas pada penurunan tingkat perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Tengah, hal ini terlihat pada trend PAD Provinsi Sulawesi Tengah yang dalam kurun waktu 2021-2022 terus mengalami penurunan, akan tetapi berdasarkan perkembangan terbaru kondisi perekonomian nasional tentang penurunan level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) diseluruh wilayah Indonesia, maka secara otomatis diasumsikan bahwa akan terjadi perubahan dalam struktur perekonomian, berangkat dari hal tersebut dan didukung oleh hasil kajian menyeluruh tentang sumber-sumber penerimaan strategis daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah secara optimis meningkatkan target PAD Tahun 2023.

Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp. 3.280.858.440.536,00.- (Tiga triliun dua ratus delapan puluh milyar delapan ratus lima puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu lima ratus tiga puluh enam rupiah) meningkat sebesar Rp. 215.151.288.898,00.- (Dua ratus lima belas milyar seratus lima puluh satu juta dua ratus delapan puluh delapan delapan ratus sembilan puluh delapan rupiah) dari target tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 3.065.707.151.638,00.- (Tiga triliun enam puluh lima milyar tujuh ratus tujuh juta seratus lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah). Kontribusi pendapatan daerah Provinsi Sulawesi Tengah perkomponen disajikan dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2.7
Realisasi Target/ Proyeksi Pendapatan Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021-2023

NO	URAIAN	REALISASI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2021	TARGET TAHUN ANGGARAN 2022	PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2023
1	PENDAPATAN DAERAH	4.690.755.791.004,80	3.065.707.151.638,00	3.280.858.440.536,00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.494.014.931.911,51	1.335.913.572.154,00	1.542.585.047.036,00
1.1.1	PENDAPATAN PAJAK DAERAH	1.074.421.924.800,60	985.000.000.000,00	1.105.411.000.000,00
1.1.2	HASIL RETRIBUSI DAERAH	19.110.160.345,00	17.680.390.056,00	18.736.950.000,00
1.1.3	HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN	32.558.872.743,29	71.775.347.318,00	144.100.000.000,00
1.1.4	LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH	367.923.974.022,62	261.457.834.780,00	274.337.097.036,00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.144.403.189.573,00	2.994.868.146.000,00	1.732.843.981.000,00
1.2.1	DANA PERIMBANGAN	3.144.403.189.573,00	1.721.515.279.000,00	1.732.843.981.000,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	395.232.382.612,00	226.574.040.000,00	237.902.742.000,00
1.2.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.493.138.739.000,00	1.494.941.239.000,00	1.494.941.239.000,00
1.2.1.3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	1.210.997.069.961,00	1.273.352.867.000,00	-
1.2.1.4	Dana Insentif Daerah (DID)	45.034.998.000,00	-	-
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	52.337.669.520,29	8.278.300.484,00	5.429.412.500,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	16.767.305.768,00	8.278.300.484,00	5.429.412.500,00
1.3.2	Pendapatan Lainnya			

Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah (Badan Pendapatan Daerah, Tahun 2022)

Berdasarkan tabel diatas, memberikan gambaran bahwa Target PAD Tahun 2022 sebesar Rp. 1.335.913.572.154,00,- (Satu triliun tiga ratus tiga puluh lima milyar Sembilan ratus tiga belas juta lima ratus tujuh puluh dua ribu serratus lima puluh empat rupiah) diproyeksikan naik sebesar Rp.206,671,474,882.00,- menjadi sebesar Rp.1.542.585.047.036,00,- pada tahun 2023, dari semua komponen pembentuk PAD hanya Pendapatan Transfer yang diproyeksikan mengalami penurunan yaitu dari sebesar Rp.2.994.868.146.000,00,- pada target Tahun 2022 menjadi sebesar Rp.1.732.843.981.000,00,- pada Tahun 2023.

2. Kebijakan Belanja Daerah

Rencana penggunaan kapasitas keuangan daerah merupakan suatu rangkaian proses perencanaan pengelolaan keuangan yang dimulai dari penganggaran yang ditandai dengan penyusunan RKPD, dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta efisiensi dan efektifitas belanja kebutuhan pendanaan program prioritas pembangunan daerah.

Secara keseluruhan total jumlah belanja tahun anggaran 2023 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar Rp. 1.007.382.824.214,49 yaitu dari target semula tahun 2022 sebesar Rp. 4.728.758.528.793,00,- menjadi Rp. 3.721.375.704.578,51,-. Distribusi target Belanja Daerah Tahun 2023, disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2021-2023

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN ANGGARAN 2021	TARGET TAHUN ANGGARAN 2022	PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 2023
	BELANJA	4.297.164.739.359,00	4.728.758.528.793,00	3.721.375.704.578,51
a.	BELANJA OPERASI	3.277.818.253.049,00	3.527.939.091.816,00	2.840.036.794.971,51
	Belanja Pegawai	1.473.818.253.049,00	1.653.970.551.170,00	1.536.905.417.070,00
	Belanja Barang dan Jasa	1.256.900.803.312,00	1.306.248.312.348,00	993.131.377.901,51
	Belanja Hibah	543.408.827.738,00	554.667.129.673,00	300.000.000.000,00
	Belanja Sosial	3.680.000.000,00	13.053.098.625,00	10.000.000.000,00
b.	BELANJA MODAL	526.504.611.829,00	619.374.691.994,00	300.000.000.000,00
	Belanja Tanah	170.000.000,00		
	Belanja Peralatan dan Mesin	119.555.714.828,00	185.945.173.484,00	
	Belanja Gedung dan Bangunan	180.919.804.833,00	193.599.605.862,00	-
	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	203.936.503.168,00	207.235.344.548,00	-
	Belanja Aset Tetap Lainnya	21.922.589.000,00	32.594.568.100,00	-
	Belanja Aset Lainnya			
c.	BELANJA TAK TERDUGA	53.350.000.000,00	60.000.000.000,00	29.500.000.000,00
	Belanja Tak Terduga	53.350.000.000,00	60.000.000.000,00	29.500.000.000,00
d.	BELANJA TRANSFER	439.491.874.481,00	521.444.744.983,00	551.838.909.607,00
	TRANSFER ATAU BAGI HASIL PENDAPATAN KE KABUPATEN/KOTA	439.491.874.481,00	512.838.909.607,00	512.838.909.607,00
	Bagi Hasil Pajak Ke Kabupaten/Kota	431.187.100.000,00	512.838.909.607,00	512.838.909.607,00
	Belanja Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota	8.304.774.481,00	8.605.835.376,00	54.400.000.000,00
SURPLUS/DEFISIT				(440.517.264.042,51)

Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah (BPKAD, Tahun 2022)

Dari Tabel 2.6 Diatas, Belanja Operasi pada tahun 2023 diproyeksikan sebesar Rp. 2.840.036.794.971,51.- menurun sebesar 19,4 persen dari tahun

sebelumnya yang sebesar Rp. 3.527.939.091.816,00.-, sedangkan untuk Belanja Tak Terduga diproyeksikan sebesar Rp. 29.500.000.000,00.-, Belanja Transfer diproyeksikan sebesar Rp. 551.838.909.607,00 dan Belanja Modal diproyeksikan sebesar Rp. 300.000.000.000,00.

3. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD sedangkan Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran yang perlu diterimakan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya dan dianggarkan secara bruto dalam APBD. Pembiayaan daerah merupakan salah satu jalan yang dapat ditempuh oleh pemerintah daerah untuk menutupi defisit anggaran belanja daerah. Uraian perubahan target pembiayaan daerah tahun 2023, disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.9
Proyeksi/Target Penerimaan dan Pengeluaran
Pembiayaan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

NO	URAIAN	PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 2021	PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 2022	PROYEKSI TAHUN ANGGARAN 2023
3	PEMBIAYAAN	215.194.536.268,00	389.698.510.155,00	440.517.264.042,51
3.1	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	215.194.536.268,00	389.698.510.155,00	440.517.264.042,51
3.1.1	Penggunaan SILPA	215.194.536.268,00	389.698.510.155,00	440.517.264.042,51
3.2	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	-	-	-
3.2.1	Pembentukan Dana	-	-	-
3.2.2	Cadangan Penyertaan Modal	-	-	-
3.2.3	(Investasi) Daerah	-	-	-
3.2.4	Pembayaran Pokok Utang Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-

Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah (BPKAD, Tahun 2022)

Jumlah pembiayaan netto pada Tahun 2023 diproyeksikan mengalami kenaikan dari Rp. 389.698.510.155,00,- (Tiga ratus delapan puluh Sembilan milyar enam ratus Sembilan puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu seratus lima puluh lima rupiah) pada tahun 2022 menjadi Rp. 440.517.264.042,51,- atau naik sebesar Rp. 50.818.753.887,51,- kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA), sedangkan Penyertaan Modal (Investasi) Daerah tidak dialokasikan.

2.4 POTENSI PENGEMBANGAN WILAYAH

2.4.1 Pertanian

Berdasarkan data RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 luas potensi lahan Pertanian seluas 672.795 Ha, lahan ini masih dapat diperluas dengan memanfaatkan kawasan hutan konversi seluas 297.859,78 Ha, sehingga potensi keseluruhan pertanian adalah 942.206 Ha. Pengembangan Potensi Pertanian dibagi atas dua bagian, yaitu: (1) Pertanian Tanaman Pangan Lahan Basah (TPLB); (2) Pertanian Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK).

Untuk lahan basah; pengembangan kawasan pertanian diarahkan pada kawasan yang sesuai untuk penanaman tanaman pangan. Lahan basah yang mempunyai sistem atau potensi pengembangan prasarana pengairan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti; ketinggian kawasan di bawah 1000 m, kelerengan kawasan di bawah 40% dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 30 cm.

Untuk Lahan Kering; lebih diarahkan pada areal yang tidak mempunyai sistem dan atau potensi pengembangan pengairan/irigasi dengan mempertimbangkan faktor-faktor; ketinggian kawasan di bawah 1000 m, kelerengan kawasan di bawah 40% dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 30 cm. Saat ini Provinsi Sulawesi Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dengan rincian sebagai berikut:

- Untuk Lahan Sawah Irigasi dan Tadah Hujan seluas 168.250 Ha yang pengelolaannya lebih diarahkan pada pola tanam satu kali seluas 12.630 Ha, tanam dua kali seluas 124.713 Ha, tanam tiga kali seluas 6.132 Ha, tidak tanam padi seluas 3.689 Ha, tidak diusahakan atau bero seluas 21.086 Ha.
- Untuk lahan kering yang terdiri dari tegalan atau kebun seluas 577.490 Ha dan ladang atau huma seluas 241.220 Ha. Selanjutnya total luas lahan pertanian di Provinsi Sulawesi Tengah yang diarahkan untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 266.552 Ha yang terdiri masing-masing Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 119.702 Ha dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) seluas 146.850 Ha. Ketersediaan lahan ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Tengah melalui Program Sawah Lestari.

a. Tanaman Pangan

Jenis pertanian tanaman pangan di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 memiliki luas panen 185 626,64 ha, meningkat dibandingkan pada tahun 2020 dengan luas panen 180.509,55 Ha, sedangkan jumlah produktivitas pada tahun 2020 seluas 44,88 ku/ha, tahun 2021 meningkat menjadi 46,69 ku/ha, sementara pada tahun 2020 produksi padi 810.108,26 ku, meningkat dibandingkan pada tahun 2021 produksi padi sebesar 866 668,66 ku, ditunjukkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.10
Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2020 dan 2021

KABUPATEN/KOTA	Luas Panen(Ha)		Produktivitas (ku/ha)		Produksi (ku)	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
KAB. BANGGAI KEPULAUAN	665,64	509,6	45,23	42,17	3.010,66	2.149,16
KAB. BANGGAI	35.825,73	37.558,08	42,12	43,57	150.885,18	163.626,66
KAB. MOROWALI	9.224,84	8.889,56	45,6	51,11	42.068,22	45.434,34
KAB. POSO	25.284,09	24.952,20	39,3	43	99.359,51	107.306,23
KAB. DONGGALA	13.720,97	13.376,32	48,29	43,45	66.260,44	58.122,33
KAB. TOLI TOLI	14.910,76	13.588,55	56,04	44,66	83.556,72	60.684,03
KAB. BUOL	5.019,45	6.354,19	41,57	39,6	20.866,59	25.164,20
KAB. PARIGI MOUTONG	47.991,21	54.387,78	45,81	51,92	219.829,78	282.407,04
KAB. TOJO UNA UNA	1.506,68	1.260,76	44,2	41,78	6.660,20	5.267,84
KAB. SIGI	18.556,55	17.568,29	44,81	48,51	83.143,90	85.229,76
KAB. BANGGAI LAUT	-	-	-	-	-	-
KAB. MOROWALI UTARA	7.727,65	7.017,09	44,17	43,43	34.133,56	30.472,58
KOTA PALU	75,98	164,22	43,89	48,99	333,5	804,49
TOTAL	180.509,55	185.626,64	44,88	46,69	810.108,26	866.668,66

Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah (BPS, Tahun 2022)

b. Hortikultura

Pencapaian produksi pertanian hortikultura bagi penduduk Sulawesi Tengah utamanya bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabe rawit, Kentang, Kubis, Kangkung, Petsai dan tomat masih dipenuhi dari produksi sendiri, dan hanya beberapa komoditi dari daerah lain sebagai tambahan, penanaman kesembilan jenis komoditi tersebut Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2021 memiliki areal seluas 11.098 Ha, dan yang terluas yaitu 3.874 Ha, untuk areal penanaman cabe rawit, sedangkan areal yang jenis komoditi paling sedikit adalah Kentang yaitu seluas 48 Ha.

2.4.2 Perkebunan

Kawasan Perkebunan Tanaman Tahunan/Perkebunan diarahkan pada areal tanaman tahunan/perkebunan dengan karakteristik/ lingkungan dengan

ketinggian di bawah 2000 m, kelerengan kawasan di bawah 40 persen dan kedalaman efektif lapisan tanah di atas 30 cm. Potensi perkebunan Provinsi Sulawesi Tengah seluas 289.805 Ha, dengan potensi komoditi kelapa seluas 61.999 Ha, kakao 120.085 Ha, cengkeh 33.361 Ha, karet 6.250 Ha, jambu mente 9.815 Ha, pala 11.434 Ha dan sawit rakyat 23.115 Ha.

2.4.3 Peternakan

Pengembangan kawasan peternakan umumnya berada pada kondisi lingkungan dengan ketinggian di bawah 1.000 meter, kelerengan di bawah 1.000 meter dan jenis tanah dan iklim yang sesuai untuk padang rumput alamiah. Pemanfaatan kawasan secara optimal seluas 130.955,5 Ha, sedangkan potensi areal peternakan yang sudah dimanfaatkan seluas 120.955,5 Ha.

Adapun jenis ternak yang diusahakan diklasifikasikan sebagai berikut: (a) Ternak Besar meliputi: sapi, kerbau dan kuda; (b) Ternak kecil meliputi: kambing, domba dan babi; (c) Ternak unggas meliputi: ayam ras, ayam kampung dan itik

2.4.4 Perikanan

Potensi perairan laut Sulawesi Tengah seluas 193.923,75 km² yang banyak mengandung berbagai jenis ikan dan biota laut lainnya, terbagi dalam 3 (tiga) zona yaitu (1) Selat Makasar dan Laut Sulawesi (sebesar 929.700 ton), (2) Teluk Tomini (sebesar 595.620 ton), (3) Teluk Tolo (sebesar 68.456 ton). Potensi sumberdaya ikan di perairan tersebut kurang lebih sebanyak 330.000 ton per tahun. Sedangkan ikan yang bisa dikelola secara lestari sekitar 214.000 ton per tahun. Di Teluk Tolo terdapat

2.4.5 Industri

Pengembangan kawasan industri mempunyai persyaratan lokasi industri sesuai dengan hasil studi kelayakan. Rencana pemanfaatan kawasan industri diarahkan pada lokasi yang teridentifikasi memiliki potensi sumber daya alam.

Pengembangan kawasan diarahkan pula pada lokasi yang mempunyai daya dukung sarana dan prasarana.

Untuk pengembangan industri Provinsi Sulawesi Tengah ke depan diarahkan pada pengolahan barang manufaktur dan agroindustri yang mengandalkan kegiatan produksi yang dilakukan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Palu dan industri pengolahan tambang pada Kawasan Industri Morowali (KI-Morowali) serta Industri Gas Bumi di Kabupaten Banggai

2.4.6 Pariwisata

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi wisata yang cukup untuk dikembangkan menjadi obyek dan atraksi wisata bahari, wisata alam dan wisata budaya. Potensi pariwisata dapat dikembangkan atas dasar nilai budaya yang sudah ada dalam masyarakat, nilai adat istiadat dan agama yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi masyarakat.

Adapun Potensi dan obyek pariwisata yang dapat dikembangkan di Sulawesi Tengah adalah :

- a. **Kabupaten Banggai Kepulauan** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pulau Makaliu (pulau Tikus), Pulau Lambangan Pouno, Pulau Tolobundu, Pulau Bandang Besar dan Kecil, Pulau Lesampuang, Pulau Delopo, Pantai Pasir Putih, Pulau Kembongan, dan Pulau Kokungan;
- b. **Kabupaten Buol** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Taman Wisata Alam Kumaligon, Goa Kolera, Pantai Kamaligon, Air Terjun Talokan, Sumber Air Panas, Air Terjun Pinamula, Rumah Adat Buol, Pantai Pelepas Rindu Hulubalang, Pantai Batu Susun, Pemandian Alam Tirtaria, Rumah Raja Buol, Pulau Ringgit/Pulau Lamari, Pulau Lesman, Pulau Boki, Pulau Busak, Pulau Raja, Gunung Pogogul, Pulau Panjang;
- c. **Kabupaten Donggala** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pantai Batusuya, Taman Rekreasi Umum Loly Indah, Teluk Telenggano, Pusentasi,

Pantai Boneoge, Toravega Cottage, Pantai Enu, Tanjung Karang, Harmony Cottage, Golden park Cottage, Lokasi Berkemah/Camping Ground, Pulau Pasoso.

- d. **Kabupaten Morowali – Morowali Utara** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Cagar Alam Morowali, Pemancingan Putri Malu, Air Terjun Mempueno, Sumber Air Panas One Pute, Teluk Tomori, Pulau Rumbia, Batu Payung, Tebing Toppohulu, Batu Putih, Pulau Ulu, Pengia, Taman Laut Kaleroang, Menui Kepulauan, Benteng Fafontofure, Mesjid Tua Bungku, Budaya Masyarakat Wana, Istana Bungku, Rumah Controleur/Pengawas, Kubur Raja Marunduh, Situs Istana Raja Mori, dan Bangunan Bersejarah;
- e. **Kabupaten Parigi Moutong** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pulau Kelelawar, Tanjung Makakata, Situs Rumah Raja Moutong, Rumah Klerek, Air terjun dan Tebing Likunggavali, Pantai Bambalemo, Pantai Indah Bomba Kaili, Habitat Burung Maleo, Perkebunan Ebony, Pantai Junayasa, Pantai Prajurit Posona, Benda Cagar Budaya, Situs Tanalanto, Makam Raja Torikota, Makam Raja Maruf(Magau Janggo), Makam Magau Langi Maili, Makam Magau Nguni Pasolemba, Makam Magau Tagunu, Pantai Tumpapa;
- f. **Kabupaten Poso** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Pantai Seribu Bintang, Pantai wisata Tamongajo, dan dari hasil Delinasi jumlah peninggalan arkeologi : Kuburan, Peti Kubur Kayu, Buho, Tambi, Tutup Tempayan, Wadah Tempayan, Fitur, Batu Pelana, Batu Bergores, Batu Datar, Struktur, Monolit, Umpak Batu, Lesung Batu, Dulang, Lumpang Batu, Batu Berlubang, Temu Gelang, Menhir, Arca, Dolmen, Bakal Tutup Kalamba, Bakal Wadah Kalamba, Tutup Kalamba dan Wadah Kalamba untuk Lembah Napu yang terdiri dari 29 (Dua puluh Sembilan) Situs dan 725 (Tujuh Ratus Dua Puluh Lima) tinggalan arkeologi, Lembah Behoa yang terdiri dari 22 (Dua Puluh Dua) Situs dan 825 (Delapan Ratus Dua Puluh Lima) tinggalan arkeologi dan Lembah Bada yang terdiri dari 35 (Tiga Puluh

Lima) Situs. Untuk rincian hasil pendataan kerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Wilayah Gorontalo pada saat dilapangan terdapat beberapa Situs, diantaranya : Situs Rumah Adat Tambi, Megalith, Situs Suso, Situs Sepe, Situs Tadulako, Situs Megalit Pokekea, Situs Lempe, Desa Wuasa, Situs Padang Padali, Situs Megalith Tamadue, Situs Watulumu, Situs Watutau, Situs Megalith Betue, Situs Mungku Padampaa, Situs Watunongko, Danau Poso, Watubaula, Goa Tangkaboba, Pantai Tandolala, Siuri Cottage, Taman Anggrek Bancea, Padamariri, Goa Pamona, Situs Makam Adriani, Situs Tendea Dongi, Situs Latea, Situs Pamona, Situs Watumpagaa, Situs Watub Baula, Situs Tangkaboba, Situs Watu Mpongasa, Situs Pendolo, Situs Korobono, Situs Tindoli, Situs Tadulako, Situs Pokekea, Situs Pobatua, Situs Ntovera, Situs Tunduwanua, Situs Padang Hadoa, Situs Padang Taipa, Situs Mungku Dana, Situs Watu Nongko, Situs Tamadue, Situs Maholo, Situs Winowanga, Situs Waru Maeta, Situs Wuasa, Situs Kedua, Situs Sedua, Situs Wanga, Situs Watutau, Situs Betue, Situs Talabosa, Situs Rompo, Situs Katu, Situs Torire, Situs Bariri, Situs Doda, Situs Henggira, Situs Lempe, Situs Pada, Situs Bomba, Situs Kolori, Situs Bewa, Situs Lengkake, Situs Kageroa, Situs Tuare, Situs Badanngkala, Situs Bakekau, Situs Bulili, Situs Gintu, Situs Longge, Situs Salingoha;

g. **Kabupaten Tolitoli** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Gua Pompeile, Air Terjun Kolasi, Air Panas Tanigi, Bendungan Kolondom, Tanjung Matop, Air Terjun Sigelang, Pulau Lutungan, Pantai Tende Sabang, Tanjung Simuntu, Pantai Lalos, Pantai Bajugan, Rumah Adat Etnis Tolitoli;

h. **Kabupaten Tojo Una-una** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Kepulauan Togeang, Air Terjun Tolibaz, Pantai Tipae, Pantai Pasir Putih Matakoto, Pemandian Malatong, Air Panas Marowo, Pulau Pangempa, Tanjung Api, Sungai Bongka, Pantai Capatana, Pulau Kabalutan, Pulau Malenge, Jembatan Bakau, Pulau Bolilanga, Pulau Taipi, Pulau Unauna, Tanjung Keramat, Pulau Kadidiri;

- i. **Kabupaten Banggai** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu: Air Panas Uwedaka, Permandian Salodik, Danau Makapa, Air Terjun Hanga-Hanga, Permandian Sandakan, Permandian Dondo, Air Terjun Nambo, Permandian Ampata, Gua Wira, Permandian Kilo Lima, Teluk Lalong, Pantai Pandaan Wangi, Pulau Dua, Pulau Poat, Boli Cotage Cafe, Gereja Tua Simpangan, Situs Totonga Bola Matindok;
- j. **Kota Palu** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu: Niki Beach, Museum Negeri Sulawesi Tengah, Souraja atau Banua Oge, Kolam Renang Milenium, Lokasi MTQ Jabal Nur, Taman Ria, Dayo mpoluku, Teluk Palu, Makam Dato Karama, Kerajinan Tangan dan Makanan Khas Daerah, Makam Pue Njidi, Kolam Renang Graha Tirta, Pantai Taipa, Jazz Hotel dan Recreation Zone, Pantai Talise, Bumi Roviga, dan Cagar Alam Poboya.
- k. **Kabupaten Sigi** dengan obyek dan daya tarik wisata yaitu Situs Bangga, Situs Tuva, Situs Loru, Situs Waturalele, Situs Kotapulu, Situs Tulo, Situs Lebanu, Situs Rodingo, Situs Lumbulama, Situs Sibedi, Situs Bolapapu, Situs Mataue, Situs Lindu/Langko, Situs Tomado/Lindu, Situs Anca/Lindu, Situs Lonca, Situs Winatu, Situs Toro, Situs Watukilo, Situs Tomua, Situs Mapahi, Situs Banasu, Situs Mamu, Situs Watukilo, Situs Tomua, Situs Boladangko, Camping Ground Paneki, Matantimali, Pemandaian Uwelera Porame, Porame Paradise, Mantikole, Taman Wisata Kapopo, Air Terjun Wera, Desa Dombu, Desa Toro, Lobo, Air Terjun Pawelua, Air Panas Bora, Gampiri, Kulit Kayu, Habitat Burung Maleo, Desa Pakuli, Sungai Lariang, Lembah Pipikoro, Air Terjun Tamunggu Indah, Taman Megalith Watunonju.

2.4.7 Pertambangan

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah, antara lain terdapat potensi bahan galian dan mineral, serta potensi gas dan minyak bumi. Potensi minyak bumi yang terdapat di Kecamatan Bungku Utara Kabupaten Morowali terdapat di lapangan Minyak Tiaka Blok Trili

yang terletak 17 mil dari garis pantai. Cadangan minyak di lapangan Tiaka sebesar 106,56 Million Barrel Oil/juta Barrel minyak (MMBO). Sedangkan potensi minyak bumi yang terdapat di Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai memiliki kapasitas 16,5-23 juta barrel per tahun dengan total kapasitas produksi 6.500 Barrel (BOPD) yang diperoleh dari enam sumur, dan produksi rata-rata setiap sumur yaitu 1.100 BOPD. Disamping itu, Kabupaten Banggai juga memiliki potensi gas alam cair yang terdapat di Donggi-Senoro dengan perkiraan cadangan sebesar 20-28 trilyun kaki kubik (tcf), jumlah kandungan gas di ladang-ladang Donggi-Senoro besarnya dua kali lipat dibandingkan sisa kandungan yang terdapat di ladang gas alam Arun di Aceh yang jumlahnya mencapai 14 tcf.

Selain potensi minyak bumi dan gas alam tersebut, Sulawesi Tengah juga memiliki potensi pertambangan. Potensi emas di Sulawesi Tengah terdapat di Kota Palu (Kecamatan Mantikulore dan Palu Utara), dengan luas wilayah tambang 561.050 Ha, Kabupaten Parigi Moutong (Kecamatan Parigi dan Moutong) dengan luas wilayah tambang 46.400 Ha, Kabupaten Buol (Kecamatan Paleleh, Bunobogu, Dondo) dengan luas wilayah tambang 746.400 Ha, Kabupaten Poso (Kecamatan Lore Utara) dengan luas wilayah tambang 19.180 Ha, dan Kabupaten Sigi (Kecamatan Sigi Biromaru) dengan luas wilayah tambang 228.700 Ha.

Secara umum potensi pertambangan yang terdapat di Sulawesi Tengah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.11
Potensi dan Sebaran Pertambangan di Sulawesi Tengah

NO	BAHAN GALIAN	CIRI KHAS - LOKASI	KETERANGAN
I. Batuan Ornamen/poles			
1	Granit, Granodiorit, Gabro, Basal, Dasit dan Andesit	Granit warna Merah Daging terdapat di Kab. Banggai Kepulauan Granit Warna abu-abu, Abu-abu gelap terdapat di Kab. Donggala, Parigi Moutong dan Tolitoli	Gabro di Kab. Donggala pernah ditambang yang dipasar disebut Granit HI TAM
2	Marmer/pualam dan Sarpentin	Marmer Hijau terdapat di Kab. Tojo Una una, Parigi Moutong dan Poso Marmer Coklat, Putih, Krem dan Abu-abu terdapat di Kab. Morowali dan Kab. Banggai	Marmer Hijau-Muda pernah dieksploitasi di Poso dan Morowali
		Marmer Coklat Kemerahan terdapat di Kab. Parigi Moutong Marmer Coklat terdapat di kab. Morowali	
II. Batuan Bahan Konstruksi			
3	Sirtukil	Terdapat Kota Palu dan disemuaKabupaten se-Sulawesi Tengah.	Material berasal dari rombakan batuan yang terdiri dari batuan Granit, Granodiorit, Basal, Gabro, Andesit, Dasit, Serpentin, Dunit, juga dari Breksi dan Konglomerat Di Kab. Donggala dan Kota
III. Mineral Non Logam lainnya			
4	Batugamping	Kab. Donggala, Buol, Poso, BanggaiKepulauan dan Morowali	Kab. Donggala, Banggai Kepulauan mempunyai potensi Bahan Baku Semen yang sudah melalui studi Kelayakan dan AMDAL.
5	Lempung	Disemua Kabupaten se Sulawesi Tengah	Sebagian baru dimanfaatkan dalam pembuatan batu bata, Genteng dan batako.
6	Pasir Kwarsa	Kab. Donggala, Parigi Moutong, Tolitoli dan Banggai Kepulauan	Umumnya mempunyai kadar SiO ₃ kurang dari 75 %
7	Gypsum	Kab. Banggai Kepulauan dan Kota Palu	Dipersiapkan untuk Pabrik Semen di Banggai Kepulauan
8	Talk	Kab. Banggai, dan Tojo Unauna	Berupa Sisipan pada batuan batuan Ultrabasa Pertanian (Kaptan), Kadar Mg O ₃
9	Dolomit	Kab. Banggai	Sebagai bahan baku Kapur (Magnesium) sampai 35 %

Sumber : Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah (Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2022)

Selain hal tersebut di atas, Sulawesi Tengah juga memiliki potensi sumberdaya energi yang terbarukan dan tidak terbarukan, yaitu antara lain:

Gas Bumi : 9,6 triliun kaki kubik

• Panas Bumi : 378 mWe

• Sumber Energi Terbarukan:

❑ Air : 1.001,980 MW

❑ Matahari : 5.512 kWh/m²

❑ Angin : 2 – 5 m/s

❑ Biogas : 19.026 kW

• Luas Lahan Kritis Untuk Budi Daya Tanaman Jarak Pagar (Biofuel) : 260.070 ha.

Potensi energi air di Sulawesi Tengah cukup banyak baik skala besar (PLTA), menengah (PLTM) maupun skala kecil (PLTMH). Salah satu potensi tenaga air skala besar yang ada di Sulawesi Tengah adalah potensi tenaga air sungai Sulewana yang memiliki 3 titik potensi yaitu PLTA Poso-1, PLTA Poso-2 dan PLTA Poso-3. PLTA Poso 2 telah beroperasi sejak Tahun 2012 dengan Kapasitas 3x65 MW, sementara PLTA Poso-1 dengan kapasitas 4x30 MW dan PLTA Poso-3 dengan kapasitas 4x50 MW. Ketiga pembangkit tersebut direncanakan sebagai pembangkit Peaker dengan total kapasitas 515 MW.

Potensi energi air skala besar yang sedang dalam proses perizinan adalah PLTA Gumbasa dengan kapasitas 45 MW yang akan dikerjakan oleh PT. Gumbasa Energy. Potensi tenaga air skala (mini) yang sedang dibangun adalah PLTM Tomini - 2 dengan kapasitas 2 x1 MW oleh Pikitring Sulmapa dengan kemajuan pembangunan sudah mencapai 78,48 %. Potensi tenaga air di Provinsi Sulawesi Tengah masih banyak yang belum dimanfaatkan terutama potensi skala menengah (PLTM) dan kecil (PLTMH).

Sementara untuk potensi Panas Bumi terdapat di beberapa titik yang tersebar di Kabupaten Poso dan Donggala dengan potensi berkisar antara 20-40 Mwe. Sulawesi Tengah mempunyai intensitas sinar matahari cukup tinggi karena dilalui garis khatulistiwa. Penyinaran sinar matahari rata-rata 64-78 %,

yang dapat dikembangkan sebagai sumber energi alternative dengan memanfaatkan Solar Home System (SHS) khususnya di daerah pedesaan dan pulau-pulau kecil yang sulit dijangkau oleh jaringan listrik PLN.

Secara geografis kedudukan Sulawesi Tengah mempunyai garis pantai yang panjang kurang lebih 4.013 km, hal ini merupakan potensi energi yang dapat dimanfaatkan baik untuk pembangkit listrik maupun untuk tenaga penggerak bagi mesin-mesin tertentu. Kecepatan rata-rata angin di Sulawesi Tengah setiap bulannya berkisar antara 2–5 m/s.

BAB III

SUMBER DATA

Berdasarkan tipenya, sumber data kependudukan dibagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah segala catatan asli atau data yang diperoleh secara langsung. Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang telah diolah dan disajikan baik dalam buku teks, laporan penelitian, maupun karya tulis ilmiah yang telah diterbitkan secara periodik. Dalam penyusunan buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini sumber data diperoleh dari :

3.1 Registrasi

Registrasi penduduk merupakan suatu sistem registasi yang dilakukan oleh petugas pemerintah Kabupaten/Kota yang meliputi pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, perubahan tempat tinggal dan perubahan pekerjaan. Data ini berasal dari server aplikasi Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) yang terdapat pada masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Tengah. Data Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) yang diperoleh berdasarkan dari kegiatan pelayanan administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sepanjang tahun 2022.

3.2 Non Registrasi

Data Non Registrasi ialah data yang bersumber dari buku-buku, majalah, jurnal, artikel, literatur, maupun situs-situs internet yang berkaitan dengan penyusunan buku profil perkembangan kependudukan.

3.2.1 Data Lintas Sektor

Data lintas sektor merupakan data yang diperoleh dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah yang relevan dan related dengan kondisi penduduk sesuai dengan obyek tugas pokok dan fungsinya. Data lintas sektor yang berkaitan dengan penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan adalah data kualitas penduduk yakni berupa kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial.

BAB IV

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

4.1 JUMLAH DAN PERSEBARAN PENDUDUK

4.1.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota

Perkembangan kependudukan merupakan kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan berkelanjutan.

Kondisi persebaran penduduk yang tidak merata menjadi permasalahan bagi pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Diperlukan cara pemerataan penduduk yang seimbang, sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan secara optimal. Salah satu cara pemerataan penduduk di Indonesia adalah melalui perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah jarang penduduk. Perpindahan penduduk dapat dilakukan dengan keinginan warga sendiri maupun melalui program pemerintah.

Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau dengan luas wilayah daratan 61.605,718 km². Sementara untuk wilayah Perairan Laut seluas 193.923,75 km² didiami penduduk sebanyak 3.099.717 (Tiga juta Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas) jiwa, terdiri dari laki-laki berjumlah 1.590.279 (Satu juta lima ratus Sembilan puluh ribu dua ratus tujuh puluh Sembilan) jiwa dan perempuan berjumlah 1.509.438 (Satu juta lima ratus Sembilan ribu empat ratus tiga puluh delapan) jiwa. Penduduk ini tersebar di 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota. Jika diperhatikan nampak bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk di setiap Kabupaten/Kota dapat dilihat persebarannya pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin,
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

KODE	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		L + P	
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
7201	KAB. BANGGAI	188.536	11.86	181.982	12.06	370.518	11.95
7202	KAB. POSO	128.565	8.08	121.017	8.02	249.582	8.05
7203	KAB. DONGGALA	158.718	9.98	150.426	9.97	309.144	9.97
7204	KAB. TOLI TOLI	119.268	7.50	114.729	7.60	233.997	7.55
7205	KAB. BUOL	79.588	5.00	75.761	5.02	155.349	5.01
7206	KAB. MOROWALI	94.637	5.95	80.686	5.35	175.323	5.66
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	63.295	3.98	61.735	4.09	125.030	4.03
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	231.689	14.57	221.007	14.64	452.696	14.60
7209	KAB. TOJO UNA UNA	85.692	5.39	82.054	5.44	167.746	5.41
7210	KAB. SIGI	134.209	8.44	127.950	8.48	262.159	8.46
7211	KAB. BANGGAI LAUT	37.675	2.37	37.245	2.47	74.920	2.42
7212	KAB. MOROWALI UTARA	78.599	4.94	65.890	4.37	144.489	4.66
7271	KOTA PALU	189.808	11.94	188.956	12.52	378.764	12.22
	TOTAL	1.590.279	100	1.509.438	100	3.099.717	100

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

Pada tabel 4.1 diatas menjelaskan bahwa jumlah penduduk terbanyak tersebar pada Kabupaten Parigi Moutong dengan jumlah penduduk 452.696 (Empat ratus lima puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh enam) jiwa diikuti dengan Kota Palu dengan jumlah penduduk sebesar 378.764 (Tiga ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh empat) jiwa dan Kabupaten Banggai dengan jumlah penduduk sebesar 370.518 (Tiga ratus tujuh puluh ribu lima ratus delapan belas) jiwa. Kondisi ini menunjukkan Kabupaten terpadat terdapat pada Kabupaten Parigi Moutong sedangkan jumlah penduduk terkecil terletak di Kabupaten Morowali Utara dengan jumlah penduduk sebesar 144.489 (Seratus empat puluh empat ribu empat ratus delapan puluh sembilan) jiwa diikuti Kabupaten Banggai Kepulauan dengan jumlah penduduk sebanyak 125.030 (Seratus dua puluh lima ribu tiga puluh) jiwa dan Kabupaten Banggai

Laut dengan jumlah penduduk sebanyak 74.920 (Tujuh puluh empat ribu Sembilan ratus dua puluh) jiwa.

4.1.2 Kepadatan Penduduk

Kepadatan adalah hasil bagi jumlah objek terhadap luas daerah. Dengan demikian satuan yang digunakan adalah satuan/luas daerah rumus kepadatan penduduk sebagai berikut:

$$P = \frac{\text{Jumlah Penduduk (jiwa)}}{\text{Luas Wilayah (km}^2\text{)}}$$

Semakin besar angkanya maka semakin padat kependudukannya.

Analisis kepadatan penduduk penting untuk mengetahui persebaran penduduk suatu wilayah dan penataan ruang khususnya distribusi permukiman. Kepadatan penduduk merupakan indikator awal untuk mendeteksi tingkat perkembangan wilayah beserta seluruh kemungkinan dampak yang ditimbulkan. Wilayah yang memiliki kepadatan yang tinggi umumnya adalah pusat permukiman, pusat peradaban, dan pusat aktivitas sosial ekonomi (pusat pertumbuhan).

Provinsi Sulawesi Tengah merupakan tergolong Provinsi yang jarang penduduknya. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.2 yang memperlihatkan kepadatan penduduk di Kabupaten/Kota dengan luas wilayah 61.605.718 km², Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota didiami oleh 3.099.717 (Tiga juta Sembilan puluh Sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas) jiwa. Jika dilihat persebaran di setiap Kabupaten/Kota nampak bahwa Kota Palu merupakan wilayah terpadat dengan kepadatan sebesar 1.062 jiwa/km², sedangkan wilayah kepadatan terendah di Kabupaten Morowali Utara yaitu sebesar 16 jiwa/km². Secara keseluruhan Provinsi Sulawesi Tengah memiliki kepadatan penduduk 50 jiwa/km². Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.2.

Tabel 4.2.
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK n (jiwa)	LUAS WILAYAH (Km ²)	KEPADATAN PENDUDUK
7201	KAB. BANGGAI	370.518	8.252.882	44
7202	KAB. POSO	249.582	7.545.930	33
7203	KAB. DONGGALA	309.144	5.126.586	60
7204	KAB. TOLI TOLI	233.997	3.700.369	63
7205	KAB. BUOL	155.349	3.723.580	41
7206	KAB. MOROWALI	175.323	4.486.891	39
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	125.030	2.385.073	52
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	452.696	5.805.610	77
7209	KAB. TOJO UNA UNA	167.746	5.572.856	30
7210	KAB. SIGI	262.159	5.225.435	50
7211	KAB. BANGGAI LAUT	74.920	688.151	108
7212	KAB. MOROWALI UTARA	144.489	8.736.006	16
7271	KOTA PALU	378.764	356.351	1.062
	TOTAL	3.099.717	61.605.718	50

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

4.1.3 Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan angka yang menggambarkan penambahan penduduk yang dipengaruhi oleh pertumbuhan alamiah maupun migrasi penduduk. Laju pertumbuhan penduduk juga merupakan keseimbangan yang dinamis kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Laju pertumbuhan penduduk mengidentifikasi kecenderungan besarnya penduduk pada waktu mendatang.

Laju pertumbuhan penduduk pertahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata tingkat penambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Angka pertumbuhan penduduk dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah dan

struktur penduduk beberapa tahun ke depan. Adapun rumus mencari Laju Pertumbuhan Penduduk adalah sebagai berikut:

$$R = \left(\left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{t}} - 1 \right) \times 100\%$$

Dimana:

R = Laju pertumbuhan penduduk

P_t = Jumlah penduduk tahun t

P_0 = Jumlah penduduk tahun awal

t = Periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun).

Angka pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada Tabel 4.3. Data penduduk tahun 2021 yang digunakan adalah data Bulan Desember 2021 sedangkan data penduduk tahun 2022 menggunakan data Bulan Desember 2022.

Tabel 4.3.
Angka Pertambahan Penduduk Sulawesi Tengah Tahun 2022

KODE	KABUPATEN/KOTA	PENDUDUK TAHUN 2021		PENDUDUK TAHUN 2022		ANGKA PERTAMBAHAN PENDUDUK
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	
7201	KAB. BANGGAI	369.603	12.11	370.518	11.95	0.25
7202	KAB. POSO	248.897	8.16	249.582	8.05	0.28
7203	KAB. DONGGALA	306.720	10.05	309.144	9.97	0.79
7204	KAB. TOLI TOLI	230.204	7.54	233.997	7.55	1.65
7205	KAB. BUOL	151.284	4.96	155.349	5.01	2.69
7206	KAB. MOROWALI	166.585	5.46	175.323	5.66	5.25
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	124.071	4.07	125.030	4.03	0.77
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	451.493	14.79	452.696	14.60	0.27
7209	KAB. TOJO UNA UNA	166.431	5.45	167.746	5.41	0.79
7210	KAB. SIGI	258.690	8.48	262.159	8.46	1.34
7211	KAB. BANGGAI LAUT	73.641	2.41	74.920	2.42	1.74
7212	KAB. MOROWALI UTARA	130.278	4.27	144.489	4.66	10.91
7271	KOTA PALU	373.857	12.25	378.764	12.22	1.31
	TOTAL	3.051.754	100	3.099.717	100	28.02

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

Angka pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Tengah termasuk rendah. Selama kurun waktu selisih antara Desember 2021 sampai dengan Desember 2022 dengan jumlah 47.963 (Empat puluh tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh tiga) jiwa. Pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Tengah ini dihitung berdasarkan Data Kependudukan Bersih (DKB) hasil dari SIAK Pelayanan Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan dengan Data Center Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang disesuaikan dengan hasil perekaman KTP-el pada tahun 2021 dan Tahun 2022. Dari hasil konsolidasi dan pembersihan data ditemukan banyak sekali data ganda, data anomali, data non aktif, data meninggal dan data yang telah dipindahkan di dalam satu provinsi, kabupaten/kota yang dapat mengakibatkan pengurangan jumlah penduduk.

4.2 Penduduk menurut Karakteristik Demografi

4.2.1 Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin

Karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin penting untuk diketahui, terutama ketika menyusun suatu perencanaan kebijakan dan program pembangunan suatu wilayah. Karena setiap kelompok umur penduduk mempunyai kebutuhan dan penanganan yang berbeda-beda. Kelompok penduduk dibawah 5 (lima) tahun misalnya, masih memerlukan ketersediaan pelayanan kesehatan yang baik, peningkatan status gizi dan status kesehatan, mengingat kelompok ini rentan terhadap kematian. Hal sama, juga penting untuk kelompok remaja khususnya perempuan, ketika menyusun program-program kesehatan reproduksi remaja dalam rangka menyiapkan remaja perempuan menjadi calon ibu yang prima.

Dengan demikian informasi mengenai karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin penting untuk perencanaan untuk penyediaan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan kebutuhan-kebutuhan dasar penduduk lainnya yang sesuai dengan kebutuhan kelompok umur masing-

masing, baik kebutuhan pangan, sandang, papan, pekerjaan dan lain sebagainya. Selain itu karakteristik penduduk menurut umur dan jenis kelamin bukan hanya merupakan pencerminan proses demografi masa lalu, tetapi juga sekaligus dapat digunakan untuk memperkirakan gambaran perkembangan penduduk pada masa yang akan datang melalui proses kelahiran dan kematian.

Tabel 4.4. menunjukkan bahwa penduduk Sulawesi Tengah sebagian besar merupakan penduduk usia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15-64 tahun atau 69,56 persen dengan komposisi terbesar berada pada penduduk berumur 15-24 tahun. Kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar diatas 50 persen yang merupakan penduduk usia kerja (usia produktif), dan sisanya sebanyak 25,17 persen merupakan penduduk usia muda atau berusia dibawah 15 (lima belas) tahun dan 5,01 persen merupakan penduduk lanjut usia atau 65 (enam puluh lima) tahun ke atas.

Tabel 4.4.
Jumlah dan Proporsi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		JUMLAH JIWA	%
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%		
00-04	91.762	5.77	84.955	5.63	84.961	5.63
05-09	143.115	9.00	134.009	8.88	134.018	8.88
10-14	146.267	9.20	137.198	9.09	137.207	9.09
15-19	137.978	8.68	131.785	8.73	131.794	8.73
20-24	156.986	9.87	147.214	9.75	147.224	9.75
25-29	134.148	8.44	123.523	8.18	123.531	8.18
30-34	120.807	7.60	115.298	7.64	115.306	7.64
35-39	116.136	7.30	111.156	7.36	111.163	7.36
40-44	122.284	7.69	117.237	7.77	117.245	7.77
45-49	105.800	6.65	102.854	6.81	102.861	6.81
50-54	97.159	6.11	91.433	6.06	91.439	6.06
55-59	72.783	4.58	70.355	4.66	70.360	4.66
60-64	53.889	3.39	51.866	3.44	51.869	3.44
65-69	38.707	2.43	37.603	2.49	37.605	2.49
70-74	24.994	1.57	24.303	1.61	24.305	1.61
>75	27.464	1.73	28.649	1.90	28.651	1.90
T O T A L	1.590.279	100	1.509.438	100	1.509.538	100

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

Penduduk berusia kurang dari 15 (lima belas) tahun harus menjadi perhatian karena pada 5 (lima) tahun mendatang kelompok ini akan menjadi entry tenaga kerja baru, yang memerlukan *skill*/kemampuan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai baik keterampilan maupun etos kerja serta kepribadian. Untuk memperoleh hal tersebut diatas, diperlukan asupan gizi yang cukup, pendidikan yang memadai serta lingkungan pergaulan yang cukup, baik di rumah maupun di kalangan masyarakat. Sehingga ketika mereka memasuki pasar kerja, mampu memperoleh peluang kerja yang tersedia. Disisi yang lain pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota harus mampu pula menciptakan pasar kerja yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi.

a. Rasio Jenis Kelamin

Rasio Jenis Kelamin adalah suatu angka yang menunjukkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dan banyaknya jumlah penduduk perempuan pada suatu daerah dan waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 (seratus) penduduk perempuan. Data rasio jenis kelamin ini, berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Rasio Jenis kelamin juga digunakan untuk melihat proporsi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan untuk berbagai perencanaan kegiatan seperti penyediaan Rumah Sakit Bersalin, penyediaan ragam pendidikan dan lain sebagainya. Selain itu, informasi rasio jenis kelamin juga penting diketahui oleh para politisi, terutama untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen. Dengan rumus sebagai berikut :

$$SR = \frac{P_l}{P_p} \times 100$$

Dimana :

SR = Sex Rasio (Rasio Jenis Kelamin)

P_l = Jumlah Penduduk Laki-Laki

P_p = Jumlah Penduduk Perempuan

Keterangan :

1. Jika SR lebih besar dari 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan.
2. Jika SR lebih kecil dari 100, artinya jumlah penduduk laki-laki lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan.
3. Jika SR = 100, artinya jumlah penduduk laki-laki sama dengan jumlah penduduk perempuan.

Tabel 4.5.
Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kabupaten/Kota

KODE	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	RASIO
7201	KAB. BANGGAI	188.536	181.982	104
7202	KAB. POSO	128.565	121.017	106
7203	KAB. DONGGALA	158.718	150.426	106
7204	KAB. TOLI TOLI	119.268	114.729	104
7205	KAB. BUOL	79.588	75.761	105
7206	KAB. MOROWALI	94.637	80.686	117
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	63.295	61.735	103
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	231.689	221.007	105
7209	KAB. TOJO UNA UNA	85.692	82.054	104
7210	KAB. SIGI	134.209	127.950	105
7211	KAB. BANGGAI LAUT	37.675	37.245	101
7212	KAB. MOROWALI UTARA	78.599	65.890	119
7271	KOTA PALU	189.808	188.956	100
	T O T A L	1.590.279	1.509.438	105

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

Pada tabel 4.5 rasio jenis kelamin penduduk Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 105 persen yang berarti dari setiap penduduk perempuan terdapat 105 orang penduduk laki-laki.

Rasio jenis kelamin penduduk pada kelompok umur 0-4 tahun sebesar 108 persen yang artinya terdapat 108 balita berjenis kelamin laki-laki dari 100 balita perempuan. Secara biologis memang dikatakan bahwa jumlah kelahiran laki-laki pada umumnya lebih besar dibandingkan bayi perempuan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.6 dibawah.

Tabel 4.6.
Rasio Jenis Kelamin Berdasarkan Kelompok Umur

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	RASIO
00-04	91.762	84.955	176.717	108
05-09	143.115	134.009	277.124	107
10-14	146.267	137.198	283.465	107
15-19	137.978	131.785	269.763	105
20-24	156.986	147.214	304.200	107
25-29	134.148	123.523	257.671	109
30-34	120.807	115.298	236.105	105
35-39	116.136	111.156	227.292	104
40-44	122.284	117.237	239.521	104
45-49	105.800	102.854	208.654	103
50-54	97.159	91.433	188.592	106
55-59	72.783	70.355	143.138	103
60-64	53.889	51.866	105.755	104
65-69	38.707	37.603	76.310	103
70-74	24.994	24.303	49.297	103
>75	27.464	28.649	56.113	96
T O T A L	1.590.279	1.509.438	3.099.717	105

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

b. Piramida Penduduk

Pada karakteristik demografi di Provinsi Sulawesi Tengah, kependudukan dipengaruhi oleh tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Karakteristik penduduk yang paling penting yaitu struktur umur dan jenis kelamin. Struktur umur penduduk atau biasa yang kita kenal dengan kelompok umur merupakan umur tunggal yang dikelompokkan dalam 10 (sepuluh) tahunan. Pada pembahasan demografi pengertian umur yaitu umur pada saat ulang tahun terakhir. Misalnya Gita lahir pada Bulan April 1994 dan Sensus penduduk dilakukan pada Bulan Juni 1995 jadi pada saat Sensus Tahun 1995 dilaksanakan Gita berumur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan tetapi pada perhitungan demografi Gita dicatat berumur 1 (satu) tahun.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, piramida penduduk yaitu komposisi umur dan jenis kelamin suatu penduduk secara grafis yang digambarkan dalam bentuk piramida. Piramida ini terdiri dari 2 (dua) diagram batang, pada satu sisi menunjukkan jumlah penduduk laki-laki dan sisi lainnya menunjukkan jumlah penduduk perempuan. Pada umumnya, setiap batang ini menunjukkan jumlah penduduk setiap jenis kelamin dalam kelompok interval usia penduduk 5 (lima) tahunan. Penduduk laki-laki digambarkan disebelah kiri dengan warna biru sedangkan penduduk Wanita digambarkan disebalah kanan dengan warna merah. Piramida penduduk ini menunjukkan jumlah penduduk atau persentase jumlah penduduk pada usia tertentu dan jenis kelamin tertentu terhadap jumlah penduduk total, dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Gambar 4.1
Piramida Penduduk Sulawesi Tengah



Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

Pada gambar 4.1. Piramida penduduk Provinsi Sulawesi Tengah menggambarkan Provinsi Sulawesi Tengah dengan pertumbuhan yang stabil atau bisa kita sebut piramida penduduk dewasa atau *stationer*.

Jumlah penduduk tertinggi yang berjenis kelamin laki-laki berada pada kelompok umur 20-24 Tahun berjumlah 156.986 (Seratus lima puluh enam ribu Sembilan ratus delapan puluh enam) Jiwa, diikuti dengan kelompok umur 10-14 tahun berjumlah 146.267 (Seratus empat puluh enam ribu dua ratus enam puluh tujuh) jiwa dan kelompok umur 05-09 tahun berjumlah 143.115 (Seratus empat puluh tiga ribu serratus lima belas) Jiwa. Jumlah penduduk tertinggi yang berjenis kelamin perempuan berada pada kelompok umur 20-24 Tahun berjumlah 147.214 (Seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat belas)

jiwa, diikuti dengan kelompok umur 10-14 tahun berjumlah 137.198 (Seratus tiga puluh tujuh ribu seratus Sembilan puluh delapan) jiwa dan kelompok umur 05-09 Tahun berjumlah 134.009 (Seratus tiga puluh empat ribu sembilan) jiwa.

Berdasarkan Kelompok umur penduduk menurut jenis kelamin digambarkan pada piramida penduduk diatas, kita dapat menelusuri kebutuhan apa saja yang pemerintah dapat fasilitasi untuk kategori balita, remaja, dewasa hingga lansia. Selain itu, kita dapat melihat potensi lapangan kerja yang bisa pemerintah sediakan serta kebutuhan akan tambahan kesempatan kerja yang harus diciptakan oleh pemerintah.

Pada piramida ini terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok umur 0-4 tahun terlihat mengecil dibandingkan kelompok umur sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa angka kelahiran menurun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Penduduk lansia (>60 tahun) menunjukkan jumlah penduduk yang berkurang dibandingkan umur yang lebih muda. Maka pada beberapa tahun yang akan datang, kelompok umur penduduk lansia akan semakin bertambah karena akan terus merambat naik. Pemerintah perlu mempertimbangkan untuk menambah fasilitas pelayanan untuk penduduk lansia.

Struktur umur penduduk menurut jenis kelamin dapat digambarkan dalam bentuk piramida penduduk. Dasar piramida penduduk menunjukkan jumlah penduduk, dan badan piramida penduduk bagian kiri dan kanan menunjukkan banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan menurut kelompok umur 5 (lima) tahunan.

c. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang secara kasar menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah negara maju ataukah negara yang sedang berkembang. Rasio ketergantungan merupakan salah satu indikator demografi yang penting, semakin tinggi rasio

ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif (usia 15-64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (usia 0-14 tahun) dan tidak produktif lagi (usia 65 tahun keatas). Sedangkan rasio ketergantungan yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 4.7
Rasio Ketergantungan

KODE	KABUPATEN/KOTA	UMUR PRODUKTIF (15-64 TAHUN)	UMUR (<15 + >65 TAHUN)	RASIO
7201	KAB. BANGGAI	263.302	107.216	40.72
7202	KAB. POSO	179.932	69.650	38.71
7203	KAB. DONGGALA	216.120	93.024	43.04
7204	KAB. TOLI TOLI	160.488	73.509	45.80
7205	KAB. BUOL	105.578	49.771	47.14
7206	KAB. MOROWALI	122.923	52.400	42.63
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	87.208	37.822	43.37
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	322.438	130.258	40.40
7209	KAB. TOJO UNA UNA	115.759	51.987	44.91
7210	KAB. SIGI	183.952	78.207	42.51
7211	KAB. BANGGAI LAUT	52.025	22.895	44.01
7212	KAB. MOROWALI UTARA	104.362	40.127	38.45
7271	KOTA PALU	266.604	112.160	42.07
	TOTAL	2.180.691	919.026	42.14

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

Jadi, rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan usia 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk usia 65 tahun keatas keduanya disebut dengan (bukan angkatan kerja) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Pada Tabel 4.7. menunjukkan rasio ketergantungan Provinsi Sulawesi

Tengah sebesar 42.14 persen, artinya setiap 100 (seratus) jiwa yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 41-42 jiwa yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi.

Tabel 4.8.
Persentase Penduduk Berdasarkan Usia Muda, Produktif dan Usia Tua

KELOMPOK UMUR	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH PENDUDUK	%
0 - 14 TAHUN (MUDA)	381.144	356.162	737.306	23.79
15 - 64 TAHUN (PRODUKTIF)	1.117.970	1.062.721	2.180.691	70.35
>65 TAHUN (TUA)	91.165	90.555	181.720	5.86
SULAWESI TENGAH	1.590.279	1.509.438	3.099.717	100

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

Pada Tabel 4.8. diatas didapat kelompok umur yang dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok umur, yaitu kelompok umur 0-14 tahun, 15-64 tahun dan >65 tahun. Kelompok umur 0-14 tahun sebesar 737.306 (Tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus enam) jiwa atau sebesar 23.79 persen. Kelompok umur 15-64 tahun sebesar 2.180.691 (Dua juta serratus delapan puluh ribu enam ratus Sembilan puluh satu) Jiwa atau sebesar 70.35 persen. Kelompok umur >65 tahun sebesar 181.720 (Seratus delapan puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh) jiwa atau sebesar 5.86 persen. Kelompok umur tertinggi jumlah penduduknya yaitu pada kelompok umur 15-64 tahun atau bisa kita sebut dengan kelompok umur yang produktif. Kelompok umur produktif ini berpotensi sebagai modal pembangunan.

$$RK = \frac{\text{Jumlah Penduduk Usia Muda} + \text{Jumlah Penduduk Usia Tua}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Produktif}} \times 100$$

$$RK = \frac{737.306 + 181.720}{2.180.691} \times 100$$

$$RK = 42$$

Total Rasio Ketergantungan sebesar 42 persen artinya setiap 100 (seratus) orang penduduk usia produktif mempunyai beban tanggungan sebanyak 42 (empat puluh dua) jiwa yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Adapun kelompok umur produktif di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 2.180.691 (Dua juta seratus delapan puluh ribu enam ratus Sembilan puluh satu) jiwa atau 70.35 persen.

4.2.2 Jumlah dan Proporsi Penduduk menurut Status Kawin

Informasi data kependudukan menurut status kawin berguna untuk para penentu kebijakan dan pelaksana program kependudukan, seperti pembangunan keluarga, kelahiran serta upaya-upaya peningkatan kualitas keluarga. Cakupan data kependudukan menurut status kawin yaitu terdiri dari laki-laki dan perempuan. Status perkawinan terdiri dari belum kawin, kawin, cerai hidup, dan cerai mati. Belum kawin adalah status belum /tidak terikat dalam perkawinan. Kawin adalah status terikat dalam perkawinan, baik tinggal Bersama maupun terpisah (kawin sah, secara hukum /adat, agama, negara dan sebagainya, juga hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami istri). Cerai hidup adalah status hidup berpisah sebagai suami istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Cerai walaupun belum resmi secara hukum dianggap cerai cerai. Sebaliknya sementara hidup terpisah tidak dianggap bercerai, misalnya suami/istri yang ditinggalkan oleh istri/suami ke

tempat lain karena sekolah, bekerja dll. Cerai mati adalah status suami / istrinya telah meninggal dunia dan belum kawin lagi.

Konsep perkawinan difokuskan pada keadaan dimana seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama secara sah (*de jure*) maupun tanpa pengesahan perkawinan (*de facto*). Secara tidak langsung status perkawinan mempengaruhi tingkat kelahiran. Pada umumnya, daerah dengan proporsi kawin yang tinggi cenderung menaikkan angka kelahiran.

Tabel 4.9.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Status Kawin

STATUS PERKAWINAN		JENIS KELAMIN				JUMLAH PERSENTASE	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN			
No.	Status	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
1	BELUM KAWIN	816.993	51	664.607	44	1.481.600	48
2	KAWIN	729.659	46	727.526	48	1.457.185	47
3	CERAI HIDUP	15.611	1	24.397	2	40.008	1
4	CERAI MATI	28.016	2	92.908	6	120.924	4
	T O T A L	1.590.279	100	1.509.438	100	3.099.717	100

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

Pada Tabel 4.9. diatas menunjukkan jumlah dan proporsi penduduk menurut status kawin di Provinsi Sulawesi Tengah. Penduduk didominasi oleh penduduk berstatus kawin dengan jumlah 1.457.185 (Satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu seratus delapan puluh lima) jiwa. Selanjutnya diikuti dengan status belum kawin sebesar 1.481.600 (Satu juta empat ratus delapan puluh satu ribu enam ratus) jiwa, cerai mati sebesar 120.924 (Seratus dua puluh ribu sembilan ratus dua puluh empat) jiwa dan cerai hidup sebesar 40.008 (Empat puluh ribu delapan) jiwa.

Adapun status perkawinan terkecil adalah cerai hidup yaitu sebesar 1 (satu) persen atau dengan jumlah sebanyak 40.008 (Empat puluh ribu delapan) jiwa, dimana proporsi perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

Proporsi ini disebabkan laki-laki yang bercerai baik karena perceraian maupun karena ditinggal meninggal istri lebih cepat melakukan perkawinan kembali dibandingkan perempuan. Perempuan lebih banyak pertimbangan untuk menikah kembali, terutama apabila perempuan tersebut mandiri secara ekonomi. Menarik untuk diperhatikan pada status cerai hidup, bahwa proporsi penduduk berstatus cerai hidup lebih besar pada perempuan dibandingkan laki-laki. Kemandirian perempuan secara ekonomi serta peningkatan kesadaran tentang hak-hak perempuan dalam berumah tangga, seringkali menjadi penyebab keberanian perempuan menggugat cerai.

a. Angka Perkawinan Kasar

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 (tujuh) ayat 1 (satu) dikatakan bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Perkawinan juga merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya tingkat fertilitas/kelahiran, antara lain melalui Panjang dan pendeknya usia subur yang dilalui Pasangan Usia Subur (PUS) yang menentukan banyaknya kelahiran.

Angka Perkawinan Kasar menunjukkan persentase penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk satu tahun tertentu. Perhitungan angka ini adalah menggunakan data banyaknya perkawinan yang terjadi pada waktu tertentu termasuk di dalamnya perkawinan pertama dan perkawinan ulang, jadi bukan banyaknya penduduk yang berstatus kawin. Perhitungan angka ini masih kasar tetapi dapat menunjukkan kondisi besaran penduduk yang kawin di suatu wilayah. Selain itu, indikator ini masih dapat dijadikan dasar untuk mengembangkan pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian, pengembangan pelayanan keluarga dan rumah tangga dan lain-lain. Pada tabel 4.10 dibawah ini angka perkawinan kasar di Provinsi Sulawesi Tengah dengan jumlah sebesar

6.147 (Enam ribu seratus empat puluh tujuh) yang artinya bahwa di Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 dari 1.000 (seribu) penduduk terdapat 2 (dua) orang yang berstatus kawin atau sebanyak 2 (dua) kali terjadi peristiwa perkawinan.

Tabel 4.10.
Angka Perkawinan Kasar

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	JUMLAH PERKAWINAN DALAM 1 TAHUN	ANGKA PERKAWINAN KASAR
KAB. BANGGAI	370.362	176.562	477
KAB. POSO	249.399	118.810	476
KAB. DONGGALA	307.450	147.789	481
KAB. TOLI TOLI	232.301	109.568	472
KAB. BUOL	153.161	70.352	459
KAB. MOROWALI	170.415	79.998	469
KAB. BANGGAI KEPULAUAN	124.332	60.256	485
KAB. PARIGI MOUTONG	452.507	216.304	478
KAB. TOJO UNA UNA	166.790	78.696	472
KAB. SIGI	259.681	130.153	501
KAB. BANGGAI LAUT	74.246	33.883	456
KAB. MOROWALI UTARA	139.535	65.488	469
KOTA PALU	374.779	169.326	452
TOTAL	3.074.958	1.457.185	6.147

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

Jika dilihat dari setiap Kabupaten dan Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Sigi merupakan kabupaten yang memiliki angka perkawinan kasar tertinggi yaitu dengan jumlah sebanyak 501 (Lima ratus satu) dibandingkan dengan Kabupaten dan Kota lain. Adapun angka perkawinan kasar terendah berada di Kota Palu yaitu dengan jumlah sebesar 452 (Empat ratus lima puluh dua).

b. Angka Perkawinan Umum

Angka Perkawinan Umum menunjukkan proporsi penduduk yang berstatus kawin terhadap jumlah penduduk usia 15 (lima belas) tahun keatas pada pertengahan tahun dalam periode tertentu.

Seperti halnya dengan angka perkawinan kasar, angka perkawinan umum digunakan untuk memperhitungkan proporsi penduduk kawin. Namun disini pembaginya adalah penduduk 15 (lima belas) tahun keatas dimana penduduk bersangkutan lebih beresiko kawin. Penduduk berumur kurang dari 15 (lima belas) tahun tidak diikutsertakan sebagai pembagi karena pada umumnya mereka tidak beresiko kawin. Sehingga Angka Perkawinan Umum menunjukkan informasi yang lebih realitas.

Tabel 4.11.
Angka Perkawinan Umum

KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PERKAWINAN DALAM 1 TAHUN	JUMLAH USIA >=15 DALAM PERTENGAHAN TAHUN	ANGKA PERKAWINAN UMUM
7201	KAB. BANGGAI	176.562	283.333	623
7202	KAB. POSO	118.810	196.260	605
7203	KAB. DONGGALA	147.789	226.815	652
7204	KAB. TOLI TOLI	109.568	168.490	650
7205	KAB. BUOL	70.352	108.435	649
7206	KAB. MOROWALI	79.998	123.980	645
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	60.256	93.294	646
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	216.304	343.903	629
7209	KAB. TOJO UNA UNA	78.696	121.939	645
7210	KAB. SIGI	130.153	193.015	674
7211	KAB. BANGGAI LAUT	33.883	53.408	634
7212	KAB. MOROWALI UTARA	65.488	105.906	618
7271	KOTA PALU	169.326	276.340	613
	TOTAL	1.457.185	2.295.118	8.285

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

Tabel 4.11 diatas menunjukkan untuk Provinsi Sulawesi Tengah, angka perkawinan umum dengan jumlah sebesar 8.285 (Delapan ribu dua ratus delapan puluh lima) yang artinya penduduk diatas usia 15 (lima belas) tahun berstatus kawin tanpa melihat urutan perkawinan. Adapun angka perkawinan umum tertinggi berada di Kabupaten Sigi dengan jumlah 674 (Enam ratus tujuh puluh empat) dan yang terendah berada di Kabupaten Poso berjumlah sebesar 605 (Enam ratus lima).

c. Angka Perkawinan menurut Kelompok Umur

Angka Perkawinan Menurut Kelompok Umur adalah angka yang menunjukkan beberapa banyaknya penduduk pada suatu umur tertentu yang berstatus kawin untuk tiap-tiap 1.000 (seribu) penduduk pada kelompok umur yang sama.

Indikator ini berguna untuk perencanaan program-program yang berkaitan dengan peningkatan usia kawin pertama, mempertahankan anak-anak usia sekolah untuk tetap bersekolah dan mengembangkan pelayanan Kesehatan reproduksi bagi remaja.

d. Rata-Rata Umur Kawin Pertama

Rata-rata usia kawin pertama dari penduduk suatu daerah mencerminkan keadaan sosial ekonomi dari daerah tersebut. Perempuan dan laki-laki yang kawin muda biasanya tidak banyak mempunyai alternatif kegiatan lain sehingga mereka menikah pada usia muda dan meninggalkan bangku sekolah.

Umur kawin pertama merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelahiran. Umur kawin pertama mempunyai korelasi negatif dengan tingkat kelahiran seorang perempuan, artinya semakin tua umur kawin pertama perempuan, maka semakin kecil potensi perempuan tersebut untuk melahirkan banyak anak. Hal ini terjadi karena semakin tinggi umur kawin pertama seorang perempuan, maka semakin pendek masa usia subur dan pada akhirnya akan menurunkan tingkat kelahiran perempuan tersebut.

Kegunaan tersedianya indikator rata-rata umur kawin pertama untuk mempermudah penentu kebijakan dan perencanaan pembangunan untuk mengembangkan program pemberdayaan orang muda agar meneruskan sekolah, dan bagi yang terpaksa putus sekolah diberikan Pendidikan keterampilan agar tidak segera memasuki jenjang perkawinan. Program untuk pendewasaan usia perkawinan bagi perempuan juga dapat dikembangkan sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

Pemerintah Sulawesi Tengah diharapkan mampu meningkatkan pendidikan untuk anak terutama wanita, hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan seorang wanita untuk memilih usia yang tepat memulai pernikahan. Wanita dengan pendidikan yang lebih tinggi akan menunda keinginan untuk menikah karena harus menyelesaikan pendidikan dan meneruskan karirnya di dunia kerja. Pemerintah hendaknya meningkatkan akses wanita terhadap pendidikan guna menekan laju pertumbuhan penduduk dengan menunda usia kawin pertama untuk menurunkan angka kelahiran.

Tabel 4.12. dapat dilihat bahwa pada status perkawinan di Sulawesi Tengah untuk status belum kawin tertinggi berada pada Kabupaten Parigi Moutong dengan jumlah 216.370 (Dua ratus enam belas ribu tiga ratus tujuh puluh) jiwa sedangkan yang terendah berada pada Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu 37.551 (Tiga puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh satu) jiwa, untuk status kawin tertinggi berada pada Kabupaten Parigi Moutong dengan jumlah 216.304 (Dua ratus enam belas ribu tiga ratus empat) jiwa sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Banggai Laut dengan jumlah 33.883 (Tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tiga) jiwa, pada status cerai hidup tertinggi berada di Kabupaten Banggai dengan jumlah 6.802 (Enam ribu delapan ratus dua) jiwa sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Banggai Laut yaitu dengan jumlah 770 (Tujuh ratus tujuh puluh) jiwa, dan untuk status cerai hidup tertinggi berada di Kota Palu dengan jumlah 17.126 (Tujuh belas ribu seratus dua puluh enam) jiwa sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Banggai Laut 2.716 (Dua ribu tujuh ratus enam belas) jiwa.

Tabel 4.12.
Proporsi Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Status Kawin

KODE	KABUPATEN/KOTA	STATUS KAWIN								JUMLAH	
		BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI		PERSENTASE	
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
7201	KAB. BANGGAI	171.890	11.60	176.562	12.12	6.802	17.00	15.264	12.62	370.518	11.95
7202	KAB. POSO	118.295	7.98	118.810	8.15	2.610	6.52	9.867	8.16	249.582	8.05
7203	KAB. DONGGALA	147.545	9.96	147.789	10.14	2.727	6.82	11.083	9.17	309.144	9.97
7204	KAB. TOLI TOLI	111.223	7.51	109.568	7.52	2.799	7.00	10.407	8.61	233.997	7.55
7205	KAB. BUOL	77.909	5.26	70.352	4.83	1.509	3.77	5.579	4.61	155.349	5.01
7206	KAB. MOROWALI	88.205	5.95	79.998	5.49	2.472	6.18	4.648	3.84	175.323	5.66
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	57.476	3.88	60.256	4.14	1.870	4.67	5.428	4.49	125.030	4.03
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	216.370	14.60	216.304	14.84	4.522	11.30	15.500	12.82	452.696	14.60
7209	KAB. TOJO UNA UNA	79.310	5.35	78.696	5.40	2.489	6.22	7.251	6.00	167.746	5.41
7210	KAB. SIGI	117.029	7.90	130.153	8.93	3.488	8.72	11.489	9.50	262.159	8.46
7211	KAB. BANGGAI LAUT	37.551	2.53	33.883	2.33	770	1.92	2.716	2.25	74.920	2.42
7212	KAB. MOROWALI UTARA	73.045	4.93	65.488	4.49	1.390	3.47	4.566	3.78	144.489	4.66
7271	KOTA PALU	185.752	12.54	169.326	11.62	6.560	16.40	17.126	14.16	378.764	12.22
	TOTAL	1.481.600	100	1.457.185	100	40.008	100	120.924	100	3.099.717	100

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

e. Angka Perceraian Kasar

Angka Perceraian Kasar menunjukkan jumlah perceraian per 1.000 (Seribu) penduduk terhadap jumlah penduduk keseluruhan pada pertengahan tahun untuk satu tahun. Angka ini berguna untuk mengetahui gambaran sosiologi suatu daerah yang berkaitan dengan tingkat perceraian. Angka perceraian kasar ini merupakan indikator perceraian (cerai hidup) yang sangat sederhana tanpa memperhitungkan umur dan jenis kelamin, bagi daerah-daerah yang belum atau tidak ada pencatatan perkawinan dan perceraian serta jumlah penduduk menurut umur. Maka, indikator ini sangat berguna terutama

dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian maupun program-program pelayanan keluarga.

Tabel 4.13.
Angka Perceraian Kasar

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	JUMLAH PERCERAIAN DALAM 1 TAHUN	ANGKA PERCERAIAN KASAR
KAB. BANGGAI	370.362	22.066	60
KAB. POSO	249.399	12.477	50
KAB. DONGGALA	307.450	13.810	45
KAB. TOLI TOLI	232.301	13.206	57
KAB. BUOL	153.161	7.088	46
KAB. MOROWALI	170.415	7.120	42
KAB. BANGGAI KEPULAUAN	124.332	7.298	59
KAB. PARIGI MOUTONG	452.507	20.022	44
KAB. TOJO UNA UNA	166.790	9.740	58
KAB. SIGI	259.681	14.977	58
KAB. BANGGAI LAUT	74.246	3.486	47
KAB. MOROWALI UTARA	139.535	5.956	43
KOTA PALU	374.779	23.686	63
TOTAL	3.074.958	160.932	671

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

Tabel 4.13. Menjelaskan bahwa pada angka perceraian kasar di Tahun 2022 dengan jumlah perceraian dalam 1 (satu) tahun sebesar 160.392 (Seratus enam puluh ribu Sembilan ratus tiga puluh dua) jiwa. Jumlah ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu Tahun 2021 dengan jumlah 147.144 (Seratus empat puluh tujuh ribu seratus empat puluh empat) jiwa.

Berakhirnya suatu perkawinan selain membawa dampak demografi juga mempunyai dampak sosiologi. Dampak demografi dapat mempengaruhi

kelahiran dalam arti mengurangi kelahiran, sedangkan dampak sosiologi lebih kepada persepsi masyarakat tentang status cerai terutama bagi perempuan.

f. Angka Perceraian Umum

Angka Perceraian Umum menunjukkan penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 (lima belas) tahun ke atas (penduduk yang terkena resiko perceraian) dalam satu tahun.

Tabel 4.14.
Angka Perceraian Umum

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PERCERAIAN DALAM 1 TAHUN	JUMLAH USIA >=15 DALAM PERTENGAHAN TAHUN	ANGKA PERCERAIAN UMUM
KAB. BANGGAI	22.066	283.333	78
KAB. POSO	12.477	196.260	64
KAB. DONGGALA	13.810	226.815	61
KAB. TOLI TOLI	13.206	168.490	78
KAB. BUOL	7.088	108.435	65
KAB. MOROWALI	7.120	123.980	57
KAB. BANGGAI KEPULAUAN	7.298	93.294	78
KAB. PARIGI MOUTONG	20.022	343.903	58
KAB. TOJO UNA UNA	9.740	121.939	80
KAB. SIGI	14.977	193.015	78
KAB. BANGGAI LAUT	3.486	53.408	65
KAB. MOROWALI UTARA	5.956	105.906	56
KOTA PALU	23.686	276.340	86
TOTAL	160.932	2.295.118	70

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

Angka Perceraian Umum penduduk yang berstatus cerai hidup terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (penduduk yang terkena resiko

perceraian) pada satu tahun. Tabel 4.14 diatas, menunjukkan angka perceraian umum di Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 70 (tujuh puluh) kali atau dari 1.000 (seribu) penduduk Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 70 (tujuh puluh) jiwa yang melakukan perceraian.

4.3.3 Keluarga

Informasi tentang jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga, diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi, dan lain sebagainya. Keluarga dapat dibagi menjadi 2 (dua) tipe, yaitu:

- Keluarga Inti yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak kandung, anak angkat maupun adopsi yang belum kawin, atau ayah dengan anak-anak yang belum kawin atau ibu dengan anak-anak yang belum kawin.
- Keluarga Luas adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak baik yang sudah kawin atau belum, cucu, orang tua, mertua maupun kerabat-kerabat yang lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

a. Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

Banyaknya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam satu keluarga, dimana diasumsikan semakin kecil jumlah anggota keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahteraannya. Rata-rata jumlah anggota keluarga biasanya digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga luas menjadi keluarga kecil.

Pada saat sekarang ini sudah mulai muncul adanya keluarga yang terdiri dari 3 (tiga) generasi yaitu generasi orang tua, anak dan menantu dan

cucu atau yang biasa disebut dengan *sandwiches family*, dimana pasangan suami istri harus menanggung orang tua/mertua dan anak-anak mereka sendiri. Persoalan yang muncul adalah bagaimana dengan kesejahteraan mereka, bagaimana dengan beban yang mereka tanggung dan bagaimana sistem pengasuhan baik orang tua maupun anak bisa berlangsung dalam keluarga semacam ini.

Tabel 4.15
Jumlah Keluarga dan Rata-Rata Jumlah Anggota Keluarga

KODE	KABUPATEN/KOTA	DATA KEPENDUDUKAN				RATA-RATA
		JUMLAH PENDUDUK		KEPALA KELUARGA		
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)
7201	KAB. BANGGAI	370.518	11.95	120.279	11.81	3.08
7202	KAB. POSO	249.582	8.05	84.116	8.26	2.96
7203	KAB. DONGGALA	309.144	9.97	98.746	9.70	3.13
7204	KAB. TOLI TOLI	233.997	7.55	75.502	7.42	3.09
7205	KAB. BUOL	155.349	5.01	44.835	4.40	3.46
7206	KAB. MOROWALI	175.323	5.66	65.061	6.39	2.69
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	125.030	4.03	41.746	4.10	2.99
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	452.696	14.60	140.687	13.82	3.21
7209	KAB. TOJO UNA UNA	167.746	5.41	53.996	5.30	3.10
7210	KAB. SIGI	262.159	8.46	90.270	8.87	2.90
7211	KAB. BANGGAI LAUT	74.920	2.42	23.403	2.30	3.20
7212	KAB. MOROWALI UTARA	144.489	4.66	55.474	5.45	2.60
7271	KOTA PALU	378.764	12.22	124.104	12.19	3.05
	TOTAL	3.099.717	100	1.018.219	100	3.04

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

Tabel 4.15 diatas dapat dilihat bahwa, rata-rata jumlah anggota keluarga di Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 3.04 artinya bahwa rata-rata jumlah

anggota keluarga di Provinsi Sulawesi Tengah berkisar antara 3-4 jiwa dan ini merupakan keluarga inti.

b. Hubungan dengan Kepala Keluarga

Hubungan dengan kepala keluarga digunakan untuk melihat banyaknya kepala keluarga menurut jenis kelamin, pola pengaturan tinggal bersama dan pola pengasuhan anak dalam keluarga tersebut. Setiap anggota dalam keluarga mempunyai status hubungan dengan kepala keluarga seperti suami, istri, anak, menantu, cucu, keponakan, orang tua dan mertua, termasuk adanya orang lain yang tinggal bersama seperti pembantu rumah tangga.

Tabel 4.16
Hubungan dengan Kepala Keluarga

STATUS HUBUNGAN KELUARGA	JENIS KELAMIN				JUMLAH	%
	LAKI-LAKI	%	PEREMPUAN	%		
KEPALA KELUARGA	830.507	52	187.712	12	1.018.219	33
SUAMI	34	0	0	0	34	0
ISTRI	0	0	672.063	45	672.063	22
ANAK	730.028	46	618.505	41	1.348.533	44
MENANTU	31	0	42	0	73	0
CUCU	9.882	1	8.048	1	17.930	1
ORANG TUA	1.202	0	4.973	0	6.175	0
MERTUA	509	0	2.500	0	3.009	0
FAMILI LAIN	17.581	1	14.834	1	32.415	1
PEMBANTU	18	0	15	0	33	0
LAINNYA	487	0	746	0	1.233	0
T O T A L	1.590.279	100	1.509.438	100	3.099.717	100

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

Tabel 4.16, menunjukkan bahwa kepala keluarga laki-laki sebanyak 830.507 (Delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh) jiwa, istri sebanyak 672.063 (Enam ratus tujuh puluh dua ribu enam puluh tiga) jiwa, dan terdapat 187.712 (Seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas) kepala keluarga perempuan tanpa bersuami. Hal ini menunjukkan bahwa kepala keluarga perempuan pada umumnya berstatus lajang baik mereka yang belum pernah kawin maupun mereka yang berstatus janda. Perempuan berstatus kepala keluarga ini perlu mendapatkan perhatian lebih, karena pada umumnya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga perempuan mempunyai tingkat kesejahteraan lebih rendah dibandingkan keluarga yang dikepalai oleh laki-laki.

c. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur dan Status Kawin

Informasi tentang Kelompok Umur dari kepala keluarga dan anggota keluarga penting untuk diketahui terutama untuk melakukan analisis kondisi demografi keluarga serta perencanaan kebijakan dasar seperti pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, kemiskinan, dan lain-lain.

Dapat dilihat pada tabel 4.17. Menunjukkan bahwa di Provinsi Sulawesi Tengah proporsi Kepala Keluarga tertinggi berada pada kelompok umur 40-44 tahun yaitu 13 persen dengan jumlah sebanyak 129.572 (Seratus dua puluh Sembilan ribu lima ratus tujuh puluh dua) Jiwa dan proporsi kepala keluarga belum kawin tertinggi berada dikelompok umur 25-29 tahun yaitu 25 persen, proporsi kepala keluarga berdasarkan status kawin dan cerai hidup tertinggi berada dikelompok umur 40-44 tahun yaitu 15 persen untuk status kawin dan 16 persen untuk status cerai hidup, sedangkan proporsi kepala keluarga berdasarkan status cerai mati tertinggi berada dikelompok umur >75 tahun yaitu 18 persen.

Tabel 4.17.
Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Umur dan Status Kawin

KELOMPOK UMUR	KEPALA KELUARGA								JUMLAH	
	BELUM KAWIN		KAWIN		CERAI HIDUP		CERAI MATI			
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
15-19	2.175	2	513	0	17	0	2	0	2.707	0
20-24	20.011	23	18.559	2	637	2	138	0	39.345	4
25-29	21.810	25	59.393	8	2.161	6	500	0	83.864	8
30-34	12.782	14	89.406	11	3.971	10	1.166	1	107.325	11
35-39	7.824	9	100.691	13	4.997	13	2.356	2	115.868	11
40-44	5.904	7	113.105	15	6.036	16	4.527	4	129.572	13
45-49	4.668	5	100.617	13	5.376	14	7.365	7	118.026	12
50-54	4.168	5	93.401	12	4.945	13	11.702	10	114.216	11
55-59	3.040	3	69.956	9	3.604	9	15.602	14	92.202	9
60-64	2.090	2	51.462	7	2.529	7	17.184	15	73.265	7
65-69	1.630	2	36.199	5	1.662	4	17.545	16	57.036	6
70-74	1.029	1	22.844	3	1.042	3	13.882	12	38.797	4
>75	1.233	1	22.830	3	1.069	3	20.576	18	45.708	4
TOTAL	88.364	100	778.976	100	38.046	100	112.545	100	1.017.931	100

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

d. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Jenis Kelamin

Karakteristik kepala keluarga menurut jenis kelamin dapat menunjukkan seberapa banyak perempuan yang menjadi kepala keluarga, bagaimana kecenderungannya dimasa depan dan bagaimana gambaran sosial ekonomi keluarga yang dikepalai oleh seorang perempuan.

Masyarakat Indonesia cenderung menganggap bahwa laki-laki adalah penanggungjawab ekonomi keluarga sekaligus sebagai kepala keluarga. Namun

dalam kenyataannya tidak sedikit perempuan yang menjadi kepala keluarga karena pasangan meninggal, cerai, atau sebab-sebab yang lain.

Penambahan persentase kepala keluarga perempuan tersebut dapat juga menggambarkan tingkat perceraian (baik cerai hidup maupun cerai mati) yang terjadi dan juga dapat menggambarkan salah satu trend gaya hidup moderen.

Tabel 4.18.
Kepala Keluarga Menurut Jenis Kelamin

KODE	KABUPATEN/KOTA	KEPALA KELUARGA				JUMLAH	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		n (jiwa)	%
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%		
7201	KAB. BANGGAI	96.947	11,67	23.332	12,43	120.279	11,81
7202	KAB. POSO	67.866	8,17	16.250	8,66	84.116	8,26
7203	KAB. DONGGALA	81.171	9,77	17.575	9,36	98.746	9,70
7204	KAB. TOLI TOLI	61.085	7,36	14.417	7,68	75.502	7,42
7205	KAB. BUOL	38.207	4,60	6.628	3,53	44.835	4,40
7206	KAB. MOROWALI	54.541	6,57	10.520	5,60	65.061	6,39
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	33.825	4,07	7.921	4,22	41.746	4,10
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	117.551	14,15	23.136	12,33	140.687	13,82
7209	KAB. TOJO UNA UNA	43.814	5,28	10.182	5,42	53.996	5,30
7210	KAB. SIGI	73.584	8,86	16.686	8,89	90.270	8,87
7211	KAB. BANGGAI LAUT	18.961	2,28	4.442	2,37	23.403	2,30
7212	KAB. MOROWALI UTARA	46.057	5,55	9.417	5,02	55.474	5,45
7271	KOTA PALU	96.898	11,67	27.206	14,49	124.104	12,19
	TOTAL	830.507	100	187.712	100	1.018.219	100

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

Tabel 4.18. Diatas menunjukkan bahwa di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 830.507 (Delapan ratus tiga puluh ribu lima ratus tujuh) jiwa Kepala Keluarga yang dikepalai laki-laki sedangkan perempuan yang menjadi kepala keluarga sebanyak 187.712 (Seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua belas) jiwa. Dengan adanya keluarga yang dikepalai seorang perempuan diduga

menggambarkan tingkat perceraian yang terjadi baik cerai hidup maupun cerai mati dan juga menggambarkan gaya hidup modern yakni karena kemandiriannya maka perempuan berani untuk hidup sendiri.

e. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Kawin

Dalam konsep demografi kepala keluarga merupakan seseorang baik laki-laki maupun perempuan, berstatus menikah maupun tidak, yang mempunyai peran, fungsi dan tanggung jawab sebagai kepala keluarga secara ekonomi, sosial maupun psikologi.

Karakteristik kepala keluarga berdasarkan status kawin dapat digunakan untuk melihat jumlah keluarga yang dikepalai oleh lajang maupun mereka yang berstatus cerai baik hidup maupun mati.

Tabel 4.19
Kepala Keluarga Berdasarkan Status Perkawinan

STATUS PERKAWINAN	KEPALA KELUARGA				JUMLAH	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		n (jiwa)	%
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%		
BELUM KAWIN	61.281	7	27.370	15	88.651	9
KAWIN	727.768	88	51.208	27	778.976	77
CERAI HIDUP	14.915	2	23.131	12	38.046	4
CERAI MATI	26.543	3	86.003	46	112.546	11
T O T A L	830.507	100	187.712	100	1.018.219	100

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

Tabel 4.19, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan kepala keluarga di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 berstatus kawin yakni 77 persen dan adanya kepala keluarga yang berstatus belum kawin (lajang) yang besarnya 9 persen, selanjutnya persentase kepala keluarga berstatus cerai (baik cerai hidup maupun cerai mati) sebesar 15 persen.

Jika dikaitkan dengan jenis kelamin terlihat bahwa kepala keluarga yang berstatus kawin didominasi oleh laki-laki 88 persen, sedangkan kepala keluarga perempuan yang berstatus kawin lebih rendah yaitu 27 persen. Selanjutnya, dari tabel tersebut terlihat bahwa persentase kepala keluarga laki-laki yang berstatus belum kawin (lajang) persentasenya lebih rendah yakni 7 persen daripada kepala keluarga perempuan yang berstatus lajang yakni 15 persen.

Apabila diperhatikan lebih lanjut kepala keluarga laki-laki berstatus cerai (cerai hidup dan cerai mati) persentasenya lebih rendah yakni 5 persen daripada kepala keluarga perempuan yang berstatus cerai (cerai hidup dan cerai mati) yakni 58 persen.

f. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan

Pendidikan yang dicapai merupakan salah satu indikator kualitas hidup manusia serta menunjukkan status sosial dan status kesejahteraan seseorang. Semakin tinggi Pendidikan yang dicapai oleh seorang kepala keluarga diharapkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan keluarga.

Apabila dilihat dari tingkat pendidikan, maka kepala keluarga yang mempunyai pendidikan rendah diduga mempunyai pendapatan yang rendah, sehingga diduga mereka tidak mampu memberikan pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya. Biasanya kepala keluarga yang berpendidikan rendah akan bekerja di sektor informal. Untuk itu jenjang Pendidikan yang dicapai oleh kepala keluarga dapat digunakan untuk melihat gambaran kualitas sosial maupun ekonomi keluarga.

Tabel 4.20.
Kepala Keluarga Berdasarkan Pendidikan

PENDIDIKAN TERAKHIR	KEPALA KELUARGA				JUMLAH	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		n(jiwa)	%
	n(jiwa)	%	n(jiwa)	%		
TIDAK/BELUM SEKOLAH	25.409	3	10.418	6	35.827	4
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	26.377	3	10.105	5	36.482	4
TAMAT SD/SEDERAJAT	291.342	35	81.163	43	372.505	37
SLTP/SEDERAJAT	145.779	18	28.344	15	174.123	17
SLTA/SEDERAJAT	260.181	31	40.397	22	300.578	30
DIPLOMA I/II	5.696	1	1.887	1	7.583	1
AKADEMI/DIPLOMA III/SARJANA MUDA	9.066	1	2.897	2	11.963	1
DIPLOMA IV/STRATA I	60.452	7	11.617	6	72.069	7
STRATA II	5.664	1	822	0	6.486	1
STRATA III	541	0	62	0	603	0
T O T A L	830.507	100	187.712	100	1.018.219	100

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

Tabel ini menunjukkan bahwa sebagian besar kepala keluarga yang berpendidikan Tamat SD/Sederajat yaitu sebesar 37 persen disusul SLTA/Sederajat yaitu sebesar 30 persen, dan SLTP/Sederajat sebesar 17 persen. Proporsi kepala keluarga yang berpendidikan DI, DII, DIII hanya sebesar 1 persen, SI sebesar 7 persen, SII sebesar 1 persen dan SIII sebesar 0 persen. Kepala Keluarga yang tidak sekolah persentasenya mencapai 4 persen.

Apabila dilihat dari tingkat pendidikannya, maka kepala keluarga yang mempunyai pendidikan rendah diduga mempunyai pendapatan yang rendah, sehingga diduga mereka tidak mampu memberikan Pendidikan yang tinggi bagi anggota keluarganya. Biasanya kepala keluarga yang berpendidikan rendah akan bekerja di sektor informal.

g. Karakteristik Kepala Keluarga Berdasarkan Status Pekerjaan

Status ekonomi keluarga dapat dilihat dari kegiatan ekonomi kepala keluarga maupun anggota serta seberapa besar sumbangan, mereka terhadap ekonomi keluarga. Oleh sebab itu informasi mengenai kepala keluarga menurut status pekerjaan perlu diketahui untuk perencanaan pelayanan kebutuhan dasar penduduk.

Tabel 4.21.
Kepala Keluarga Berdasarkan Status Pekerjaan

STATUS BEKERJA	KEPALA KELUARGA				JUMLAH	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		n(jiwa)	%
	n(jiwa)	%	n(jiwa)	%		
BEKERJA	774.746	93.29	54.464	29.01	829.210	81.44
BELUM/TIDAK BEKERJA	36.578	4.40	14.672	7.82	51.250	5.03
PELAJAR/MAHASISWA	9.253	1.11	6.184	3.29	15.437	1.52
PENSIUNAN	9.758	1.17	2.556	1.36	12.314	1.21
MENGURUS RUMAH TANGGA	172	0.02	109.836	58.51	110.008	10.80
TOTAL	830.507	100	187.712	100	1.018.219	100

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

Dilihat dari kegiatan ekonomi, bahwa sekitar 81,44 persen kepala keluarga di Provinsi Sulawesi Tengah bekerja. Angka ini lebih tinggi pada kepala keluarga laki-laki dibandingkan kepala keluarga perempuan, ini menunjukkan bahwa akses terhadap pekerjaan untuk perempuan terbatas. Sementara itu, sekitar 5,03 persen kepala keluarga sedang mencari pekerjaan atau belum/tidak bekerja. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan adanya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang tidak bekerja, walaupun persentase mereka kecil, sehingga pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu membuat perencanaan pelayanan kebutuhan dasar

penduduk. Selanjutnya, tabel di atas juga menunjukkan kepala keluarga yang berstatus mengurus rumah tangga, baik laki-laki maupun perempuan yaitu 10,80 persen. Selanjutnya, dari tabel tersebut adanya kepala keluarga yang sudah pensiun.

Sebagian besar kepala keluarga di Provinsi Sulawesi Tengah berstatus bekerja, Proporsi kepala keluarga laki-laki (93,29%) lebih besar dibandingkan kepala keluarga perempuan (29,01%). Hal ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi laki-laki adalah penanggungjawab ekonomi keluarga sehingga lebih banyak yang harus terjun ke pasar kerja, sementara perempuan biasanya hanya berfungsi sebagai ibu rumah tangga yang bertanggungjawab atas terselenggaranya keluarga yang bersangkutan.

Hal perlu menjadi perhatian adanya keluarga yang dikepalai oleh kepala keluarga yang tidak bekerja. Untuk kepala keluarga yang masih berstatus pelajar/mahasiswa, dapat dimungkinkan bahwasanya penduduk itu hidup sendiri atau hidup tidak dengan orang tuanya. Hal ini dapat terjadi mungkin saja dikarenakan hidup merantau.

4.3.4 Penduduk Menurut Karakteristik Sosial

a. Jumlah Penduduk Menurut Pendidikan

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan di suatu provinsi pada waktu tertentu yang disajikan berdasarkan jenis kelamin per Kabupaten/Kota dalam bentuk tabel.

Informasi tentang jumlah penduduk menurut pendidikan ini menunjukkan karakteristik penduduk berdasarkan jenjang pendidikan dan gambaran pencapaian pembangunan pendidikan di suatu Kabupaten/Kota sekaligus kualitas sumber daya manusia.

Tabel 4.22.
Penduduk Berdasarkan Jenis Pendidikan

JENIS PENDIDIKAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		n (jiwa)	%
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%		
TIDAK/BELUM SEKOLAH	330.459	20.78	308.587	20.44	639.046	20.62
BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT	194.391	12.22	179.707	11.91	374.098	12.07
TAMAT SD/SEDERAJAT	369.480	23.23	375.335	24.87	744.815	24.03
SLTP/SEDERAJAT	226.132	14.22	220.130	14.58	446.262	14.40
SLTA/SEDERAJAT	378.767	23.82	307.633	20.38	686.400	22.14
DIPLOMA I/II	6.116	0.38	10.330	0.68	16.446	0.53
AKADEMI I/DIPLOMA III/S.MUDA	10.121	0.64	21.260	1.41	31.381	1.01
DIPLOMA IV/STRATA I	68.376	4.30	81.835	5.42	150.211	4.85
STRATA II	5.882	0.37	4.373	0.29	10.255	0.33
STRATA III	555	0.03	248	0.02	803	0.03
TOTAL	1.590.279	100	1.509.438	100	3.099.717	100

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

Tabel 4.22 diatas terlihat bahwa penduduk Provinsi Sulawesi Tengah 24.03 persen berpendidikan Tamat SD/Sederajat. Presentase penduduk perempuan yang berpendidikan Tamat SD/Sederajat lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk laki-laki yang tamat SD/Sederajat. Hal ini mencerminkan bahwa partisipasi penduduk perempuan untuk bersekolah lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Akan tetapi, untuk tingkat yang lebih tinggi, presentase yang menamatkan lebih rendah.

Pada jenjang Pendidikan Menengah Atas untuk perempuan lebih rendah dibandingkan dengan presentase untuk laki-laki. Akan tetapi, untuk tingkat yang lebih tinggi, persentase yang menamatkan lebih rendah untuk laki-laki dibandingkan untuk perempuan, kecuali jenjang S2 dan S3. Hal ini menunjukkan masih adanya ketimpangan gender dalam hal pendidikan di Provinsi Sulawesi Tengah.

b. Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan

Pada jenjang Pendidikan Tertinggi yang ditamatkan pada tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas), Diploma I/II, Akademi DIII, Diploma IV/SI, SII dan SIII, Kota Palu lebih tinggi persentase yang menamatkan dibandingkan Kabupaten lainnya.

Tabel 4.23.
Penduduk Berdasarkan Jenis Pendidikan Kabupaten/Kota

NO.	KABUPATEN/KOTA	TIDAK/ BELUM SEKOLAH	TIDAK TAMAT SD	TAMAT SD/ SEDERAJAT	SLTP/ SEDERAJAT	SLTA/ SEDERAJAT	DIPLOMA I/II	AKADEMI/ D III/ SARMUD	DIPLOMA IV/SI	SII	SIII	JUMLAH
1	KAB. BANGGAI	68.405	38.365	107.620	55.524	77.612	1.828	3.190	17.047	899	28	370.518
2	KAB. POSO	44.079	23.997	55.903	42.747	66.442	1.484	2.460	11.790	642	38	249.582
3	KAB. DONGGALA	73.756	39.174	82.593	49.835	52.383	1.244	2.606	7.289	233	31	309.144
4	KAB. TOLI TOLI	50.065	27.539	66.388	34.337	40.915	1.159	1.963	11.126	486	19	233.997
5	KAB. BUOL	35.173	28.231	34.267	21.363	27.411	1.095	927	6.714	161	7	155.349
6	KAB. MOROWALI	38.256	17.128	31.768	23.051	52.005	971	2.157	9.687	291	9	175.323
7	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	23.131	13.371	40.225	17.871	22.354	636	1.094	6.135	212	1	125.030
8	KAB. PARIGI MOUTONG	92.567	64.286	130.793	65.149	84.620	1.971	2.240	10.638	421	11	452.696
9	KAB. TOJO UNA UNA	31.432	20.731	48.554	23.889	33.130	1.051	1.946	6.799	211	3	167.746
10	KAB. SIGI	55.125	29.205	68.191	38.362	55.798	1.506	2.621	10.505	789	57	262.159
11	KAB. BANGGAI LAUT	32.609	9.150	11.568	6.797	9.339	300	796	4.210	151	-	74.920
12	KAB. MOROWALI UTARA	26.221	15.249	27.578	20.473	43.978	759	1.695	8.268	256	12	144.489
13	KOTA PALU	68.227	47.672	39.367	46.864	120.413	2.442	7.686	40.003	5.503	587	378.764
	TOTAL	639.046	374.098	744.815	446.262	686.400	16.446	31.381	150.211	10.255	803	3.099.717

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

c. Jumlah Penduduk Menurut Agama

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan agama di suatu kabupaten/kota pada waktu tertentu yang disajikan per Kabupaten/Kota dalam bentuk tabel. Dari tabel ini akan diketahui karakteristik penduduk berdasarkan pemeluk agama (Islam, Kristen, Khatolik, Hindu, Buddha, Khonghucu dan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa).

Informasi tentang jumlah penduduk berdasarkan agama diperlukan untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan serta merencanakan suatu program kegiatan yang berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama.

Dari tabel dibawah ini dapat kita lihat bahwa penduduk yang beragama Islam dengan jumlah sebesar 2.480.867 (Dua juta empat ratus delapan puluh ribu delapan ratus enam puluh tujuh) jiwa. Jumlah ini menunjukkan bahwa penduduk yang beragama Islam lebih mendominasi jumlahnya dibandingkan dengan penduduk yang beragama Kristen, Katholik, Hindu, Buddha, Khonghucu dan kepercayaan lainnya.

Tabel 4.24.
Penduduk Menurut Agama dan Jenis Kelamin

AGAMA	JENIS KELAMIN				JUMLAH	
	LAKI-LAKI		PEREMPUAN		n (jiwa)	%
	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%		
ISLAM	1.254.042	78.86	1.196.825	79.29	2.450.867	79.07
KRISTEN	259.494	16.32	241.987	16.03	501.481	16.18
KATHOLIK	14.904	0.94	13.382	0.89	28.286	0.91
HINDU	57.888	3.64	53.635	3.55	111.523	3.60
BUDDHA	2.136	0.13	2.077	0.14	4.213	0.14
KHONGHUCU	9	0.00	14	0.00	23	0.00
KEPERCAYAAN LAINNYA	1.806	0.11	1.518	0.10	3.324	0.11
TOTAL	1.590.279	100	1.509.438	100	3.099.717	100

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

Tabel 4.25.
Penduduk Menurut Agama Kabupaten/Kota

KODE	KABUPATEN/KOTA	AGAMA						
		ISLAM (JIWA)	KRISTEN (JIWA)	KATHOLI K (JIWA)	HINDU (JIWA)	BUDDHA (JIWA)	KHONGHUC U (JIWA)	KEPERCAYAAN LAINNYA (JIWA)
7201	KAB. BANGGAI	286.764	52.678	5.164	25.498	400	8	6
7202	KAB. POSO	97.850	135.344	2.159	14.205	21	1	2
7203	KAB. DONGGALA	278.987	20.282	435	9.271	151	3	15
7204	KAB. TOLI TOLI	218.400	10.376	823	3.079	1.312	3	4
7205	KAB. BUOL	147.805	3.190	1.762	2.337	255	0	0
7206	KAB. MOROWALI	162.579	6.500	1.111	4.992	100	2	39
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	77.079	43.377	4.507	53	8	5	1
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	371.051	36.716	2.223	42.608	98	0	0
7209	KAB. TOJO UNA UNA	154.835	10.672	258	730	55	0	1196
7210	KAB. SIGI	178.540	82.248	845	423	100	0	3
7211	KAB. BANGGAI LAUT	65.359	6.958	2.562	33	8	0	0
7212	KAB. MOROWALI UTARA	77.529	57.838	3.007	4.039	18	0	2058
7271	KOTA PALU	334.089	35.302	3.430	4.255	1.687	1	0
	TOTAL	2.450.867	501.481	28.286	111.523	4.213	23	3.324
	%	79,07	16,18	0,91	3,60	0,14	0,00	0,11

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

Dari tabel di atas terlihat bahwa 79,07 persen penduduk Provinsi Sulawesi Tengah beragama Islam. Agama kedua yang dianut penduduk Provinsi Sulawesi Tengah adalah Kristen yakni 16,18 persen, selanjutnya 3,60 persen penduduknya beragama Hindu, dan hanya Sebagian kecil yang menganut agama Katholik, Buddha, Konghucu, serta Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

d. Jumlah Penduduk Menurut Kecacatan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan

yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Bagian ini menggambarkan jumlah dan proporsi penduduk berdasarkan jenis kecacatan (Tuna Netra, Tuna Rungu, Tuna Wicara, Tuna Grahita, dan lain-lain) yang disajikan dalam bentuk tabel.

Data ini sangat diperlukan dalam melakukan perencanaan pelayanan yang akan diberikan kepada penduduk dengan kategori khusus.

Tabel 4.26.
Penduduk Menurut Kecacatan dan Jenis Kelamin

NO	JENIS KECACATAN	JENIS KELAMIN				JUMLAH	
		LAKI-LAKI		PEREMPUAN		n (jiwa)	%
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%		
1	FISIK	532	18.06	362	17.97	894	18.02
2	NETRA/BUTA	310	10.52	218	10.82	528	10.65
3	RUNGU/WICARA	438	14.87	335	16.63	773	15.58
4	MENTAL/JIWA	1.176	39.92	700	34.76	1.876	37.82
5	FISIK DAN MENTAL	139	4.72	85	4.22	224	4.52
6	LAINNYA	351	11.91	314	15.59	665	13.41
	T O T A L	2.946	100	2.014	100	4.960	100

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

Dari tabel di atas terlihat bahwa 37.82 persen penduduk Provinsi Sulawesi Tengah mengalami cacat mental dan jiwa, serta menempati urutan kedua yakni 18.02 persen cacat fisik, kemudian cacat ganda (fisik dan mental) menempati urutan paling rendah yakni 4.52 persen.

4.3.5 Kelahiran

Kelahiran merupakan salah satu komponen pertumbuhan penduduk yang bersifat menambah jumlah penduduk. Banyaknya kelahiran membawa konsekuensi pada pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang bayi, dari

pemenuhan gizi, perawatan kesehatan ibu dan anak, dan pada gilirannya membutuhkan fasilitas pendidikan termasuk pemenuhan kesempatan kerja.

Tingkat kelahiran di masa lalu akan mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah kelahiran di masa kini, sehingga pengetahuan tentang kelahiran beserta indikator-indikatornya, termasuk keluarga berencana sangat berguna bagi para penentu kebijakan maupun perencana dalam menyusun program-program pembangunan sosial terutama terkait dengan upaya peningkatan kesejahteraan ibu, anak dan pembangunan keluarga.

a. Jumlah Kelahiran

Jumlah kelahiran didefinisikan sebagai banyaknya kelahiran hidup yang terjadi pada waktu tertentu pada wilayah tertentu.

Informasi tentang jumlah kelahiran bermanfaat untuk perencanaan pembangunan berbagai fasilitas yang dibutuhkan khususnya pengembangan fasilitas kesehatan ibu dan anak, baik untuk masa kini maupun untuk masa yang akan datang. Selain itu, data tentang jumlah kelahiran hidup merupakan dasar untuk perhitungan berbagai indikator kelahiran lainnya.

Dari tabel 4.27 menunjukkan bahwa jumlah kelahiran di Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah adalah 52.368 kelahiran hidup. Jika dilihat menurut Kabupaten, jumlah kelahiran terbesar berada di Kabupaten Parigi Moutong yaitu 7.492 kelahiran hidup diikuti dengan Kota Palu yaitu 7.387 kelahiran hidup sedangkan jumlah kelahiran terkecil berada di Kabupaten Banggai Laut yaitu 1.203 kelahiran hidup diikuti dengan Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu 1.819 kelahiran hidup.

Tabel 4.27.
Jumlah Kelahiran Dalam 1 Tahun

KODE	KABUPATEN/KOTA	JENIS KELAMIN		JUMLAH KELAHIRAN
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
7201	KAB. BANGGAI	3.066	2.676	5.742
7202	KAB. POSO	1.684	1.546	3.230
7203	KAB. DONGGALA	3.023	2.904	5.927
7204	KAB. TOLI TOLI	2.044	1.956	4.000
7205	KAB. BUOL	1.745	1.558	3.303
7206	KAB. MOROWALI	1.708	1.565	3.273
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	913	906	1.819
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	3.986	3.506	7.492
7209	KAB. TOJO UNA UNA	1.419	1.307	2.726
7210	KAB. SIGI	2.102	2.167	4.269
7211	KAB. BANGGAI LAUT	598	605	1.203
7212	KAB. MOROWALI UTARA	1.038	959	1.997
7271	KOTA PALU	3.678	3.709	7.387
TOTAL		27.004	25.364	52.368

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2022

b. Angka Kelahiran Kasar

Angka Kelahiran Kasar menunjukkan banyaknya kelahiran di suatu wilayah pada tahun tertentu per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama. Angka kelahiran kasar merupakan ukuran yang paling mudah dihitung tetapi masih kasar karena tidak memperhitungkan jumlah penduduk yang beresiko melahirkan (laki-laki, anak-anak, dan orang tua). Angka kelahiran kasar ini berguna untuk mengetahui tingkat kelahiran yang terjadi di suatu daerah tertentu pada tahun tertentu.

Tabel 4.28
Jumlah Angka Kelahiran Kasar

KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KELAHIRAN	JUMLAH PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN	CBR
7201	KAB. BANGGAI	5.742	370.362	16
7202	KAB. POSO	3.230	249.399	13
7203	KAB. DONGGALA	5.927	307.450	19
7204	KAB. TOLITOLI	4.000	232.301	17
7205	KAB. BUOL	3.303	153.161	22
7206	KAB. MOROWALI	3.273	170.415	19
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	1.819	124.332	15
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	7.492	452.507	17
7209	KAB. TOJO UNA-UNA	2.726	166.790	16
7210	KAB. SIGI	4.269	259.681	16
7211	KAB. BANGGAI LAUT	1.203	74.246	16
7212	KAB. MOROWALI UTARA	1.997	139.535	14
7271	KOTA PALU	7.387	374.779	20
T O T A L		52.368	3.074.958	17

Sumber : Dinas Kesehatan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah

4.3 Kesehatan

1. Kelahiran

Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai kekayaan alam dan budaya yang telah dimanfaatkan sejak dulu kala. Pelayanan Kesehatan Tradisional adalah salah satu warisan budaya yang saat ini sedang dikembangkan dan sejalan dengan adanya tren “Gaya Hidup Kembali ke Alam” yang semakin diminati oleh kalangan masyarakat. Pelayanan kesehatan tradisional saat ini dapat dimanfaatkan dalam pemeliharaan kesehatan secara mandiri dalam bentuk asuhan mandiri kesehatan tradisional ramuan dengan pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA) dan keterampilan dengan akupresur.

Angka kelahiran adalah bilangan yang menunjukkan jumlah bayi yang lahir hidup dari setiap 1.000 penduduk dalam satu tahun. Umumnya, angka kelahiran dihitung dengan jumlah kelahiran hidup per seribu penduduk setiap tahunnya.

Tabel 4.29.
Angka Kelahiran menurut Jenis Kelamin Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022

KODE	KABUPATEN/KOTA	PUSKESMAS	JUMLAH KELAHIRAN								
			LAKI-LAKI			PEREMPUAN			LAKI-LAKI + PEREMPUAN		
			HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI	HIDUP	MATI	HIDUP + MATI
7201	KAB. BANGGAI	27	3.066	50	3.116	2.676	20	2.696	5.742	70	5.812
7202	KAB. POSO	24	1.684	23	1.707	1.546	15	1.561	3.230	38	3.268
7203	KAB. DONGGALA	18	3.023	46	3.069	2.904	31	2.935	5.927	77	6.004
7204	KAB. TOLI TOLI	15	2.044	33	2.077	1.956	15	1.971	4.000	48	4.048
7205	KAB. BUOL	13	1.745	25	1.770	1.558	29	1.587	3.303	54	3.357
7206	KAB. MOROWALI	11	1.708	21	1.729	1.565	23	1.588	3.273	44	3.317
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	14	913	15	928	906	27	933	1.819	42	1.861
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	23	3.986	67	4.053	3.506	52	3.558	7.492	119	7.611
7209	KAB. TOJO UNA UNA	16	1.419	18	1.437	1.307	13	1.320	2.726	31	2.757
7210	KAB. SIGI	19	2.102	9	2.111	2.167	6	2.173	4.269	15	4.284
7211	KAB. BANGGAI LAUT	10	598	20	618	605	13	618	1.203	33	1.236
7212	KAB. MOROWALI UTARA	14	1.038	14	1.052	959	5	964	1.997	19	2.016
7271	KOTA PALU	14	3.678	7	3.685	3.709	4	3.713	7.387	11	7.398
JUMLAH (KAB/KOTA)		218	27.004	348	27.352	25.364	253	25.617	52.368	601	52.969
ANGKA LAHIR MATI PER 1.000 KELAHIRAN (DILAPORKAN)					12.7			9.9			11.3

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2022

2. Kematian

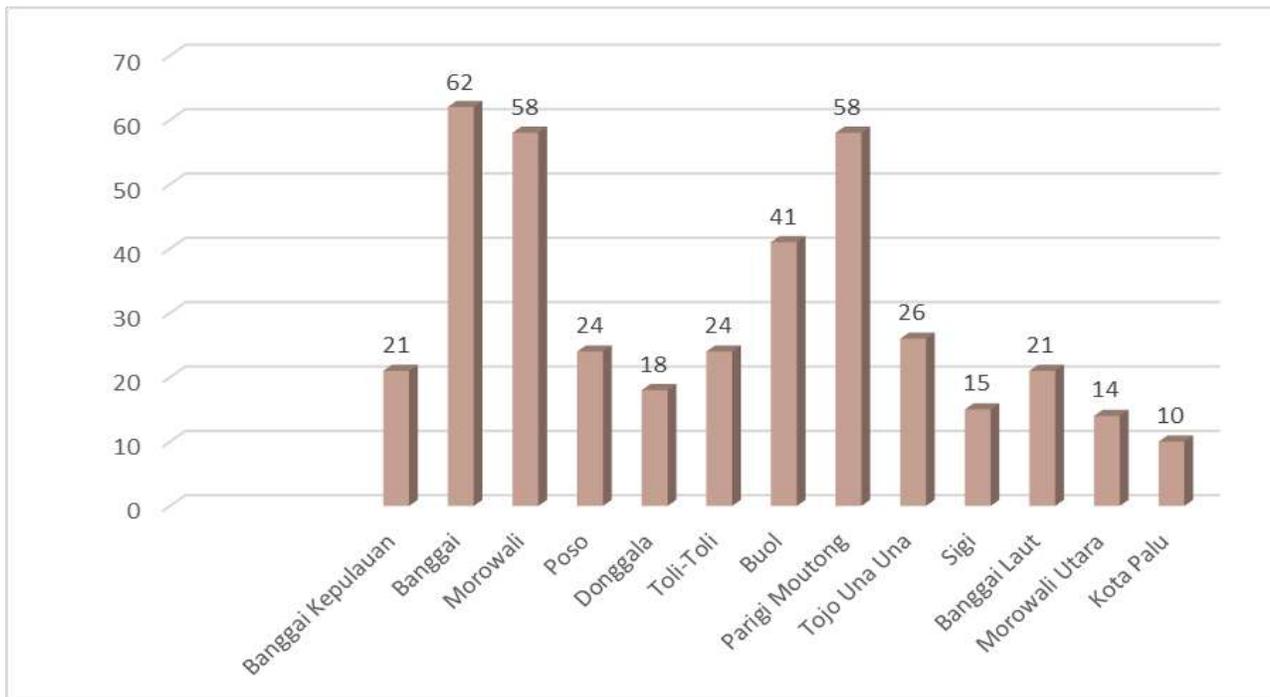
Angka kematian Neonatal, Bayi dan Balita merupakan indikator utama untuk mengetahui tingkat kesehatan suatu masyarakat atau negara. Hal ini disebabkan bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat tinggal orang tua bayi dan status sosial orang tua bayi. Selain itu,

fasilitas kesehatan seperti dokter dan rumah sakit yang kurang memadai untuk penanganan penyakit pada Neonatal/Bayi/Balita juga dapat menyebabkan tingginya tingkat kematian Neonatal/Bayi/Balita.

a. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai umur 1 (satu) tahun pada waktu tertentu per 1000 kelahiran hidup pada periode waktu yang sama.

Grafik 4.1.
Jumlah Kematian Bayi menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2022



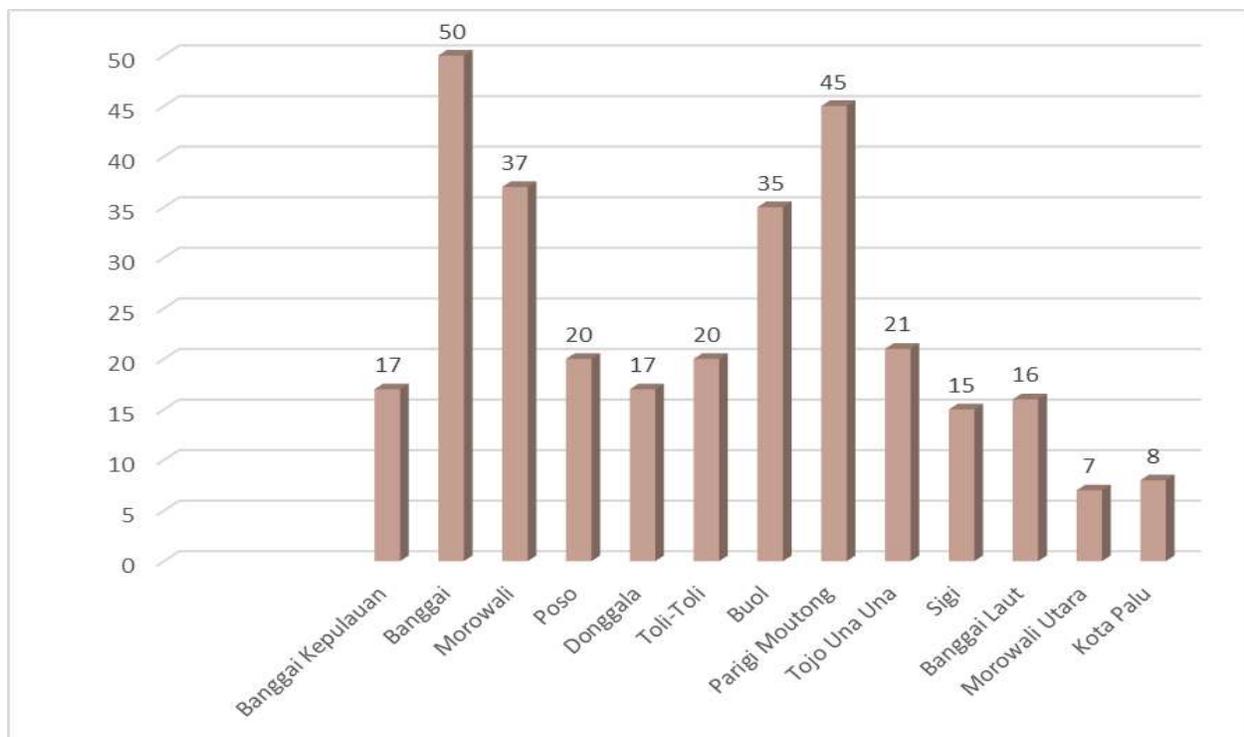
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2022

Pada tahun 2022, kematian bayi tertinggi terdapat di Kabupaten Banggai dengan jumlah kasus kematian 62 orang selanjutnya diikuti oleh Kab. Morowali dan Kab. Parigi Moutong 58 orang dan kematian bayi terendah di Kota Palu sebanyak 10 orang.

b. Angka Kematian Neonatal

Hasil pelaporan berasal dari data rutin yang dikumpulkan oleh Kab/Kota menunjukkan penurunan di setiap tahun meskipun belum terlalu signifikan. Dengan berbagai kendala yang dihadapi di lapangan diharapkan jumlah kematian neonatus, bayi, dan anak balita diharapkan akan terus mengalami penurunan.

Grafik 4.2.
Jumlah Kematian Neonatal menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2022



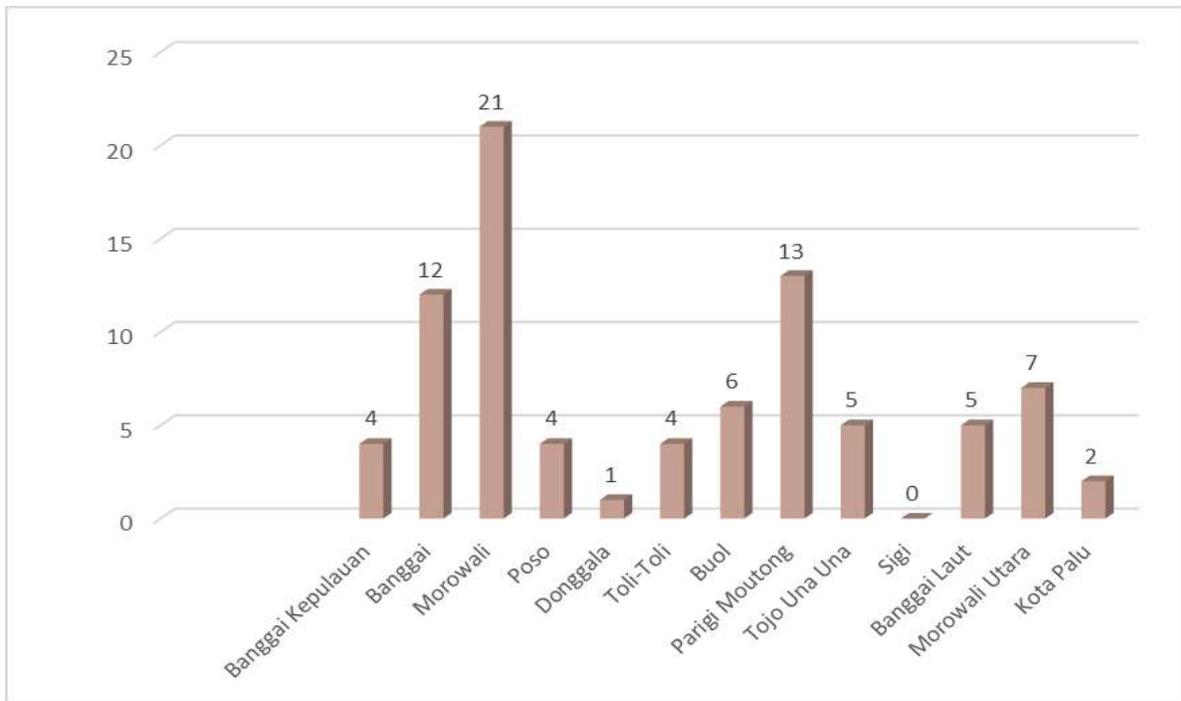
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2022

Grafik di atas menunjukkan bahwa kematian Neonatal di Kabupaten Banggai menjadi yang tertinggi yaitu 50 jiwa dibandingkan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah, sedangkan Kabupaten Morowali Utara menjadi yang paling rendah diantara Kabupaten/Kota lainnya yaitu dengan jumlah 7 jiwa.

c. Angka Kematian Post-Neonatal

Kematian Post Neonatal adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun yang disebabkan oleh faktor-faktor yang bertalian dengan pengaruh lingkungan luar (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Kematian yang terjadi pada bayi yang berumur 1 bulan sampai dengan kurang dari 1 tahun per 1000 kelahiran hidup selama 1 tahun.

Grafik 4.3.
Jumlah Kematian Post-Neonatal menurut Kabupaten/Kota Tahun 2022



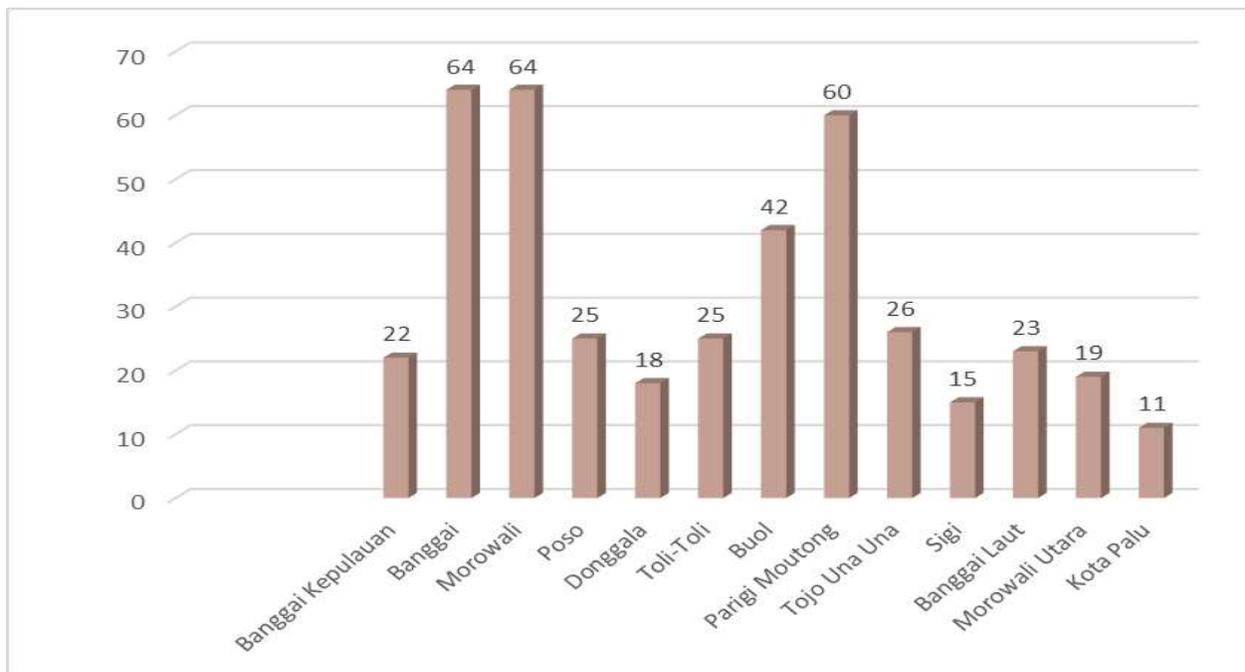
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2022

Pada grafik diatas menunjukkan bahwa jumlah kematian Post-Neonatal tertinggi di Provinsi Sulawesi Tengah berada di Kabupaten Morowali yaitu 21 jiwa dan Kabupaten Parigi Moutong yaitu 13 jiwa serta Kabupaten Banggai yaitu 12 jiwa sedangkan jumlah kematian post-neonatal terendah berada di Kabupaten Sigi yaitu 0 jiwa.

d. Angka Kematian Balita

Kematian Balita yaitu kematian yang terjadi antara rentang usia 0–59 bulan dapat dikatakan terkait langsung dengan target kelangsungan hidup anak dan merefleksikan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan anak-anak bertempat tinggal termasuk pemeliharaan kesehatannya. Angka Kematian Balita kerap dipakai untuk mengidentifikasi kesulitan ekonomi penduduk.

Grafik 4.4.
Jumlah Kematian Balita menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2022



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2022

Pada grafik di atas menunjukkan situasi kematian usia 0–59 bulan di Sulawesi Tengah tertinggi adalah kematian balita yang terjadi di Kabupaten Banggai dan Kabupaten Morowali masing-masing 64 jiwa serta Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 60 jiwa dan kematian Balita terendah berada di Kota Palu sebanyak 11 jiwa. Berdasarkan analisa yang ada bahwa pola asuh dan tingkat

pendidikan keluarga yang mempunyai balita merupakan salah satu penyebab kematian tersebut.

Upaya kesehatan anak yang dimaksud dalam Permenkes Nomor 25 Tahun 2014 dilakukan melalui pelayanan kesehatan janin dalam kandungan, kesehatan bayi baru lahir, kesehatan bayi, anak balita, dan prasekolah, kesehatan anak usia sekolah dan remaja, dan perlindungan kesehatan anak. Sejalan dengan RPJMN Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024 mengenai upaya kesehatan anak disajikan dalam indikator kesehatan anak yang meliputi:

- a. Pelayanan bayi baru lahir
- b. Pelayanan Balita yang dipantau pertumbuhan perkembangan dalam hal ini akan dipisahkan melalui pelayanan kesehatan bayi dan pelayanan kesehatan anak balita
- c. Persentase Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Remaja

Persentase Puskesmas yang membina 20% sekolah yang akan dikuskan pada pelayanan UKS/M khusus kegiatan pelayanan Kesehatan.

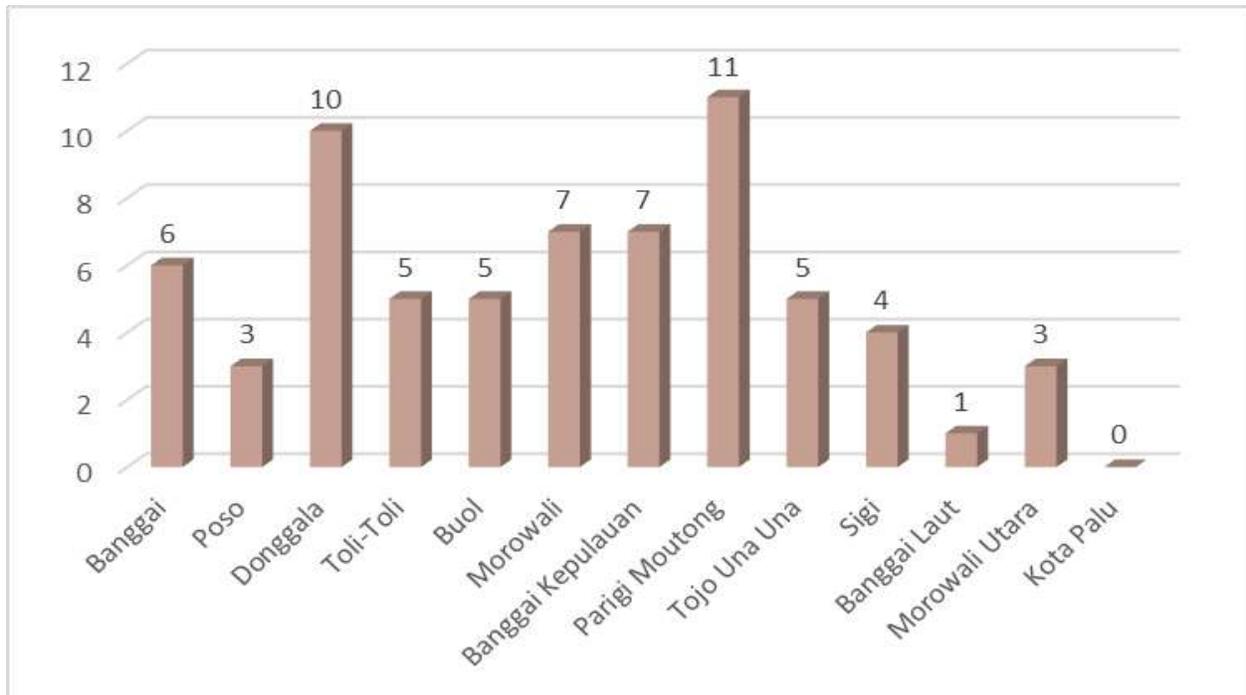
e. Kematian Ibu

Kematian ibu adalah kematian seorang wanita yang terjadi selama kehamilan sampai dengan 42 hari setelah berakhirnya kehamilan tanpa memperhatikan lama dan tempat terjadinya kehamilan, yang disebabkan oleh kehamilannya atau penanganan kehamilannya, tetapi bukan karena kecelakaan dan bunuh diri.

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah Jumlah Kematian Ibu di suatu wilayah pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah Kelahiran Hidup di wilayah dan pada kurun waktu yang sama dikali 100.000.

Grafik berikut di bawah ini menggambarkan Jumlah Angka Kematian Ibu di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

Grafik 4.5
Jumlah Kematian Ibu Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022



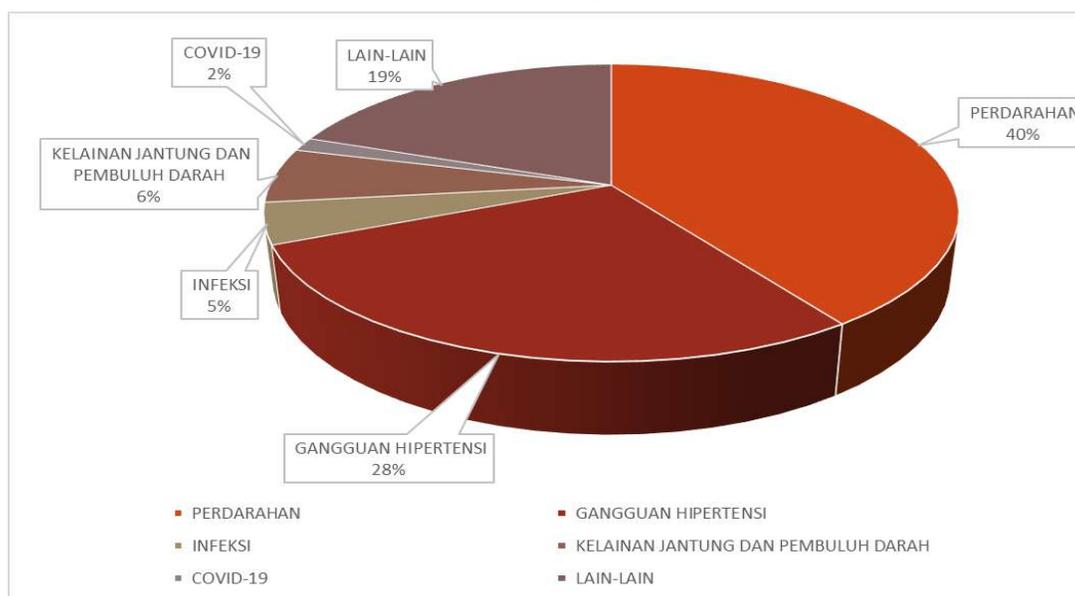
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2022.

Jumlah kematian ibu di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 adalah sebanyak 67 kasus kematian, jumlah tertinggi berada di Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 11 kasus dan di Kabupaten Donggala sebanyak 10 kasus sedangkan jumlah kematian Ibu yang terendah berada di Kota Palu yaitu 0 kasus dan di Kabupaten Banggai Laut sebanyak 1 kasus. Adapun Beberapa faktor penyebab kematian ibu adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya pelaksanaan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K),
2. Kemitraan Bidan dan Dukun, Rumah Tunggu Kelahiran (RTK),
3. Masih adanya pengaruh sosial budaya di masyarakat serta masih kurangnya dukungan dan komitmen dari lintas sektor,

4. Masih adanya persalinan di Non Faskes, berhubung masih kurangnya sarana dan prasarana di beberapa Fasilitas Kesehatan lainnya, kondisi Geografis daerah,
5. Pelaksanaan ANC secara Integerasi dengan lintas program.

Grafik 4.6
Jumlah Kematian Ibu Berdasarkan Penyebab di Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2022.

Penyebab utama kematian ibu masih disebabkan Pendarahan yaitu 40%, gangguan Hipertensi dalam kehamilan (HDK) yaitu 28%, penyebab kelainan jantung dan pembuluh darah yaitu 6%, penyebab infeksi yaitu 5% dan penyebab covid-19 yaitu 2%. Adapun kematian ibu oleh sebab lain-lainnya seperti TB Paru, Dispepsia, Emboli, Ileus, Gagal ginjal, Leukimia, HIV, Kehamilan mola, Kehamilan Ektopik Terganggu (KET), Sespek thyroid, Malaria dan Post Ascites yaitu 19%.

4.3.1 Pendidikan

1. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) adalah perbandingan jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis dengan huruf latin serta mengerti kalimat sederhana. Kemampuan penduduk berkomunikasi secara lisan dan tertulis menunjukkan kemampuan penduduk untuk menyerap informasi dan berbagai media, hal ini dapat digunakan untuk melihat potensi intelektual masyarakat dan dapat masuk dalam dunia pekerjaan sekaligus dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan.

Tabel 4.30.
Angka Melek Huruf Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2020-2022

KODE	KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE PENDUDUK MELEK HURUF LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN USIA 15 - 24 TAHUN	PERSENTASE PENDUDUK MELEK HURUF LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN USIA 15 - 55 TAHUN
		2022%	2022%
7201	KAB. BANGGAI	100.00	98.50
7202	KAB. POSO	100.00	100.00
7203	KAB. DONGGALA	100.00	99.80
7204	KAB. TOLI TOLI	100.00	99.65
7205	KAB. BUOL	100.00	99.70
7206	KAB. MOROWALI	100.00	100.00
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	100.00	99.65
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	100.00	98.84
7209	KAB. TOJO UNA UNA	100.00	98.85
7210	KAB. SIGI	100.00	97.96
7211	KAB. BANGGAI LAUT	100.00	100.00
7212	KAB. MOROWALI UTARA	100.00	97.77
7271	KOTA PALU	100.00	99.98
	SULAWESI TENGAH	100.00	99.28

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2022

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah jumlah siswa berapapun umurnya, yang sudah sekolah ditingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur sekolah yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK ini menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum disuatu tingkat pendidikan, dan merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk umur sekolah dimasing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 4.31.
Data Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang SMA Sederajat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2022

KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PERSENTASE			
		PESERTA DIDIK KESELURUHAN			
		SMA	SMK	SLB	PAKET C
7201	KAB. BANGGAI	93.00	42.68	1.72	9.57
7202	KAB. POSO	80.09	47.38	1.60	3.01
7203	KAB. DONGGALA	86.78	36.81	1.82	14.49
7204	KAB. TOLI TOLI	82.50	60.87	1.55	16.27
7205	KAB. BUOL	86.53	51.00	1.08	10.36
7206	KAB. MOROWALI	84.88	38.85	2.32	18.83
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	79.10	47.37	1.36	27.99
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	85.00	32.87	1.25	27.65
7209	KAB. TOJO UNA UNA	75.96	51.17	1.29	19.25
7210	KAB. SIGI	93.68	32.18	3.17	25.70
7211	KAB. BANGGAI LAUT	71.26	66.61	1.71	23.54
7212	KAB. MOROWALI UTARA	77.57	53.03	1.98	20.09
7271	KOTA PALU	64.79	62.91	3.76	6.04
	SULAWESI TENGAH	80.96	47.34	1.92	15.13

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2022

Keterangan :

SMA = Sekolah Menengah Atas

SMK = Sekolah Menengah Kejuruan

SLB = Murid Keterbelakangan Mental Usia 16-18 Tahun

Paket C = Program Pendidikan Non Formal Setara dengan SMA

Tabel 4.33 diatas, menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar SMA sederajat Provinsi Sulawesi Tengah yang tertinggi persentasenya yaitu pada SMA dengan jumlah persentase 80.96 persen disusul dengan SMK dengan jumlah persentase 47.34 persen, disusul Paket C dengan jumlah persentase 15.13 persen dan untuk SLB dengan jumlah persentase 1.92 persen.

3. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah presentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan tingkat pendidikannya dari jumlah penduduk diusia yang sama. APM menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu seperti APK, APM juga merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah disetiap tingkat pendidikan. Tetapi jika dibandingkan APK, APM merupakan indikator daya serap yang lebih baik karena APM melihat partisipasi penduduk kelompok usia standar dijenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut.

Tabel 4.32. Menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Murni SMA Sederajat Provinsi Sulawesi Tengah yang tertinggi persentasenya yaitu pada SLB dengan jumlah persentase 38.75 persen, disusul dengan SMA dengan jumlah persentase 38.57 persen, disusul SMK dan Paket C dengan jumlah persentase 22.81 persen.

Tabel 4.32
Data Angka Partisipasi Murni (APM) Jenjang SMA
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020-2022

KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PERSENTASE			
		PESERTA DIDIK KESELURUHAN			
		SMA	SMK	SLB	PAKET C
7201	KAB. BANGGAI	46.30	21.59	27.93	1.73
7202	KAB. POSO	46.60	28.98	40.98	1.82
7203	KAB. DONGGALA	39.33	16.67	54.76	2.46
7204	KAB. TOLI TOLI	27.36	20.26	27.52	1.80
7205	KAB. BUOL	45.67	24.93	50.00	1.28
7206	KAB. MOROWALI	52.01	24.45	48.51	3.41
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	40.47	23.96	67.30	3.99
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	36.83	14.75	28.44	3.28
7209	KAB. TOJO UNA UNA	28.86	19.91	40.00	1.81
7210	KAB. SIGI	37.47	12.69	48.42	2.18
7211	KAB. BANGGAI LAUT	22.59	22.74	25.80	1.67
7212	KAB. MOROWALI UTARA	28.86	21.69	15.15	1.79
7271	KOTA PALU	41.70	41.42	32.74	1.33
	SULAWESI TENGAH	38.57	22.81	38.75	22.81

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2022

Keterangan :

SMA = Sekolah Menengah Atas

SMK = Sekolah Menengah Kejuruan

SLB = Murid Keterbelakangan Mental Usia 16-18 Tahun

Paket C = Program Pendidikan Non Formal Setara dengan SMA

4. Angka Penduduk Putus Sekolah

Dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak

mendapat pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi seni dan budaya, untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Kemiskinan karena tingkat pendidikan orang tua rendah merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan keterlantaran pemenuhan hak anak dalam bidang pendidikan formal sehingga anak mengalami putus sekolah.

Ketidakmampuan ekonomi keluarga dalam menopang biaya pendidikan yang berdampak terhadap masalah psikologi anak sehingga anak tidak bisa bersosialisasi dengan baik dalam pergaulan dengan teman sekolahnya selain itu adalah karena pengaruh teman sehingga ikut-ikutan diajak bermain seperti *play station* sampai akhirnya sering membolos dan tidak naik kelas, prestasi di sekolah menurun dan malu pergi kembali ke sekolah. Anak yang kena sanksi karena mangkir sekolah sehingga kena *Drop Out*.

Keadaan status ekonomi keluarga, dalam keluarga miskin cenderung timbul berbagai masalah yang berkaitan dengan pembiayaan hidup anak, sehingga anak sering dilibatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga akibatnya merasa terbebani dengan masalah ekonomi ini dapat mengganggu kegiatan belajar dan kesulitan mengikuti pelajaran.

Kurangnya perhatian orang tua cenderung akan menimbulkan berbagai masalah. Makin besar anak maka perhatian orang tua makin diperlukan, dengan cara variasi dan sesuai kemampuan. Salah satu penyebab kenakalan anak adalah kurangnya perhatian orang tua, hubungan keluarga tidak harmonis dapat berupa perceraian orang tua, hubungan antar keluarga tidak saling peduli, keadaan ini merupakan dasar anak mengalami permasalahan yang serius dan hambatan dalam pendidikannya sehingga mengakibatkan anak mengalami putus sekolah.

Pendidikan dasar wajib yang dipilih Indonesia adalah 9 tahun yaitu pendidikan SD dan SMP, apabila dilihat dari umur mereka yang wajib sekolah adalah 7–15 tahun. Pendidikan merupakan hak yang sangat fundamental bagi anak. Hak yang wajib dipenuhi dengan kerjasama dari orang tua masyarakat dan pemerintah namun tidaklah mudah untuk merealisasikan

pendidikan khususnya menuntaskan wajib belajar 9 tahun, karena pada kenyataannya masih banyak angka putus sekolah.

Tabel 4.33.
Jumlah Putus Sekolah Jenjang Sekolah Dasar (SD) menurut Jenis Kelamin dan Status Sekolah tiap Kab/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2022

KODE	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI			PEREMPUAN			LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN		
		NEGERI	SWASTA	JUMLAH	NEGERI	SWASTA	JUMLAH	NEGERI	SWASTA	JUMLAH
7201	KAB. BANGGAI	7	1	8	10	2	12	17	3	20
7202	KAB. POSO	2	0	2	1	1	2	3	1	4
7203	KAB. DONGGALA	52	2	54	45	1	46	97	3	100
7204	KAB. TOLI TOLI	11	0	11	7	0	7	18	0	18
7205	KAB. BUOL	12	0	12	2	0	2	14	0	14
7206	KAB. MOROWALI	13	0	13	5	0	5	18	0	18
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	4	0	4	2	0	2	6	0	6
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	40	0	40	30	0	30	70	0	70
7209	KAB. TOJO UNA UNA	11	0	11	10	0	10	21	0	21
7210	KAB. SIGI	22	5	27	22	6	28	44	11	55
7211	KAB. BANGGAI LAUT	2	0	2	1	0	1	3	0	3
7212	KAB. MOROWALI UTARA	3	0	3	4	0	4	7	0	7
7271	KOTA PALU	4	1	5	2	3	5	6	4	10
	SULAWESI TENGAH	183	9	192	141	13	154	324	22	346

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2022

Jumlah siswa putus sekolah SD (Sekolah Dasar) sebanyak 346 orang. Terdiri dari 324 siswa putus sekolah dari SD Negeri dan 22 siswa putus sekolah dari SD Swasta.

Tabel 4.34.
Jumlah Putus Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) menurut Jenis Kelamin dan Tingkat tiap Kab/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2022

KODE	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI				PEREMPUAN				LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN			
		VII	VIII	IX	JUMLAH	VII	VIII	IX	JUMLAH	VII	VIII	IX	JUMLAH
7201	KAB. BANGGAI	0	3	2	5	1	4	1	6	1	7	3	11
7202	KAB. POSO	0	3	7	10	0	0	4	4	0	3	11	14
7203	KAB. DONGGALA	1	0	7	8	2	4	6	12	3	4	13	20
7204	KAB. TOLI TOLI	0	0	1	1	1	1	1	3	1	1	2	4
7205	KAB. BUOL	1	3	15	19	1	2	3	6	2	5	18	25
7206	KAB. MOROWALI	1	0	1	2	0	0	2	2	1	0	3	4
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	3	4	9	16	0	0	6	6	3	4	15	22
7209	KAB. TOJO UNA UNA	3	1	8	12	2	0	1	3	5	1	9	15
7210	KAB. SIGI	0	0	1	1	0	3	0	3	0	3	1	4
7211	KAB. BANGGAI LAUT	0	1	4	5	1	2	0	3	1	3	4	8
7212	KAB. MOROWALI UTARA	1	0	0	1	1	0	0	1	2	0	0	2
7271	KOTA PALU	2	4	9	15	1	0	9	10	3	4	18	25
	SULAWESI TENGAH	13	19	64	96	10	16	33	59	23	35	97	155

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2022

Jumlah siswa putus Sekolah (SMP) sebanyak 155 orang, terdiri dari 23 siswa putus sekolah kelas VII, 35 siswa putus sekolah kelas VIII dan 97 siswa putus sekolah kelas IX.

Faktor yang menjadi penyebab anak mengalami putus sekolah, diantaranya yang berasal dari dalam diri anak putus sekolah disebabkan karena malas untuk pergi sekolah karena merasa minder, tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekolahnya, sering dicemoohkan karena tidak mampu membayar kewajiban biaya sekolah.

Tabel 4.35
Jumlah Putus Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) menurut
Jenis Kelamin dan Tingkat tiap Kab/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2022

KODE	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI				PEREMPUAN				LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN			
		X	XI	XII	JUMLAH	X	XI	XII	JUMLAH	X	XI	XII	JUMLAH
7201	KAB. BANGGAI	1	1	12	14	2	1	7	10	3	2	19	24
7202	KAB. POSO	0	0	3	3	1	0	1	2	1	0	4	5
7203	KAB. DONGGALA	0	1	2	3	0	4	3	7	0	5	5	10
7204	KAB. TOLI TOLI	1	2	0	3	0	2	2	4	1	4	2	7
7205	KAB. BUOL	3	0	1	4	0	4	8	12	3	4	9	16
7206	KAB. MOROWALI	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	0	3	1	4	0	0	3	3	0	3	4	7
7209	KAB. TOJO UNA UNA	1	0	3	4	0	0	0	0	1	0	3	4
7210	KAB. SIGI	1	0	0	1	0	2	3	5	1	2	3	6
7211	KAB. BANGGAI LAUT	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	2
7212	KAB. MOROWALI UTARA	0	0	3	3	0	2	6	8	0	2	9	11
7271	KOTA PALU	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1
	SULAWESI TENGAH	8	8	25	41	3	15	35	53	11	23	60	94

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2022

Jumlah siswa putus sekolah SMA sebanyak 94 orang, terdiri dari 11 siswa putus sekolah kelas X, 23 siswa putus sekolah kelas XI dan 60 siswa putus sekolah kelas XII.

Adapun faktor penyebab anak putus sekolah salah satunya yaitu rendahnya minat atau kemauan anak untuk bersekolah, sekolah dianggap tidak menarik, ketidakmampuan dalam mengikuti pelajaran dan juga ekonomi keluarga maupun kurangnya perhatian dari orang tua.

Tabel 4.36
Jumlah Putus Sekolah Jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
menurut Jenis Kelamin dan Tingkat tiap Kab/Kota
Se-Sulawesi Tengah Tahun 2022

KODE	KABUPATEN/KOTA	LAKI-LAKI				PEREMPUAN				LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN			
		X	XI	XII	JUMLAH	X	XI	XII	JUMLAH	X	XI	XII	JUMLAH
7201	KAB. BANGGAI	2	0	0	2	1	0	0	1	3	0	0	3
7202	KAB. POSO	1	1	0	2	0	1	0	1	1	2	0	3
7203	KAB. DONGGALA	1	0	0	1	0	0	5	5	1	0	5	6
7204	KAB. TOLI TOLI	1	2	8	11	0	1	7	8	1	3	15	19
7205	KAB. BUOL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7206	KAB. MOROWALI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	1	0	0	1	0	1	3	4	1	1	3	5
7209	KAB. TOJO UNA UNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7210	KAB. SIGI	1	1	0	2	3	0	0	3	4	1	0	5
7211	KAB. BANGGAI LAUT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7212	KAB. MOROWALI UTARA	0	2	0	2	0	0	2	2	0	2	2	4
7271	KOTA PALU	8	4	11	23	4	4	6	14	12	8	17	37
SULAWESI TENGAH		15	10	19	44	8	7	23	38	23	17	42	82

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2022

Jumlah siswa putus sekolah SMK sebanyak 82 orang, terdiri dari 23 siswa putus sekolah kelas X, 17 siswa putus sekolah kelas XI dan 42 siswa putus sekolah kelas XII.

Faktor lain penyebab anak putus sekolah juga disebabkan karena menikah, bekerja, kecanduan game online, jarak sekolah yang jauh, keterbatasan angkutan daerah, kurangnya sosialisasi pentingnya pendidikan dan sulitnya medan untuk mencapai kesekolah.

4.3.2 Ekonomi

Pengertian tenaga kerja (*manpower*) adalah seluruh penduduk dalam usia kerja (berusia 15 tahun atau lebih) yang potensial dapat memproduksi barang dan jasa. Sedangkan angkatan kerja adalah bagian dari penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panen atau cuti, ataupun juga tenaga kerja yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sedang mencari kerja, atau yang sedang mempersiapkan suatu usaha, atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, ataupun juga yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Tenaga kerja dan angkatan kerja dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam usia produktif yang sedang bekerja dan tergolong pada Angkatan kerja. Sedangkan Angkatan kerja merupakan penduduk dalam usia produktif yang terdiri dari tenaga kerja, sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Angkatan kerja juga artinya penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Menurut ketentuan pemerintah Indonesia, penduduk yang sudah memasuki usia kerja adalah mereka yang berusia minimal 15 tahun sampai 65 tahun. Namun, tidak semua penduduk yang memasuki usia tadi disebut angkatan kerja. Sebab penduduk yang tidak aktif dalam kegiatan ekonomi tidak termasuk dalam kelompok angkatan kerja, seperti ibu rumah tangga, pelajar, dan mahasiswa, serta penerima pendapatan (pensiunan). Pembagian usia angkatan kerja dan bukan angkatan kerja Selain jumlah penduduk, pertumbuhan angkatan kerja dipengaruhi pula oleh struktur penduduk berdasarkan: jenis kelamin, usia penduduk, dan tingkat pendidikan. Makin banyak komposisi jumlah penduduk laki-laki dalam suatu negara, semakin tinggi pula angkatan kerja di negara itu.

Tenaga kerja dan angkatan kerja dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja adalah penduduk dalam usia produktif yang sedang bekerja dan tergolong pada angkatan kerja. Sedangkan angkatan kerja merupakan penduduk dalam usia produktif yang terdiri dari tenaga kerja, sementara tidak bekerja, dan pengangguran

Tabel 4.37.
Jumlah Data Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2022

NO	URAIAN (DESCRIPTION)	INFORMASI
1	Jumlah dan Proporsi Tenaga Kerja	Proporsi Tenaga Kerja 1. SD ke bawah : 662.790 Jiwa 2. SMP : 262.880 Jiwa 3. SMA : 350.540 Jiwa 4. SMK : 99.850 Jiwa 5. Diploma I/II/III : 30.610 Jiwa 6. Universitas : 179.650 Jiwa
2	Jumlah dan Proporsi Penduduk Bekerja dan Menganggur	Jumlah Penduduk Beke : 1.586.320 Jiwa Jumlah Penduduk Menganggur : 49.150 Jiwa (TPT = 3.00%)
3	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	69.99% Laki-Laki : 85.83 % Perempuan : 53.71 %
4	Jumlah dan Proporsi Penduduk yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan	Formal : 754.710 Jiwa (47.58 %) Informal : 831.610 Jiwa (52.42 %)

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2022

4.3.3 Sosial

1. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penyandang masalah kesejahteraan sosial adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan

yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar.

Hambatan, kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial maupun perubahan lingkungan (secara mendadak) yang kurang mendukung atau menguntungkan. Saat ini tercatat ada 26 jenis PMKS dengan batasan pengertian dan kriteria sebagai berikut :

1. Anak Balita Terlantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
2. Anak Terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan dan atau tidak mampu melaksanakan kewajibannya sehingga kebutuhan anak baik dan jasmani, rohani maupun sosialnya tidak terpenuhi. Anak terlantar seorang anak berusia 5 (lima) sampai 18 (delapan belas) tahun yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah seorang anak yang berusia 6 (enam) sampai 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 1) yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana; 2) yang menjadi korban tindak pidana atau melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
4. Anak Jalanan adalah seorang anak yang berusia 5-18 tahun, dan anak yang bekerja atau dipekerjakan di jalanan, dan/ atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

5. Anak dengan Kedisabilitasan adalah seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
6. Anak yang menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah Kekerasan pada anak dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari penelantaran atau pengabaian anak, kekerasan verbal, kekerasan psikologis, kekerasan fisik, kekerasan seksual, hingga eksploitasi dan penjualan anak. Kekerasan pada anak bisa terjadi di rumah, sekolah, maupun dalam komunitas masyarakat.
7. Anak yang memerlukan Perlakuan Khusus adalah anak usia 0-18 tahun dalam situasi darurat, anak korban perdagangan/penculikan, anak korban kekerasan baik fisik dan /atau mental, anak korban eksploitasi, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi serta dari komunitas adat terpencil, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psiktropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA), serta anak yang terinfeksi HIV/AIDS.
8. Lanjut Usia Telantar adalah seseorang berusia 60 tahun atau lebih yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
9. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, dan penyandang disabilitas fisik dan mental.

10. Tuna Susila (WTS) adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
11. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
12. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dengan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
13. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara mengais langsung dan pendaurulang barang-barang bekas.
14. Kelompok Minoritas/Waria adalah individu atau kelompok yang tidak dominan dengan ciri khas bangsa, suku bangsa, agama atau bahasa tertentu yang berbeda dari mayoritas penduduk seperti waria, gay dan lesbian.
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai atau dalam 3 bulan segera mengakhiri masa hukuman atau masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah terinfeksi HIV dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

17. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan NAPZA karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan NAPZA.
18. Korban Trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. (Undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang).
19. Korban Tindak Kekerasan (KTK) adalah orang (baik individu, keluarga maupun kelompok) yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat dari penelantaran, perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi dan bentuk kekerasan lainnya maupun orang yang berada dalam situasi yang membahayakan dirinya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial seperti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pengusiran (deportasi), ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat kerja baru atau di negara tempatnya bekerja, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi sosial.
21. Korban Bencana Alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
22. Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa berusia 18-59 tahun belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
24. Fakir Miskin adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi kemanusiaan.
25. Keluarga bermasalah sosial psikologis Adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar
26. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok orang atau masyarakat yang hidup dalam kesatuan – kesatuan sosial kecil yang bersifat lokal dan terpencil, dan masih sangat terikat pada sumber daya alam dan habitatnya secara sosial budaya terasing dan terbelakang dibanding dengan masyarakat Indonesia pada umumnya, sehingga memerlukan pemberdayaan dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam arti luas. Pada tabel di bawah dapat dilihat jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Tabel 4.38.
Rekapitulasi Data Populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2022

NO	URAIAN	SATUAN	JUMLAH PMKS
1	ANAK BALITA TERLANTAR	JIWA	62.869
2	ANAK TERLANTAR	JIWA	355.497
3	ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	JIWA	124
4	ANAK JALANAN	JIWA	0
5	ANAK DENGAN KEDISSABILITAS	JIWA	2.254
6	ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK KEKERASAN ATAU DIPERLAKUKAN SALAH	JIWA	0
7	ANAK YANG MEMELUKAN PERLAKUAN KHUSUS	JIWA	0
8	LANJUT USIA TERLANTAR	JIWA	113.827
9	PENYANDANG DISABILITAS	JIWA	13.605
10	TUNA SUSILA (WTS)	JIWA	148
11	GELANDANGAN	JIWA	98
12	PENGEMIS	JIWA	0
13	PEMULUNG	JIWA	0
14	KELOMPOK MINORITAS / WARIA	JIWA	206
15	BEKAS WARGA BINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN	JIWA	1548
16	ORANG DENGAN HIV/AIDS (ODHA)	JIWA	118
17	KORBAN PENYALAHGUNAAN NAPZA	JIWA	442
18	KORBAN TRAFFICING	JIWA	130
19	KORBAN TINDAK KEKERASAN (KTK)	JIWA	507
20	PEKERJA MIGRAN BERMASALAH SOSIAL	JIWA	0
21	KORBAN BENCANA ALAM	JIWA	6.108
22	KORBAN BENCANA SOSIAL	JIWA	598
23	PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI	JIWA	0
24	FAKIR MISKIN	JIWA	1.757.555
25	KELUARGA BERMASALAH SOSIAL PSIKOLOGIS	JIWA	0
		JIWA	79.793
26	KOMUNITAS ADAT TERPENCIL	KK	16.472
T O T A L			2.411.899

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2022

2. Proporsi Penduduk Penyandang Cacat

Difabel atau disabilitas adalah istilah yang meliputi gangguan, keterbatasan aktivitas, dan pembatasan partisipasi. Gangguan adalah sebuah masalah pada fungsi tubuh atau strukturnya. Suatu pembatasan kegiatan adalah kesulitan yang dihadapi oleh individu dalam melaksanakan tugas atau tindakan, sedangkan pembatasan partisipasi merupakan masalah yang dialami oleh individu dalam keterlibatan dalam situasi kehidupan. Jadi disabilitas adalah sebuah fenomena kompleks, yang mencerminkan interaksi antara ciri dari tubuh seseorang dan ciri dari masyarakat tempat ia tinggal.

Tabel 4.39.

Rekap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Penyandang Disabilitas Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Ragam Disabilitas

KODE	KABUPATEN/KOTA	Tuna daksa/ cacat tubuh	Tuna netra/ buta	Tuna rungu	Tuna wicara	Tuna rungu & wicara	Tuna netra & cacat tubuh	Tuna netra, rungu, & wicara	Tuna rungu, wicara, & cacat tubuh	Tuna rungu, wicara, netra, & cacat tubuh	Cacat mental retardasi	Mantan penderita gangguan jiwa	Cacat fisik & mental	JUMLAH DISABILITAS
7201	BANGGAI	524	428	258	159	69	66	22	41	36	243	105	263	2.214
7202	POSO	487	202	176	173	94	45	18	38	23	236	83	206	1.781
7203	DONGGALA	398	284	141	133	63	60	16	30	41	197	139	190	1.692
7204	TOLITOLI	302	187	120	100	46	37	10	25	12	112	40	144	1.135
7205	BUOL	259	204	144	76	40	45	17	23	18	114	53	224	1.217
7206	MOROWALI	128	105	41	51	17	22	9	7	11	84	25	83	583
7207	BANGGAI KEPULAUAN	231	201	136	93	38	37	4	16	14	129	38	136	1.073
7208	PARIGI MOUTONG	565	372	198	236	92	64	26	39	57	270	126	279	2.324
7209	TOJO UNA-UNA	254	138	73	64	33	19	7	18	12	102	48	111	879
7210	SIGI	325	215	165	149	70	49	27	37	22	136	87	193	1.475
7211	BANGGAI LAUT	89	47	44	27	11	3	-	3	3	49	10	29	315
7212	MOROWALI UTARA	172	100	64	54	35	27	9	18	11	97	37	110	734
7271	KOTA PALU	284	113	35	76	33	13	10	20	15	125	51	95	870
	JUMLAH	4.018	2.596	1.595	1.391	641	487	175	315	275	1.894	842	2.063	16.292

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2022

Informasi tentang penyandang disabilitas berguna untuk pengambilan kebijakan dalam penyediaan akses atau fasilitas umum bagi para penyandang disabilitas. Angka penyandang disabilitas dapat menunjukkan banyaknya penduduk Provinsi Sulawesi Tengah yang menyandang disabilitas atau kecacatan. Berdasarkan pada tabel 4.47 angka penyandang disabilitas di atas, terlihat bahwa banyaknya penduduk Provinsi Sulawesi Tengah yang menyandang disabilitas sebanyak 16.292 (Enam belas ribu dua ratus Sembilan puluh dua) jiwa. Angka ini berbeda dengan angka penyandang disabilitas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sulawesi Tengah. Jumlah penduduk yang menyandang disabilitas tergolong sedikit dibandingkan dengan jumlah penduduk 3.099.717. Penyandang disabilitas terbanyak berada di Kabupaten Parigi Moutong yaitu sebanyak 2.324 (Dua ribu tiga ratus dua puluh empat) jiwa dari jumlah penduduk sebanyak 452.696 jiwa, sedangkan terendah di Kabupaten Banggai Laut sebanyak 315 (Tiga ratus lima belas) jiwa dari jumlah penduduk 74.920 jiwa.

3. Proporsi Penduduk Miskin Penerima Askeskin

Kemiskinan adalah kondisi keterbatasan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak seperti keterbatasan dalam pendapatan, keterampilan, kondisi kesehatan, penguasaan asset ekonomi ataupun akses informasi. Pengukuran ini bersifat materi atau pendekatan moneter. Pengukuran dengan pendekatan moneter dapat dilakukan dengan menggunakan data pengeluaran sebagai pendekatan pendapatan rumah tangga. Kemudian data pengeluaran ini diperbandingkan dengan suatu batas nilai tukar rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Batas ini sering disebut sebagai garis kemiskinan. Penduduk yang pengeluarannya lebih kecil daripada garis kemiskinan ini disebut penduduk miskin.

Tabel 4.40.
Rekap Data Peserta Jaminan Kesehatan Nasional
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

KODE	KABUPATEN/KOTA	PESERTA JKN	
		PBI APBN	PBI PROVINSI
7201	BANGGAI	112.128	6.038
7202	POSO	140.711	301
7203	DONGGALA	168.671	842
7204	TOLITOLI	102.362	1.398
7205	BUOL	82.587	1.366
7206	MOROWALI	55.041	123
7207	BANGGAI KEPULAUAN	56.961	3.082
7208	PARIGI MOUTONG	258.202	1.646
7209	TOJO UNA-UNA	87.481	1.865
7210	SIGI	108.230	4.448
7211	BANGGAI LAUT	37.837	3.715
7212	MOROWALI UTARA	51.874	368
7271	KOTA PALU	99.493	637
TOTAL		1.361.578	25.829

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2022

Keterangan :
 JKN = Jaminan Kesehatan Nasional
 PBI = Penerima Bantuan Iuran

Salah satu indikator keberhasilan penentasan kemiskinan adalah terpenuhinya akses penduduk miskin untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Pembiayaan kesehatan penduduk miskin biasanya dipenuhi melalui asuransi kesehatan bagi penduduk miskin/jaminan kesehatan bagi penduduk miskin.

Indikator penduduk miskin berguna untuk Menyusun suatu program kegiatan di dalam meningkatkan pelayanan bagi penduduk miskin seperti pelayanan kesehatan.

4.4 MOBILITAS PENDUDUK

Mobilitas penduduk selama ini belum memperoleh perhatian bagi pemerintah. Pada kenyataannya mobilitas penduduk mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mempengaruhi laju pertumbuhan dan struktur penduduk di suatu wilayah. Selain itu mobilitas penduduk juga mempunyai peran terhadap pengembangan wilayah, pembangunan sosial ekonomi dan budaya diwilayah yang bersangkutan.

Mobilitas Penduduk Permanen (Migrasi) adalah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administrasi (migrasi internal) atau batas politik/Negara (migrasi internasional) atau dengan cara migrasi diartikan perpindahan permanen dari suatu daerah ke daerah lain, yang terjadi karena adanya perbedaan kondisi kedua daerah tersebut. Perbedaan terbesar yang mendorong terjadinya migrasi adalah kondisi ekonomi dan non ekonomi. Migrasi juga dipengaruhi oleh daya dorong suatu daerah da daya tarik daerah lainnya. Daya dorong menyebabkan orang pergi ke daerah lain, seperti perkembangan industri, perdagangan, pendidikan, perumahan dan transportasi, dengan kata lain suatu daerah mempunyai daya tarik jika suatu wilayah mampu atau dianggap mampu menyediakan fasilitas dan sumber penghidupan penduduk, baik bagi penduduk wilayah itu sendiri maupun penduduk disekitarnya dan daerah-daerah lain. Kondisi ini dimanti oleh penduduk daerah lain yang berharap dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya untuk memberikan jaminan kehidupan.

Pada sisi lain, setiap daerah mempunyai faktor pendorong yang dapat menyebabkan sejumlah penduduknya migrasi keluar daerah. Faktor pendorong itu antara lain kesempatan kerja yang terbatas jumlah dan jenisnya, sarana dan

prasarana pendidikan yang kurang memadai, fasilitas perumahan dan kondisi lingkungan yang kurang baik.

Adapun beberapa faktor non-ekonomis yang mempengaruhi keinginan seseorang melakukan migrasi adalah :

1. Faktor-faktor sosial, termasuk keinginan para migrant untuk melepaskan dari kendala-kendala tradisional yang terkandung dalam organisasi-organisasi sosial yang sebelumnya mengekang mereka;
2. Faktor-faktor fisik, termasuk pengaruh iklim dan bencana meteorologist, banjir dan kekeringan;
3. Faktor-faktor demografi, termasuk penurunan tingkat kematian yang kemudian mempercepat laju pertumbuhan penduduk suatu tempat;
4. Faktor-faktor kultural, termasuk pembinaan kelestarian hubungan keluarga besar yang berada pada tempat tujuan migrasi;
5. Faktor-faktor komunikasi, termasuk kualitas seluruh sarana transportasi, system pendidikan yang cenderung berorientasi pada kehidupan kota dan dampak-dampak modernisasi yang ditimbulkan oleh media massa atau media elektronik.

Tujuan perpindahan penduduk keluar dari suatu daerah atau yang disebut Migrasi Keluar adalah Kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kota besar lainnya, Karena kota besar dianggap dapat menyediakan lapangan pekerjaan baik sektor formal maupun non formal lebih banyak dan beragam.

BAB V

KEPEMILIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Dokumen Kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan /Perceraian wajib dimiliki oleh penduduk Indonesia. Dokumen kependudukan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Kepemilikan dokumen ini sekain mempunyai kekuatan legal, juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Sementara

Dokumen Kependudukan merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Indonesia. Dokumen Kependudukan seperti KTP, Kartu keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Akta Perkawinan/Perceraian yang wajib dimiliki oleh penduduk Indonesia. Dokumen Kependudukan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara perdata bagi pemiliknya. Seperti akta kelahiran, yang menunjukkan hubungan perdata dari pemilik akta dengan orang tuanya, akta kematian juga menunjukkan hubungan perdata dengan ahli waris, demikian pula dokumen – dokumen dan akta – akta yang lain.

Kepemilikan dokumen selain mempunyai kekuatan legal, juga dapat digunakan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari - hari. Semenetera bagi pemerintah, kepemilikan dokumen kependudukan digunakan untuk keperluan kegiatan pengadministrasian penduduk berdasarkan hak legalnya serta, untuk memperkuat database penduduk serta pelayanan publik.

Namun demikian, karena pemberian dokumen ini menganut stesel aktif dimana penduduk harus melaporkan dan mengurus sendiri dokumen kependudukan mereka, maka kesadaran penduduk, akses ketempat pelayanan, kualitas pelayanan serta kualitas informasi menjadi satu hal penting untuk meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen melalui pendaftaran penduduk

dan pencatatan sipil. Selain itu meskipun stesel aktif, pemerintah seharusnya mencari upaya untuk mempermudah pelayanan terutama bagi penduduk yang baik fisik, ekonomi maupun sosial. Mendekatkan tempat-tempat pelayanan menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan cakupan pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil.

5.1 Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

Kartu Keluarga adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Kartu Keluarga merupakan salah satu dari beberapa dokumen kependudukan yang bersifat wajib dimiliki oleh setiap keluarga, Kartu Keluarga menunjukkan hubungan kekerabatan antara Kepala Keluarga dengan anggota keluarganya. Untuk menghindari kepala keluarga ganda, maka perempuan bisa menjadi keluarga karena status perkawinannya janda maupun karena menjadi istri kedua, ketiga, maupun keempat dari seorang laki-laki, sedangkan suaminya menjadi kepala keluarga hanya disalah satu istri sesuai dengan kesepakatan di keluarga tersebut atau berdasarkan buku nikah.

Seorang Kepala Keluarga bertanggung jawab terhadap anggota keluarga. Kartu Keluarga (KK) merupakan kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status kegiatan, status pekerjaan, status kecacatan dan lain sebagainya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 Tahun 2019 tentang Tanda Tangan Elektronik. Untuk itu, penandatanganan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga dan akta-akta menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE), Penandatanganan ini sah dan sudah melewati prosedur verifikasi dan tidak diperlukan legalisir untuk fotocopy dokumen kependudukannya. Hal tersebut dikarenakan pengesahan dokumen kependudukan untuk dapat melihat dokumen kependudukan dapat menggunakan *QR Code* pada dokumen tersebut.

Tabel. 5.1.
Jumlah dan Persentase Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)

KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH MEMILIKI KK	JUMLAH KK BELUM MEMILIKI	JUMLAH (KK)	JUMLAH PERSENTASE
7201	KAB. BANGGAI	106.505	13.774	120.279	88.55
7202	KAB. POSO	68.004	16.112	84.116	80.85
7203	KAB. DONGGALA	86.754	11.992	98.746	87.86
7204	KAB. TOLI TOLI	69.744	5.758	75.502	92.37
7205	KAB. BUOL	41.381	3.454	44.835	92.30
7206	KAB. MOROWALI	23.345	41.716	65.061	35.88
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	36.472	5.274	41.746	87.37
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	119.638	21.049	140.687	85.04
7209	KAB. TOJO UNA UNA	49.567	4.429	53.996	91.80
7210	KAB. SIGI	80.505	9.765	90.270	89.18
7211	KAB. BANGGAI LAUT	22.175	1.228	23.403	94.75
7212	KAB. MOROWALI UTARA	48.995	6.479	55.474	88.32
7271	KOTA PALU	44.485	79.619	124.104	35.84
	TOTAL	797.570	220.649	1.018.219	78.33

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

Tabel 5.1. diatas menunjukkan bahwa di Provinsi Sulawesi Tengah jumlah keluarga yang sudah memiliki dokumen Kartu Keluarga sebanyak 797.570, sedangkan yang belum memiliki dokumen Kartu Keluarga sebanyak 220.649. Adapun daerah dengan jumlah yang memiliki dokumen kartu keluarga terbanyak terdapat di Kabupaten Parigi Moutong sedangkan yang terendah terdapat di Kabupaten Banggai Laut.

5.2 Kepemilikan KTP-Elektronik (KTP-el)

Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan salah satu identitas legal bagi penduduk yang menjadi bukti bahwa orang tersebut diakui sebagai penduduk di suatu wilayah administrasi di Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013, KTP wajib dimiliki oleh setiap penduduk Indonesia yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun keatas atau mereka yang berumur dibawah 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah pernah kawin, dalam profil ini disebut penduduk wajib KTP. Dengan memiliki KTP penduduk dapat dengan mudah mengurus semua yang berkaitan dengan legalitas serta memperoleh pelayanan sosial dan ekonomi dasar lainnya, meliputi urusan perbankan, mengurus sertifikat tanah, mengurus perkawinan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Berikut tabel yang menyajikan jumlah penduduk menurut kepemilikan KTP.

Tabel. 5.2
Jumlah dan Persentase Kepemilikan KTP-el

KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH WAJIB KTP	JUMLAH PEREKAMAN	JUMLAH PENCETAKAN	JUMLAH PERSENTASE
7201	KAB. BANGGAI	370.518	274.864	256.473	253.966	68.54
7202	KAB. POSO	249.582	190.957	160.816	159.648	63.97
7203	KAB. DONGGALA	309.144	221.150	210.946	209.982	67.92
7204	KAB. TOLI TOLI	233.997	164.904	160.314	159.406	68.12
7205	KAB. BUOL	155.349	106.041	102.750	102.449	65.95
7206	KAB. MOROWALI	175.323	124.088	121.513	120.905	68.96
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	125.030	90.703	88.224	87.557	70.03
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	452.696	329.747	305.876	302.174	66.75
7209	KAB. TOJO UNA UNA	167.746	118.726	115.617	115.189	68.67
7210	KAB. SIGI	262.159	190.197	184.979	184.082	70.22
7211	KAB. BANGGAI LAUT	74.920	52.375	51.434	50.912	67.96
7212	KAB. MOROWALI UTARA	144.489	107.351	105.026	104.241	72.14
7271	KOTA PALU	378.764	271.536	264.821	264.502	69.83
	TOTAL	3.099.717	2.242.639	2.128.789	2.115.013	68.23

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

Tabel 5.2 di atas menunjukkan bahwa tingkat persentase kepemilikan dokumen kependudukan KTP-el tertinggi berada pada Kabupaten Morowali Utara yaitu sebesar 72.14 persen sedangkan tingkat persentase terendah berada pada Kabupaten Poso yaitu sebesar 63.97 persen.

5.3 Kepemilikan Akta

Undang-undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam ketentuan pasal 1 angka 15 menyebutkan bahwa Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Pada pasal 68, kutipan akta pencatatan sipil meliputi (1) Kelahiran; (2) Kematian; (3) Perkawinan; (4) Perceraian; (5) Pengakuan Anak; dan (6) Pengesahan Anak.

5.3.1 Akta Kelahiran

Akta Kelahiran merupakan bukti legal hubungan keperdataan seorang anak dengan ayah dan ibunya. Dalam akta tersebut dijelaskan tentang siapa nama orang tua baik ayah maupun ibunya, jika seorang ibu melahirkan tanpa ayah atau status perkawinannya tidak terdaftar, maka dalam akta kelahiran hanya akan tercantum nama ibunya, sehingga dalam hal ini si anak hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya saja. Akta kelahiran sangat penting dimiliki oleh seorang anak karena digunakan pada saat mengurus pendidikan atau mengurus dokumen lainnya seperti pasport.

Tabel 5.3
Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran

KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	MEMILIKI AKTA LAHIR	BELUM MEMILIKI AKTA LAHIR	JUMLAH PERSENTASE
7201	KAB. BANGGAI	370.518	82.859	287.659	22.36
7202	KAB. POSO	249.582	59.331	190.251	23.77
7203	KAB. DONGGALA	309.144	86.390	222.754	27.94
7204	KAB. TOLI TOLI	233.997	71.834	162.163	30.70
7205	KAB. BUOL	155.349	48.472	106.877	31.20
7206	KAB. MOROWALI	175.323	52.256	123.067	29.81
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	125.030	30.710	94.320	24.56
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	452.696	124.522	328.174	27.51
7209	KAB. TOJO UNA UNA	167.746	51.138	116.608	30.49
7210	KAB. SIGI	262.159	66.985	195.174	25.55
7211	KAB. BANGGAI LAUT	74.920	23797	51.123	31.76
7212	KAB. MOROWALI UTARA	144.489	38.813	105.676	26.86
7271	KOTA PALU	378.764	108.102	270.662	28.54
	TOTAL	3.099.717	845.209	2.254.508	27.27

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

Tabel 5.3 diatas menunjukkan bahwa tingkat persentase kepemilikan akta kelahiran tertinggi berada di Kabupaten Banggai Laut yaitu sebesar 31.76 persen diikuti dengan Kabupaten Buol yaitu sebesar 31.20 persen sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Banggai yaitu sebesar 22.36 persen diikuti dengan Kabupaten Poso 23.77 persen

Tabel 5.4
Jumlah dan Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Berdasarkan Jumlah Anak 0-17 Tahun

KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH ANAK 0-17 TAHUN (JIWA)	MEMILIKI AKTA LAHIR	BELUM MEMILIKI AKTA LAHIR	JUMLAH PERSENTASE
7201	KAB. BANGGAI	102.573	82.859	287.659	80.78
7202	KAB. POSO	63.087	59.331	190.251	94.05
7203	KAB. DONGGALA	94.777	86.390	222.754	91.15
7204	KAB. TOLI TOLI	73.664	71.834	162.163	97.52
7205	KAB. BUOL	52.568	48.472	106.877	92.21
7206	KAB. MOROWALI	53.871	52.256	123.067	97.00
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	36.801	30.710	94.320	83.45
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	131.990	124.522	328.174	94.34
7209	KAB. TOJO UNA UNA	52.292	51.138	116.608	97.79
7210	KAB. SIGI	77.200	66.985	195.174	86.77
7211	KAB. BANGGAI LAUT	24.043	23797	51.123	98.98
7212	KAB. MOROWALI UTARA	39.695	38.813	105.676	97.78
7271	KOTA PALU	113.959	108.102	270.662	94.86
	T O T A L	916.520	845.209	2.254.508	92.22

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

Tabel 5.4 menunjukkan bahwa tingkat persentase kepemilikan akta kelahiran berdasarkan jumlah anak 0-17 Tahun tertinggi berada di Kabupaten Banggai Laut yaitu sebesar 98.98 persen diikuti dengan Kabupaten Morowali Utara 97.78 persen sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Banggai sebesar 80.78 diikuti dengan Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar 83.45 persen.

5.3.2 Akta Perkawinan

Akta Perkawinan merupakan identitas atas penduduk yang berstatus kawin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akta perkawinan memberikan kekuatan hukum atas ikatan yang sah antara laki-laki dan

perempuan dalam membentuk ikatan keluarga dengan seluruh hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa tiap-tiap peristiwa perkawinan harus dicatat. Bagi yang melakukan perkawinan secara Agama Islam, akan dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan bagi yang beragama Katholik, Kristen Budha, Hindu, dilakukan Pencatatan pada Kantor Catatan Sipil setempat. Dalam perkawinan pembuatan akta sangatlah penting, dikarenakan akta perkawinan merupakan identitas penduduk yang telah berstatus kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 5.5
Kepemilikan Akta Perkawinan

KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	STATUS KAWIN	MEMILIKI AKTA	TIDAK MEMILIKI AKTA	%
7201	KAB. BANGGAI	370.518	176.407	94.348	82.059	53.483
7202	KAB. POSO	249.582	118.768	56.572	62.196	47.632
7203	KAB. DONGGALA	309.144	147.628	54.600	93.028	36.985
7204	KAB. TOLI TOLI	233.997	109.495	63.660	45.835	58.14
7205	KAB. BUOL	155.349	70.329	46.627	23.702	66.298
7206	KAB. MOROWALI	175.323	79.903	45.156	34.747	56.514
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	125.030	60.161	32.017	28.144	53.219
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	452.696	216.227	114.544	101.683	52.974
7209	KAB. TOJO UNA UNA	167.746	78.672	44.805	33.867	56.952
7210	KAB. SIGI	262.159	130.054	65.438	64.616	50.316
7211	KAB. BANGGAI LAUT	74.920	33.851	29.471	4.380	87.061
7212	KAB. MOROWALI UTARA	144.489	65.459	34.944	30.515	53.383
7271	KOTA PALU	378.764	169.255	127.892	41.363	75.562
	TOTAL	3.099.717	1.456.209	810.074	646.135	55.629

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

Tabel 5.5 diatas dapat dilihat bahwa kepemilikan akta perkawinan terbanyak di Kota Palu sebesar 127.892 dokumen sedangkan kepemilikan akta perkawinan terkecil di Kabupaten Banggai Laut sebesar 29.471 dokumen. Kepemilikan akta perkawinan sangat diperlukan untuk menghindari terjadinya kasus yang menyangkut hak-hak perdata suami-istri.

5.3.3 Akta Perceraian

Akta perceraian adalah suatu bukti autentik tentang putusannya suatu ikatan perkawinan. Apabila akta perkawinan dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka perceraian harus melalui Pengadilan Negeri, yang telah menjadi kekuatan hukum yang pasti, baru dicatatkan/didaftarkan dalam daftar perceraian yang berjalan dan telah diperuntukan untuk itu.

Mengapa perceraian perlu dicatatkan dan diurus akta perceraianya? Bukti sahnya perceraian yang diperlukan sebagai dasar :

1. Legalitas putusannya perkawinan dan perubahan status sebagai janda atau duda cerai hidup.
2. Pengurusan hak tunjangan anak dari suami istri, harta gono gini, dan perkawinan setelah perceraian.

Bagi Pemerintah, dengan pencatatan perceraian diperoleh statistik peristiwa yang dapat digunakan untuk kepentingan pemantauan keluarga dan penetapan kebijakan pembangunan lainnya.

Pasangan suami istri tentunya berkeinginan menjalani ikatan perkawinan selamanya, tetapi bila sudah tidak dapat dipertahankan maka terjadi perceraian. Bukti hukum pasangan suami istri telah berpisah adalah akta perceraian. Bila akta perkawinan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Non Muslim), maka perceraian dilaksanakan melalui Pengadilan Negeri, dan bila akta perkawinan dikeluarkan oleh Kantor Urusan

Agama (Muslim) maka proses perceraianya melalui Pengadilan Agama. Penerbitan akta perceraian terbesar terjadi di Kota Palu yaitu sebanyak 5.442 dokumen. Hal ini dapat kita lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.6
Kepemilikan Akta Perceraian

KODE	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK	STATUS CERAI (JIWA)	MEMILIKI AKTA CERAI (JIWA)	TIDAK MEMILIKI AKTA	%
7201	KAB. BANGGAI	370.518	6.800	3.091	3.709	45.46
7202	KAB. POSO	249.582	2.610	839	1.771	32.15
7203	KAB. DONGGALA	309.144	2.726	638	2.088	23.40
7204	KAB. TOLI TOLI	233.997	2.798	1.405	1.393	50.21
7205	KAB. BUOL	155.349	1.509	744	765	49.30
7206	KAB. MOROWALI	175.323	2.471	869	1.602	35.17
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	125.030	1.870	403	1.467	21.55
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	452.696	4.522	2.018	2.504	44.63
7209	KAB. TOJO UNA UNA	167.746	2.489	1.037	1.452	41.66
7210	KAB. SIGI	262.159	3.487	990	2.497	28.39
7211	KAB. BANGGAI LAUT	74.920	770	590	180	76.62
7212	KAB. MOROWALI UTARA	144.489	1.390	696	694	50.07
7271	KOTA PALU	378.764	6.560	3.748	2.812	57.13
	TOTAL	3.099.717	40.002	17.068	22.934	42.67

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

Penduduk bercerai dapat disebabkan banyak faktor yang dialami oleh penduduk tersebut. Penyebab perceraian paling banyak dikarenakan perselisihan suami-istri dan atau ditinggal salah satu pasangan. Tingginya kasus perceraian dapat dilihat pada kepemilikan dokumen akta perceraian.

5.3.4 Akta Kematian

Akta Kematian merupakan dokumen kependudukan yang berfungsi sebagai identitas bagi penduduk yang sudah meninggal sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Warga pada umumnya masih belum paham dan belum merasa penting akan kepemilikan akta kematian. Warga merasa akta kematian tersebut hanya penting bagi mereka dengan ekonomi menengah keatas yang memiliki warisan saja.

Tabel 5.7.
Kepemilikan Akta Kematian

KODE	KABUPATEN/KOTA	MEMILIKI AKTA KEMATIAN
7201	KAB. BANGGAI	1.443
7202	KAB. POSO	1.801
7203	KAB. DONGGALA	1.385
7204	KAB TOLITOLI	1.353
7205	KAB. BUOL	1.013
7206	KAB. MOROWALI	1.341
7207	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	1.048
7208	KAB. PARIGI MOUTONG	4.326
7209	KAB. TOJO UNA-UNA	1.499
7210	KAB. SIGI	1.454
7211	KAB. BANGGAI KEPULAUAN	459
7212	KAB. MOROWALI UTARA	770
7271	KOTA PALU	3.216
	T O T A L	21.108

Sumber : Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI (DKB Semester II Tahun 2022)

Untuk kematian wajib dilaporkan oleh pemerintah desa/kelurahan ke Disdukcapil. Disdukcapil kemudian mengeluarkan akta kematian, untuk validasi data kependudukan, agar yang sudah mati tidak masuk lagi data base kependudukan. Selain itu dapat digunakan untuk pengklaiman asuransi ataupun perbankan, taspen dan urusan lainnya. Dengan masih minimnya pemahaman warga tentang pentingnya akte kematian bagi setiap keluarga, lurah/Kepala Desa sangat di harapkan dapat bersikap lebih pro aktif dalam melaporkan kematian warganya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar data dapat terus *up to date*.

Jadi jajaran perangkat desa/kelurahan sampai ke RT harus pro aktif, karena tidak mungkin mereka tidak tahu apabila ada warganya meninggal dunia. Setelah dilaporkan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menerbitkan akta kematian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Manfaat Dokumen Akta Kematian bagi penduduk diantaranya :

1. Penetapan status janda atau duda (terutama bagi Pegawai Negeri) diperlukan sebagai syarat menikah lagi.
2. Untuk persyaratan pengurusan pembagian waris (Peralihan Hak Atas Tanah), baik bagi istri atau suami maupun anak.
3. Diperlukan untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya.
4. Persyaratan untuk mengurus uang duka, tunjangan kecelakaan, taspen, asuransi, perbankan, pensiun.

BAB VI

PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Penduduk merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam aspek pembangunan. Penduduk bukan hanya sebagai obyek dari pembangunan tapi sekaligus sebagai subjek dari pembangunan, artinya penduduk berperan penting dalam kesuksesan semua aspek pembangunan. Jumlah penduduk yang besar tentunya membutuhkan pengembangan sistem administrasi kependudukan yang terorganisir dari pusat hingga ke daerah. Administrasi kependudukan yang dimaksud menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Semakin lengkap dan akuratnya data kependudukan yang tersedia, maka semakin mudah dan tepat perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Data perkembangan kependudukan merupakan data yang strategis dan dibutuhkan untuk perencanaan kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan dan berkesinambungan. Pembangunan berwawasan kependudukan bermakna pembangunan yang diselaraskan dengan potensi dan kondisi penduduk yang ada.

Penyajian data ditampilkan dalam bentuk tabel, gambar dan diagram/grafik serta analisis (penjelasan) yang memudahkan bagi Lembaga Pemerintah dan Non Pemerintah yang akan memanfaatkan Buku Profil Perkembangan Kependudukan ini sebagai sumber informasi.

Jumlah penduduk cenderung mengalami peningkatan terus-menerus dan luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Hal tersebut menjadikan kepadatan semakin meningkat, dan apabila tidak mendapat perhatian lebih dari Pemerintah setempat akan berdampak pada laju pertumbuhan dan perencanaan persebaran penduduk, tata ruang dan tata guna tanah. Jika ketiga hal ini tidak diperhatikan dengan baik, maka ke depan Provinsi Sulawesi Tengah

akan menjadi daerah yang padat dengan implikasi pada penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan perkotaan, yang berimplikasi pada resiko kesehatan penduduk, terutama dalam lingkungan dan persaingan akses fasilitas hidup yang dapat memicu permasalahan sosial.

Potensi yang dapat dilihat bahwa penduduk Provinsi Sulawesi Tengah didominasi oleh kelompok usia produktif maka perlu perhatian dari pemangku kebijakan Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk meningkatkan potensi tersebut. Perlunya peningkatan kualitas Pendidikan, kesehatan dan kecukupan gizi serta upaya menciptakan angkatan kerja yang berkualitas demi kemajuan daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ada beberapa perbedaan data kependudukan dengan Sektor lainnya, seperti data kependudukan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah maupun data penyandang disabilitas dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah. Akan tetapi bukan menjadi bahan perdebatan yang serius, dikarenakan dari masing-masing memiliki cara penghitungan dan pengolahan data. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil data kependudukan berdasarkan data dari SIAK yaitu data pelayanan Kabupaten/Kota yang telah dikonsolidasikan, dibersihkan dan dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI per semester (semester I setiap tanggal 30 Juni dan semester II setiap tanggal 31 Desember) atau setiap 6 (enam) bulan sekali. Cara ini biasanya diartikan dengan pendekatan *De Jure*. Sedangkan BPS melakukan dengan cara pendekatan *De Facto* yaitu berdasarkan fakta/kondisi pada saat turun ke lapangan, untuk batas *cut off* dari BPS dalam penghitungan dan pengolahan data yaitu pada bulan September setiap tahunnya.

6.2 SARAN

1. Pemahaman masyarakat tentang pentingnya updating data kependudukan masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diharapkan setiap Kabupaten dan Kota agar melakukan sosialisasi terhadap pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya *updating* data dan dilaksanakan sampai tingkat RT/RW. Data yang *update* dan dapat dipertanggungjawabkan akan menambah kualitas data kependudukan yang dihasilkan sehingga pengambilan kebijakan dan program pemerintah dapat dilaksanakan dengan tepat pula.
2. Pemanfaatan data yang belum terintegrasi antara data penduduk yang diakses instansi eksternal yang mempunyai instansi vertikal di tingkat pusatnya dengan data penduduk yang bersangkutan menjadikan kurang efektifnya sistem. Hal tersebut diperlukan sistem, sehingga ketika penduduk melaporkan perubahan datanya, maka data yang diakses oleh instansi eksternal dapat *update* secara sistem.
3. Secara umum, jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun 2022 tercatat mencapai 3.099.717 jiwa di mana laki-laki berjumlah 1.590.279 jiwa dan perempuan berjumlah 1.509.438 jiwa. Hal ini menggambarkan bahwa penduduk laki-laki berjumlah lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan dan untuk pelayanan administrasi kependudukan lebih tepat sasaran sesuai dengan apa yang menjadi target.
4. Cakupan kepemilikan akta kelahiran yang belum maksimal serta wajib KTP yang tidak ditindak lanjuti lebih maksimal. Diperlukan kebijakan dan Kerjasama dengan OPD/Instansi/ Kelurahan/PKK sehingga cakupan akta kelahiran dan wajib KTP dapat meningkat sesuai dengan capaian target nasional. Upaya yang perlu ditekankan diantaranya :
 1. Mencatatkan peristiwa kelahiran.
 2. Mendaftarkan dan mencatatkan kejadian vital seperti: perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak, pengakuan dan pengesahan anak.

3. Mencatatkan perubahan status kependudukan lainnya seperti: perubahan alamat ataupun perubahan nama, jenjang pendidikan, pekerjaan, gol darah dan lainnya.
4. Melakukan pelayanan jemput bola terhadap pelayanan adminduk terutama wajib KTP.
5. Kami menyadari bahwa Buku Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi Sulawesi Tengah ini masih jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran untuk perbaikan Profil Kependudukan mendatang baik dari pengguna data maupun pemerhati masalah kependudukan sangat kami harapkan.